

---

**KOMUNITAS-MULTIKULTURAL  
DALAM SEJARAH ISLAM PERIODE KLASIK**

---

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

**Lingkup Hak Cipta**

Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Ketentuan Pidana**

Pasal 72 :

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Prof. Dr. Dudung Abdurahman, M.Hum

# KOMUNITAS–MULTIKULTURAL DALAM SEJARAH ISLAM PERIODE KLASIK



PENERBIT OMBAK  
[www.penerbitombak.com](http://www.penerbitombak.com)

2014

**KOMUNITAS-MULTIKULTURAL DALAM SEJARAH ISLAM PERIODE KLASIK**  
Copyright©Prof. Dr. Dudung Abdurahman, M.Hum, 2014

Diterbitkan oleh Penerbit Ombak (**Anggota IKAPI**), 2014  
Perumahan Nogotirto III, Jl. Progo B-15, Yogyakarta 55292  
Tlp. (0274) 7019945; Fax. (0274) 620606  
e-mail: redaksiombak@yahoo.co.id  
facebook: Penerbit Ombak Dua  
website: www.penerbitombak.com

**PO.\*\*\*.\*\***

Penulis: Prof. Dr. Dudung Abdurahman, M.Hum  
Tata letak: Adik Mustofa  
Sampul: Dian Qamajaya

**\*\*\***

Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014  
**KOMUNITAS-MULTIKULTURAL DALAM SEJARAH ISLAM PERIODE KLASIK**  
\*\*\*+ \*\*\* hlm.; 14,5 x 21 cm  
ISBN: 978-602-258-\*\*\*

# DAFTAR ISI

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### BAB I PENDAHULUAN

### BAB II KOMUNITAS MUSLIM MASA NABI MUHAMMAD SAW

- A. Komunitas Arab dan Muslim di Mekah
- B. Kehidupan Multikultur Masyarakat Madinah

### BAB III KOMUNITAS-MULTIKULTURAL MASA KHULAFAH AL-RASYIDIN

- A. Kepemimpinan Abu Bakar ash-Shiddiq  
(11-13 H/ 632-634 M)
- B. Kepemimpinan Umar ibn Al-Khaththab  
(13-23H/ 634-644 M)
- C. Kepemimpinan Utsman ibn Affan  
(23-35 H/ 644-656 M)
- D. Kepemimpinan Ali ibn Abi Thalib  
(35-40 H./656-661M)

### BAB IV KOMUNITAS-MULTIKULTURAL PADA MASA DAULAH UMAYYAH

- A. Kebijakan Arabisasi dan Kecenderungan Multikultural
- B. Struktur Masyarakat Multikultural Daulah Umayyah Timur

- C. Struktur Masyarakat Multikultural Daulah Umayyah Barat
- D. Pola Kebijakan Politik Multikultural
- E. Dinamika Kebudayaan Komunitas Muslim

## **BAB V KEHIDUPAN MULTIKULTURAL PADA MASA ABBASIYAH**

- A. Multikulturalisme dalam Sistem Kekhalifahan
- B. Keragaman Sosial-keagamaan
- C. Dinamika Sosial-ekonomi
- D. Kemajemukan Ilmu Pengetahuan
- E. Pertumbuhan Kebudayaan Lokal

## **BAB VI PENUTUP**

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **TENTANG PENULIS**

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi, atas limpahan rahmat dan inayah-Nya, buku sejarah Islam ini dapat diterbitkan. Penyusunan buku tentang sejarah umat Islam pada periode klasik, yang ditekankan kepada penelaahan wacana multikulturalisme ini, dipandang dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi masyarakat muslim khususnya yang kini tengah dihadapkan kepada dinamika sosial-politik maupun sosial-budaya pada internal umat Islam sendiri dengan beranekaragam paham, aliran, dan golongan. Namun keanekaragaman mereka itu juga dihadapkan pada tantangan pluralitas kemanusiaan pada umumnya akibat globalisasi maupun pergumulan budaya lokal. Oleh karena itu, pembahasan atas sejarah multikulturalisme ini diharapkan menambah kelengkapan wacana sekaligus hikmah yang dapat dipetik serta disemaikan dalam kehidupan masyarakat dewasa ini.

Selayaknya pemahaman sejarah yang bertumpu kepada pengetahuan tentang masa lalu umat manusia, maka buku ini menyajikan informasi mengenai kelampauan segi-segi komunitas-multikultural pada periode sejarah Islam klasik, yakni sejak masa Nabi Muhammad saw. sekitar abad ke-7 hingga akhir masa daulah Abbasiyah pada abad ke-13. Pembahasan ini baru dibatasi pada periode tersebut, selain pola komunitas-multikultural itu menunjukkan perubahan dalam masa-masa sesudahnya, periode pertengahan dan periode modern, juga untuk pembahasan atas

tema yang sama diharapkan dapat disusun dalam buku-buku yang lain berikutnya. Salah satu alasan atas penetapan tema tersebut untuk sejarah Islam ini, bahwa di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya pada tahun 2013 dilakukan redesain kurikulum terutama untuk mata kuliah komponen universitas, dan salah satunya adalah telah dilakukan penyatuan antara mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dengan mata kuliah Islam dan Budaya Lokal menjadi “Sejarah Islam dan Budaya Lokal”. Untuk ini penulis berpendapat bahwa pemahaman atas hubungan Islam dan budaya lokal itu perlu ditelusuri sepanjang sejarah atau setiap periode perkembangan Islam.

Berdasarkan alasan-alasan itulah buku ini diharapkan menyumbang kepada kebutuhan akademik tersebut, tetapi juga dapat melengkapi sejumlah referensi terdahulu yang sebagiannya telah dijadikan rujukan penulis dalam penyusunan buku ini. Oleh karena itu penulis patut mengucapkan terima kasih kepada para ahli atau sejarawan yang karya-karya mereka telah dikutip dan disadur. Terima kasih juga disampaikan kepada Rusyda Nasyita Rahman, Imam Sofyan, dan Aris Fauzan, mereka telah membantu penulis dalam pengumpulan data maupun penyusunan sebagian draf awal sewaktu penulis harus menunda proses penyusunan buku karena menunaikan ibadah haji. Kepada Penerbit Ombak, disampaikan terima kasih atas kerja sama penerbitannya. Demikian pula kepada para pihak yang memberikan dorongan, serta segala bantuannya, sehingga buku ini sampai di hadapan para pembaca. Semoga amal baik semuanya mendapatkan imbalan pahala dari Sang Maha Pencipta alam semesta, Allah Swt., amin.

Yogyakarta, Februari 2014

Penulis



# BAB I

## PENDAHULUAN

*Multikulturalisme*, yang secara umum berarti “pandangan atau paham akan keragaman budaya dan perilaku yang disebabkan perbedaan ras, agama, dan struktur sosial”, kini terus menjadi bahan kajian dan pembahasan dalam melihat berbagai tatanan sosial, termasuk juga kaitannya dengan perkembangan Islam. Karenanya mengkaji hubungan Islam dan multikulturalisme khususnya merupakan masalah yang menarik karena Islam sebagai sistem doktrin yang berasal dari wahyu Tuhan selalu berkembang dalam konteks keragaman pemeluknya, sehingga sejarah agama ini juga selalu menunjukkan perbedaan dalam pemahaman dan perilaku pemeluknya.

Sejarah Islam terbentang dalam kurun waktu yang sangat panjang, sekitar 15 abad semenjak kelahiran agama Islam pada abad ke-6 M sampai perkembangannya sekarang pada awal abad ke-21 M, dan wilayah penyebaran serta cakupan peristiwa sejarahnya yang luas, telah menumbuhkan pola-pola keislaman dan multikulturalisme yang sangat unik. Pola umum multikulturalisme yang dimaksud di sini secara garis besar dapat dipetakan ke dalam periodisasi sejarah Islam zaman klasik (750-1250), zaman pertengahan (1250-1800), dan zaman modern (1800-sekarang). Pada masing-masing periode-periode tersebut juga menunjukkan karakteristik Islam dalam keragamannya yang berkembang secara

internal akibat bentukan umat Islam sendiri, maupun keragaman sosial-budaya mereka akibat pengaruh eksternal umat Islam.

Hal menarik tentang perkembangan Islam dan multikulturalisme itu justru telah berlangsung semenjak masa Nabi Muhammad saw., karena selain Islam pada masanya berhadapan dengan keragaman budaya masyarakat Arab juga banyak cara yang dilakukan nabi menyebarkan ajaran tauhid itu yang berlangsung secara akomodatif terhadap sistem budaya masyarakat pada zamannya. Demikian seterusnya proses multikulturalisme tumbuh dan berkembang hingga zaman keemasan Islam selama periode sejarah Islam klasik. Untuk inilah, kajian terhadap masalah tersebut pada zaman ini menarik dilakukan, sedikitnya atas pertimbangan bahwa perspektif sejarah periode tersebut dapat dijadikan sebagai fondasi awal dalam memahami Islam dan multikulturalisme.

Periode klasik dalam sejarah Islam dapat pula dikatakan sebagai periode pertumbuhan untuk sistem komunitas muslim. Konsepsi komunitas di sini dapat pula disebut sebagai realitas “keumatan” muslim, yakni pemeluk agama Islam dalam tatanan sosial dengan segala pranata dan struktur yang tumbuh di dalamnya, dan menunjukkan identitas atas kesamaan kepercayaan, pandangan dan perilaku masyarakat yang didasarkan pada sistem ajaran Islam. Komunitas<sup>1</sup> muslim pada masa Nabi Muhammad saw. mulai terbentuk dari kelompok kecil para penganut Islam pertama yang datang dari keluarga nabi dan sejumlah anggota

---

<sup>1</sup> Secara konseptual, istilah *komunitas* adalah sama maksudnya dengan “umat”, yaitu sebuah kolektivitas yang memiliki kesadaran, struktur dan mampu melakukan aksi bersama. Karena itu komunitas muslim mempunyai pemahaman, kepentingan, dan tujuan-tujuan politik yang dilakukan bersama, yakni oleh umat Islam dalam wilayah dan zaman tertentu. Baca, Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 27.

masyarakat dari berbagai latar etnis (*qabilah*) pada masyarakat Arab di Mekah. Selama pembinaan Islam di sana sekitar 13 tahun, komunitas muslim sudah menunjukkan keragaman kultur, sehingga ajaran Islam pun telah mulai akulturatif dengan budaya masyarakat pemeluknya itu. Kemudian dakwah nabi di Madinah yang berlangsung sekitar 10 tahun menunjukkan sistem komunitas muslim yang semakin terbentuk dalam keragaman kultur dan etnis, sehingga pengembangan ajaran Islam beriringan dengan tatanan komunitas yang mengakomodasi sejumlah kelompok, etnis, dan agama yang berbeda-beda.

Begitu selanjutnya pertumbuhan komunitas muslim pasca Nabi Muhammad saw. yang kemudian disebut sebagai periode Khulafa al-Rasyidin, selain dilatarbelakangi perubahan sistem sosial-politik pada masanya juga perkembangan komunitas muslim meluas dalam wilayah-wilayah etnis di jazirah Arab dan sekitarnya. Upaya keempat khalifah pada periode ini menunjukkan perbedaan orientasi pengembangan Islam maupun kehidupan umatnya berhadapan dengan situasi masyarakat serta kebudayaan yang kompleks.

Kemudian perkembangan umat Islam pada masa Daulah Umayyah di Damaskus (661-750) dan Daulah Umayyah di Andalusia (750-1031) menampilkan kompleksitas masyarakat muslim yang kian meluas baik yang terjadi dalam pertumbuhan komunitas aliran-aliran keagamaan maupun komunitas muslim dalam wilayah-wilayah kebudayaan etnis yang beragam. Kekhalifahan Umayyah Damaskus memang mengembangkan politik arabisme, namun formalitas politik kebudayaan itu tidaklah serta merta menjadikan komunitas yang berbasis monokultur, melainkan kebudayaan Arab-muslim yang berbasis kebudayaan etnis lokal, sehingga komunitas muslim berkembang dalam fenomena kebudayaannya

yang bercorak multikultur pada lingkup hegemoni politik Arab. Dominasi politik Arab bagi pengembangan kebudayaan Islam pada masa ini mengalami keterbatasan, terutama pada segi interaksi Arab-muslim dengan kebudayaan masyarakat luar Arab, sehingga kecenderungan multikulturalisme masih bersifat endogen.<sup>2</sup>

Multikulturalisme pada komunitas muslim menemukan coraknya yang bersifat eksogen<sup>3</sup> pada masa Daulah Abbasiyah (750-1250). Periode ini menunjukkan masyarakat dan kebudayaan Islam yang lebih mengglobal, hal mana corak arabisme berganti menjadi masyarakat dan kebudayaan yang bercorak interaktif dengan peradaban luar Arab. Pada masanya kebudayaan Islam bergumul dalam hubungan-hubungan antara kebudayaan Arab dengan kebudayaan Persia, Romawi, dan India. Universalitas kebudayaan Islam didorong oleh keinginan para khalifah periode ini untuk memperkenalkan kebudayaan luar Arab ke dalam komunitas-komunitas muslim melalui penterjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berasal dari peradaban-peradaban yang besar dan telah mapan pada masanya seperti Romawi, Persia, dan India, sehingga kecenderungan multikulturalisme pada masa ini bertolak dari keterbukaan para khalifah untuk menerima pengaruh kebudayaan luar Arab bagi kebudayaan Islam. Di samping itu, keterlibatan masyarakat luar Arab menunjukkan dinamikanya bagi proses pembentukan serta pengembangan kebudayaan Islam.

---

<sup>2</sup> Yakni pertumbuhan multikulturalisme muncul di dalam komunitas muslim sendiri, baik terjadi atas keragaman aliran-aliran agama maupun terjadi dalam keragaman basis etnisitas Arab.

<sup>3</sup> Dalam hal ini multikulturalisme mulai berkembang melampaui batas-batas keragaman pada internal Arab-muslim, yakni keragaman budaya mereka juga terjadi karena interaksi dengan budaya luar Islam dan luar budaya Arab.

Berdasarkan analisis sejarah seperti dipaparkan di atas, buku ini berusaha untuk memetakan pola-pola pengembangan komunitas Muslim berbasis multikulturalisme yang berlangsung sepanjang sejarah Islam pada masa klasik. Pemetaan dimaksud dipandang penting dalam rangka menelusuri akar-akar sejarah tentang sistem komunitas muslim berdasarkan perubahannya pada setiap periode, dan secara kritis dapat ditemukan faktor-faktor sosial maupun budaya yang menyertai perubahan yang ada, sehingga kemanfaatan teoretik atas penelusuran terhadap fakta-fakta sejarah itu dapat dijadikan sumber referensi bagi studi tentang pengembangan dan pembinaan komunitas muslim pada masa kini dan mendatang. Oleh karena itu, arti penting buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengayaan ilmu pengetahuan dalam disiplin sejarah maupun sosial-budaya.

Penulisan buku ini dikembangkan dalam studi literatur, dengan menekankan kajiannya dalam perspektif historis dan kultural, melalui interpretasi atas fakta-fakta sejarah Islam yang tersebar dalam berbagai sumber sekunder dari karya-karya para sejarawan terdahulu. Buku ini diharapkan sebagai historiografi Islam model baru yang bersifat tematik, terutama mengenai multikulturalisme dalam komunitas yang tumbuh dan berkembang pada masa Nabi Muhammad saw., pada masa Khulafa al-Rasyidin, pada masa Daulah Umayyah, dan pada masa Daulah Abbasiyah. Dengan demikian buku ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis kehidupan multikulturalisme dalam sistem komunitas muslim pada setiap episode sejarah Islam tersebut, adapun target pencapaian pengetahuannya di sekitar: bentuk-bentuk dan perkembangan komunitas muslim; pola-pola multikulturalisme dalam sistem komunitas muslim; dan faktor-faktor yang menyertai dinamika multikulturalisme pada setiap

sistem komunitas muslim. Buku ini diharapkan dapat melahirkan model baru dalam historiografi Islam, juga memberikan kontribusi bagi kelengkapan historiografi Islam pada umumnya; pengetahuan tentang multikulturalisme dalam sejarah umat Islam; dan referensi tentang pembinaan umat Islam di tengah keragaman sosial dan budaya dewasa ini.

Historiografi Islam periode klasik sebetulnya telah banyak ditulis oleh sejarawan terdahulu dari kalangan Muslim sendiri maupun para orientalis. Karya mereka pada umumnya membahas sejarah Islam itu secara kronologis atas peristiwa-peristiwa sosial dan budaya yang mencerminkan tingkat kemajuan umat Islam, tetapi nuansa politik lebih menonjol daripada penjelasan tentang kehidupan umat Islam dalam keragaman budayanya. Oleh karena itu, buku ini berusaha menampilkan perbedaannya dengan karya-karya terdahulu dalam perspektif sejarahnya yang menekankan segi-segi komunitas-multikultural.

Berdasarkan fokus pembahasan tersebut, kajian sejarah ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan menjadikan konsep *komunitas* sebagai acuan utama, sedangkan untuk analisis berdasarkan perspektif kebudayaannya dikembangkan konsep *multikulturalisme* itu sendiri. Kedua konsep tersebut dapat dijelaskan berdasarkan teori-teorinya sebagai berikut:

### **1. Sistem Komunitas**

Yang dimaksud dengan komunitas di sini ialah komunitas Islam yang terbentuk atas pelaksanaan ajaran-ajaran berdasarkan Alquran dan as-Sunnah, yang tercermin dalam sejarah serta perkembangan politiknya.<sup>4</sup> Sifat komunitas muslim sebagai

---

<sup>4</sup> John L. Esposito, *Islam dan Politik*, terj. (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 3.

kollektivitas ialah komprehensif dan egalitarian, artinya aktif dalam semua dimensi kehidupan, sehingga komunitas Muslim merupakan satuan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan sejarah.<sup>5</sup> Komunitas muslim secara umum berfungsi sebagai *interest group* (kelompok kepentingan) dan *pressure group* (kelompok penekan). Sebagai kelompok kepentingan, komunitas muslim menginginkan supaya nilai-nilai Islam terlaksana; sedangkan sebagai kelompok penekan, bahwa umat Islam mempunyai kepentingan-kepentingan dalam berbagai aspek kehidupan dengan segala implikasi politik.<sup>6</sup>

Komunitas demikian dapat dilihat dalam perkembangan budaya dan sejarah. Budaya dalam hal ini dengan pengertiannya yang umum adalah konsekuensi dari ajaran-ajaran Islam dengan semangat menggabungkan antara idealisme dan materialisme, sehingga keberadaan budaya Islam bersifat etika-religius dan integralistik dengan tauhid sebagai pusatnya. Sementara itu, dilihat dalam sejarahnya, komunitas muslim berarti sebuah aktivisme sejarah dalam perkembangan umat Islam yang ditunjukkan dengan fakta-fakta di dalam pergulatan sejarah umat Islam,<sup>7</sup> dalam pembahasan ini khususnya pada periode klasik.

## **2. Multikulturalisme**

Adalah sebuah konsep keberagaman, perbedaan, dan kemajemukan kebudayaan baik ras, suku, maupun agama yang diakui oleh sebuah komunitas. Dalam pengertian lain, ialah sebuah konsep yang memberikan pemahaman bahwa sebuah bangsa yang plural dan majemuk adalah bangsa yang dipenuhi

---

<sup>5</sup> Kuntowijoyo, *Identitas Politik*, hlm. 34.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

dengan budaya-budaya yang beragam (*multikultural*). Oleh karena itu, bangsa yang multikultural adalah bangsa dengan kelompok-kelompok etnik atau budaya yang ada dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip *co existensi* yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati kebudayaan lain.<sup>8</sup>

Konsep multikulturalisme juga mengakomodir kesetaraan dan perbedaan yang mampu meredam konflik vertikal dan horizontal. Masyarakat multikultural dicitakan mampu memberikan ruang yang luas bagi berbagai identitas kelompok untuk melaksanakan kehidupan secara otonom, sehingga tercipta suatu sistem budaya dan tatanan sosial yang mapan dalam kehidupan masyarakat serta menjadi pilar kedamaian sebuah bangsa. Berdasarkan pengertian ini, akan terbentuk sebuah persepsi dalam masyarakat bahwa budaya bukanlah sesuatu kemutlakan yang harus dipertahankan, melainkan budaya dipahami sebagai sebuah gerak kreatifitas masyarakat yang dibangun oleh gerakan prinsip-prinsip yang berbeda yang kemudian membentuk sebuah kesepakatan bersama tentang nilai, pandangan, dan sikap masyarakat. Dengan demikian budaya tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri yang dipengaruhi oleh faktor eksternal yang mengelilingi kehidupannya.<sup>9</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya para ahli mengkategorikan berbagai bentuk multikulturalisme, di antaranya Alwi Shihab<sup>10</sup> menyebutkan lima macam multikulturalisme sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> Abdurahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan* (Depok: Desantara, 2001), hlm. 17.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

<sup>10</sup> Alwi Shihab, *Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 132.



- a. Multikulturalisme isolasionis yang mengacu kepada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain.
- b. Multikulturalisme akomodatif, yakni masyarakat plural yang memiliki kultur dominan, yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi bagi kebutuhan kultural kaum minoritas.
- c. Multikulturalisme otonomis, yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan dengan budaya dominan dan mengangankan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima.
- d. Multikulturalisme kritis atau interaktif, yakni masyarakat plural yang tidak teralalu peduli terhadap kehidupan kultural otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka.
- e. Multikulturalisme kosmopolitan, yakni paham yang menghapuskan batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu. Mereka secara bebas terlibat dalam eksperimen-eksperimen interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing.<sup>11</sup>

Berdasarkan pengertian serta beberapa kategori multikulturalisme, dapatlah digarisbawahi untuk dijadikan pijakan,

---

<sup>11</sup> Disarikan dari kutipan Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 93-94.

bahwa makna utama dari multikulturalisme adalah *kesejajaran budaya*. Jadi, masing-masing budaya manusia atau kelompok etnis diposisikan sejajar dan setara. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih dominan. Semua kebudayaan pada dasarnya mempunyai kearifan-kearifan tradisional yang berbeda-beda.<sup>12</sup> Konsep multikulturalisme karena itu tidak dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman suku bangsa atau kebudayaan yang menjadi ciri masyarakat majemuk (*pluralisme*), karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan.

### **3. *Multikulturalisme dan Sistem Komunitas Muslim***

Berarti gambaran tentang keragaman budaya yang berkembang dalam sistem komunitas muslim. Kalau dilihat apa yang terjadi dalam sejarah Islam, terutama pada periode klasik yang disebut juga sebagai era pembentukan peradaban Islam semenjak masa Nabi Muhammad sampai abad XIII M; maka pada periode tersebut ditandai dengan pertumbuhan dan kemajuan kegiatan kepustakaan Arab, berbagai hasil pengajaran Islam dan kultur kosmopolitan. Menurut Ira M. Lapidus<sup>13</sup>, komunitas muslim dalam kultur tersebut merupakan perpaduan dari tiga unsur yang sangat kompleks antara unsur etnis-kesukuan, unsur keagamaan, dan unsur aristokratik, yang dari ketiganya seluruh versi peradaban Islam berasal. Dalam buku ini diusahakan dapat memberikan penjelasan tentang perkembangan peradaban Islam dari sudut pandang perkaitan antara peradaban Islam dengan pola-pola peradaban Timur Tengah, pola monoteistik yang

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

<sup>13</sup> Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, I, terj. (Jakarta: Grafiti Pers, 2000), hlm. viii-ix.

sebelumnya sudah mapan, dan kaitannya dengan efek kultural akibat pembentukan imperium di dalam komunitas muslim.

Beberapa asumsi dasar yang dapat dijadikan acuan untuk menjelaskan sistem komunitas muslim dalam keragaman budayanya: *Pertama*, bahwasanya keadaan masyarakat Muslim dalam rangkaian sejarah klasik dapat dihadirkan dalam bentuk institusi mereka, yang menggambarkan pola aktivitas serta pola hubungan sosial dan menggambarkan serangkaian hubungan mental. *Kedua*, bahwasanya sejarah masyarakat muslim dapat dikatakan sebagai bagian dari empat tipe dasar institusi: (1) kekeluargaan yang meliputi kesukuan, etnis, dan kelompok komunitas lainnya yang lebih kecil, (2) ekonomik, yang meliputi organisasi produksi dan distribusi harta benda material, (3) keagamaan dan kultural yang mengandung nilai-nilai dan tujuan-tujuan kemanusiaan dan kebersamaan yang dibangun di atas komitmen tertentu, dan (4) politik organisasi kekuasaan<sup>14</sup>. Pola-pola institusional masyarakat muslim ini pada umumnya berkembang di dalam masyarakat Mesopotania Kuna, kemudian menjadi basis bagi evolusi masyarakat Timur Tengah, selama periode Islam hal itu dibangun bersama dengan corak dan identitas kultur Islam. Pada gilirannya komunitas muslim yang tersebar di berbagai wilayah berinteraksi dengan institusi dan kultur lokal lainnya untuk menciptakan varian masyarakat Islam.

Oleh karena buku ini menetapkan obyeknya tentang sejarah umat Islam pada periode klasik, maka sejumlah permasalahan mendasar dalam menganalisa berbagai permasalahan sejarah adalah bersifat *kronologis* dan *prosesual* dalam empat babakan sejarah Islam (masa mabi, masa Khulafa Rasyidun, masa Daulah

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. xii.

Umayyah, dan masa Daulah Abbasiyah). Dengan pendekatan tersebut, studi ini diarahkan pada dua dimensi utama. *Pertama*, dalam dimensi sejarah, yakni upaya untuk memperhatikan proses pembentukan masyarakat Islam dan perubahan mereka sepanjang zaman klasik. *Kedua*, dengan dimensi analitis dalam perubahan untuk memahami timbulnya keragaman budaya dalam sistem komunitas mereka.

Penulisan buku ini menggunakan metode sejarah, yang dilakukan untuk menyampaikan keseluruhan sejarah Islam periode klasik yang koheren, maka *interpretasi* terhadap berbagai peristiwa spesifik dilakukan dengan pandangan yang utuh guna mencapai sikap, penjelasan, dan perspektif yang memungkinkan dapat menggali faktor-faktor dasar struktural dan kultural mengenai kecenderungan sejarah. Mekanisme penafsiran sejarah ini diterapkan berdasarkan pada sejumlah asumsi, bahwasanya sistem komunitas muslim dibangun berdasarkan institusi tertentu yang tunduk pada keragaman internal, keragaman pola hubungan antar mereka, keragaman budaya, dan keragaman zaman.

Keseluruhan paket sejarah ini disajikan secara *historiografi* dalam tiga bagian. Pertama kali adalah bagian pendahuluan sebagai bab pertama buku ini di dalamnya terutama disajikan konsep-konsep sebagai dasar pijakan bagi pembahasan yang bersifat naratif dan analisis di bagian kedua. Kandungan pembahasan pada bagian kedua terdiri dari empat bab yang memuat pembahasan secara kronologis, yaitu: bab kedua tentang “komunitas-multikultural pada masa Nabi Muhammad saw.”, khususnya tentang perintisan nabi membangun pola komunitas muslim di Mekah dan Madinah; bab ketiga tentang “kecenderungan multikulturalisme masa Khulafa al-Rasyidin”, terutama hal ini dilihat dari kepemimpinan dan kebijakan

keempat khalifah; bab keempat mengenai “perkembangan komunitas-multikultural pada masa Daulah Umayyah”, yang dilihat dari sistem sosial-politik dan kebudayaan pada masa Umayyah Timur maupun Umayyah Barat; bab kelima “dimensi-dimensi multikultural pada masa Daulah Abbasiyah”, yang ditelaah mulai dari sistem khilafah, keragaman sosial-keagamaan, perkembangan sosial-ekonomi, kemajemukan ilmu pengetahuan, hingga pertumbuhan sosial-budaya dalam komunitas-komunitas lokal. Akhirnya, buku ini menyajikan secercah kontribusi sejarah pada bab penutup, sebagai simpulan tentang multikulturalisme yang diharapkan menjadi cermin untuk mengaca diri umat Islam di Indonesia dewasa ini dan masa mendatang.

# BAB II

## KOMUNITAS MUSLIM MASA NABI MUHAMMAD SAW.

### A. Komunitas Arab dan Muslim di Mekah

Telah menjadi pengetahuan umum bahwa masyarakat Arab di Mekah menjelang kemunculan Islam adalah masyarakat yang terikat dengan kehidupan kekabilahan (*tribe*).<sup>1</sup> Kehidupan bersama seperti ini diikat dengan tali keturunan sedarah, dan kehidupan kekabilahan menjadi komunitas politik masyarakat Arab kala itu. Bahkan dalam perkembangannya, komunitas politik kabilah itu berbeda derajat kompleksitasnya antara satu dengan lainnya, karena suatu kabilah bisa mengalami perkembangan kian membesar. Misalnya, berasal dari satu kabilah Quraisy menurunkan unit kabilah di bawahnya seperti Bani Hasyim dan Bani Umayyah, kemudian keduanya berhasil membangun imperium kekuasaan. Pemimpin suatu kabilah disebut *Syaykh* atau *Sayyid al-Qabilah*, dengan beragam kualifikasi seperti

---

<sup>1</sup> Dalam sistem komunitas orang Arab sebelum Islam sebetulnya terdapat kategorisasi tingkat kompleksitas kabilah. Komunitas di atas kabilah disebut *al-sya'b* (jamak: *al-syu'ub*), yaitu asal keturunan paling jauh, misalnya *Sya'b* Qahthan dan *Sya'b* Adnan. Urutan di bawahnya *al-qabilah* (jamak: *al-qabail*). di bawahnya lagi ada *al-'imarah*, seperti *'Imarah* Kinanah dan *'Imarah* Quraisy. Kemudian di bawahnya lagi ada *al-bathn* seperti Bani Abdul Manaf dan Bani Makhzum; sesudahnya yaitu *al-fakhdz* seperti Bani Hasyim dan Bani Umayyah; dan berikut di bawahnya lagi ada *al-fashilah* seperti Bani Abi Thalib dan Bani Abbas. Baca, Abdul Aziz, *Chieftdom Madinah Salah Paham Negara Islam*, (Jakarta: Pustaka Alvabeta, 2011), hlm. 197.

berani, dermawan, berhati mulia, tegas, berpikir jernih, kaya, banyak pengalaman serta berumur, dan merupakan keturunan asli dari kabilah bersangkutan.

Komunitas kekabilahan Arab seperti tergambar di atas, lebih lanjut dapat dijelaskan tentang kehidupan komunitas mereka di Mekah menjelang kelahiran Islam. Pada masanya kabilah besar Quraisy yang mendiami Mekah itu terdiri dari 12 *al-fakhdz* atau Bani, dan yang terakhir adalah Bani Abdul Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Kaab bin Luay bin Ghalib bin Fihr. Abdul Manaf mempunyai empat anak, yaitu al-Mutthalib, Naufal, Abd al-Syams dan Hasyim. Dari Hasyim inilah lahir tokoh Abdul Mutthalib, kakek Nabi Muhammad saw. Ketokohan Abdul Mutthalib terkenal dengan kesuksesannya mewarisi pekerjaan Hasyim terkait *al-Siqayah* (penyediaan air bagi jemaah haji) dan *al-Rifadhah* (penyediaan makanan bagi para jemaah). Berkat keuletannya, dengan dibantu anaknya, al-Harits bin Abdul Mutthalib, ia berhasil menemukan kembali Sumur Zamzam yang disembunyikan kabilah Jurhum dan telah lama dicari-cari lokasinya dari generasi ke generasi. Begitu pula Abdul Mutthalib sukses mengatasi tantangan keamanan yang besar setelah penyerbuan tentara Habsyi pimpinan Abrahah, sehingga ia memperoleh penghargaan tinggi dari kabilah-kabilah Arab. Sepeninggalnya, kabilah Quraisy tidak memiliki tokoh yang disegani, sehingga dominasi mereka mulai mendapat tantangan dari dalam maupun dari luar. Kabilah ini pun sering terlibat dalam peperangan saudara yang dikenal dengan Peperangan Pijar (*Ayyam al-Fijr*), yang terjadi 25 tahun sebelum kenabian Muhammad saw., dan peperangan berakhir dengan perjanjian saling menolong yang disebut dengan *Hilf al-Fudhul* (Persekutuan Istimewa).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 205-208.

Kehidupan sosial pada komunitas Arab di Mekah menunjukkan keterjalinan unsur-unsur ekonomi dengan agama dan politik. Perdagangan telah mengantarkan sejumlah kecil pimpinan Quraisy menjadi kaya raya, sedangkan pimpinan lainnya hidup berkecukupan. Mereka melangsungkan perdagangan di Mekah, khususnya pada musim haji, dan juga ke luar kota seperti ke Yaman dan ke Ethiopia di musim dingin, sedangkan di musim panas mereka banyak berdagang ke Syiria dan Irak. Tradisi dagang ini dalam jangka panjang telah melemahkan kemampuan perang kabilah Quraisy, khususnya kelompok *Batthah* (kelompok kaya atau berkecukupan), sehingga mereka sangat bergantung kepada kelompok *Zhawahir* (kelompok miskin termasuk para budak) untuk pengamanan keluarga dan kota Mekah. Sistem sosial seperti itu juga paralel dengan pengorganisasian kekuasaan, sekalipun pembagian kekuasaan hanya berlangsung di kalangan *Quraisy Batthah*, yang kaya raya dan saling bersaing serta berebut pengaruh. Akibat lanjut dari persaingan di internal kabilah Quraisy sendiri, penduduk Mekah telah mengenal segregasi teritorial berdasarkan status sosial. Jurang perbedaan kaya-miskin sangat mencolok dan telah mengukuhkan segregasi sosial tersebut. Stratifikasi sosial berdasarkan status ekonomi melahirkan lima tingkatan masyarakat, yaitu: tingkat tetinggi terdiri dari orang kaya raya terhormat (*Maala*), kemudian orang terpendang berkecukupan (*Saadah*), di bawahnya adalah *Mawali* baik orang Arab maupun non-Arab, kemudian *Sha'alik* yaitu kaum miskin terutama akibat pengucilan dari kabilahnya, dan yang terakhir kelompok budak (*Ariqqa*).<sup>3</sup>

Kondisi keyakinan yang dianut penduduk Arab pada masa sebelum kedatangan Islam (masa jahiliyah), bahwasanya orang

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 209-210.



Arab digambarkan menganut beragam agama dan kepercayaan. Di antara mereka ada yang mengimani Allah dan ke-Esa-an-Nya. Ada pula yang beriman kepada Allah, dan sekaligus menyembah berhala dengan keyakinan bahwa berhala-berhala itu sebagai media mendekatkan mereka kepada Allah. Tetapi ada juga yang semata-mata menyembah berhala, menganggapnya sebagai pemberi manfaat dan rejeki dalam kehidupan. Di antara mereka ada yang memeluk agama Yahudi, Nasrani dan Majusi. Sebagian mereka tidak menentukan sikap, dan karena itu tidak mengimani apapun. Sebagian lagi meyakini hukum Tuhan hanya berlaku dalam kehidupan dunia dan tidak ada kehidupan setelah mati, dan sebagian mereka beriman kepada roh-roh dan menyembah benda langit.<sup>4</sup>

Proses internalisasi ajaran-ajaran keyakinan maupun tradisi kebudayaan berlangsung melalui kabilahan. Memang, kabilah adalah keluarga besar yang anggotanya memiliki rasa keterikatan tinggi di antara mereka. Eksistensi kabilah dan adat istiadat yang jadi kesepakatan anggotanya, dipertahankan dengan rasa dan sikap fanatis (*'ashabiyyah*), dengan harga setinggi apapun. Sebab dengan kabilah mereka tumbuh berkembang dan dengan kabilah pula mereka membanggakan diri. Namun demikian, meskipun melalui kabilah ini muncul sikap fanatisme, bagi masyarakat Arab, *'ashabiyyah* seperti inilah yang memberi andil bagi terciptanya keseimbangan antarkabilah serta terjaminnya hak-hak individu anggota kabilah dan kehormatannya.<sup>5</sup>

Melalui kabilah ini, Nabi Muhammad juga memanfaatkannya sebagai sarana dakwah. Penyebaran ajaran Islam yang awalnya

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 165.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 173.

sembunyi-sembunyi dilakukan kepada keluarga dan kerabat terdekat. Nabi Muhammad saw. adalah anggota Bani Hasyim, suatu kabilah yang kurang berkuasa dalam Suku Quraisy. Kabilah ini memegang jabatan *siqayah*. Nabi Muhammad lahir dari keluarga terhormat yang relatif miskin. Ayahnya bernama Abdullah anak Abdul Muthalib, seorang kepala suku Quraisy yang besar pengaruhnya. Ibunya adalah Aminah binti Wahab dari Bani Zuhrah. Tahun kelahiran Nabi dikenal dengan nama tahun Gajah (570 M).<sup>6</sup>

Beranjak remaja, sikap antipati terhadap penduduk Mekah yang sebagian besar menyembah berhala sudah ditunjukkan oleh Muhammad. Sebagian dari masa mudanya, keseharian Muhammad digunakan untuk menggembala bersama saudara angkatnya. Kegiatan menggembala merupakan kontak pertamanya dengan alam dan binatang yang dapat menimbulkan etos kerja, kebaikan, kesederhanaan, kemurahan hati dan semuanya itu yang menyebabkan beliau menjadi terkenal. Ketika masih muda, Muhammad pergi ke Syiria dan Yaman untuk berdagang. Perjalanan ini mempunyai pengaruh besar dalam tingkah laku dan cara hidupnya. Sebagai pedagang, Muhammad menjadi terkenal atau masyhur karena kebaikan dan kejujurannya yang sudah merupakan sikap dan prinsip hidupnya sejak masa kanak-kanak. Dengan ketenarannya itu, Muhammad tetap tidak senang terhadap penyembah berhala yang dilakukan oleh penduduk negerinya, serta tidak mengikuti dan menghadiri upacara-upacara ritual yang dilakukan masyarakat penyembah berhala di negerinya, tetapi Muhammad tekun menyendiri untuk beribadah kepada Allah.

---

<sup>6</sup> Yatim, *Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 16.

Orang muda yang dijuluki *al-Amien* ini akhirnya diamanahi Allah swt. untuk menjadi nabi dan rasul Allah. Penunjukannya sebagai nabi ditandai dengan turunnya wahyu Ilahi ketika beliau berada di Gua Hira, tepatnya saat beliau berumur 40 tahun. Wahyu pertama yang diterimanya menggambarkan budaya "*membaca*" dan "*menulis*" yaitu Surat al-Alaq, yang terdiri dari lima ayat; "*Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling pemurah. Yang mengajarkan dengan pena. Yang mengajar manusia apa yang mereka tidak ketahui*". Dengan wahyu pertama ini, Muhammad saw telah diangkat sebagai nabi Allah dan pada masa ini beliau belum disuruh untuk menyeru kepada umatnya. Orang-orang yang segera mempercayai kenabiannya dan menyatakan kesediaan untuk mengikutinya adalah [1] istrinya Khadijah, [2] keponakan yang diasuhnya semenjak kecil, Ali bin Abi Thalib, dan [3] mantan hamba sahayanya, Zaid bin Haritsah yang masih tinggal di rumah beliau. Maka dapat dikatakan bahwa tempat pertama pada perjuangan Muhammad adalah keluarganya sendiri.

Wahyu yang kedua turun ketika Muhammad saw. dalam "*keadaan berselimut*" dikarenakan mengigil setelah mendengar suara gemerincing yang keras, yang tidak pernah didengar sebelumnya. Pada saat beliau menerima wahyu yang kedua Surat al-Muddatstir: "*Hai orang yang berselimut!, bangun dan sampaikanlah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu dan pakaianmu hendak kau bersihkan dan hindarkan perbuatan dosa. Jangan kau memberi, karena ingin menerima lebih banyak. Dan demi Tuhanmu, tabahkanlah hatimu.*" Maka, semenjak saat itulah Muhammad diangkat sebagai rasul dan berbeda dengan nabi lain yang tidak diwajibkan menyeru orang-orang untuk kembali kepada

Allah. Sebagai rasul, beliau berkewajiban untuk menyeru kepada orang-orang yang hidup di sekitarnya. Tugas Muhammad adalah menyeru kebenaran kepada umat manusia dan menyukseskan risalah yang diberikan kepadanya. Seluruh hidup Muhammad sesudah penunjukannya sebagai rasul diarahkan untuk menyukseskan tugas yang berat ini.

Dengan turunnya perintah itu, mulailah Muhammad berdakwah. Pertama-tama beliau melakukannya dengan diam-diam di lingkungannya sendiri dan di kalangan rekan-rekannya. Karena itulah, orang yang pertama kali menerima dakwahnya adalah keluarga dan kerabat dekatnya. Dengan dakwah secara diam-diam ini, belasan orang telah memeluk agama Islam. Misi ini juga dibantu oleh rekannya seperti Abu Bakar yang berhasil membawa beberapa rekannya: Usman bin Affan, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin A'uf, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan Thalhah bin Ubaidillah kepada Nabi dan mengislamkannya di hadapan Nabi sendiri.<sup>7</sup>

Setelah dakwah secara sembunyi-sembunyi, turunlah perintah kepada Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan atau terbuka. Mula-mula Nabi mengundang dan menyeru kerabat karibnya dari Bani Abdul Muthalib. Langkah dakwah seterusnya yang diambil Muhammad adalah menyeru masyarakat umum. Nabi mulai menyeru segenap lapisan masyarakat kepada Islam dengan terang-terangan, baik golongan bangsawan maupun hamba sahaya. Mula-mula Nabi menyeru penduduk Mekah, kemudian penduduk negeri-negeri lain. Di samping itu, beliau juga menyeru orang-orang yang datang ke Mekah, dari berbagai negeri untuk mengerjakan haji. Kegiatan dakwah dikerjakannya tanpa lelah. Dengan usahanya

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 19.

yang gigih, hasil yang diharapkan mulai terlihat dengan ditandai semakin bertambahnya pengikut yang masuk Islam. Dari sinilah mulai terbentuk komunitas kecil umat Islam di Mekah.

Dakwah Nabi Muhammad saw. pada awal kerasulannya memperoleh sambutan luas dari masyarakat lapisan bawah, yaitu para budak. Hal ini mudah dipahami mengingat kondisi sosial mereka memang sangat membutuhkan pembebasan. Sebaliknya, sambutan dari masyarakat lapisan atas sangat sedikit, khususnya hanya datang dari istri nabi, keluarga dan kerabat dekat saja. Tatkala Nabi Muhammad berdakwah secara terbuka, yakni tiga tahun setelah kerasulannya, tak banyak pemuka Quraisy yang bersedia menyambutnya. Bahkan, pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah rasul. Semakin bertambahnya jumlah pengikut Nabi semakin keras tantangan dilancarkan kaum Quraisy.

Bagaimanapun, keselamatan Nabi Muhammad dan tugas awal kerasulan selama di Mekah sungguh tertolong oleh tradisi *al'ashabiyyah al-qabaliyyah*, yang berperan penting dalam menarik keluarga Bani Hasyim dan Bani Al-Muthalib untuk menjamin keselamatannya. Selama perlindungan kepadanya diberikan oleh anggota terkemuka Quraisy seperti Abu Thalib atau Khadijah, selama itu pula Muhammad aman dari upaya kekerasan fisik bukan hanya dari kabilah selain Quraisy, tetapi juga dari kabilah Quraisy sendiri. Di bawah naungan tradisi kekabilahan, hanya anggota kabilahnya sendiri yang berani menentangnya dengan cara-cara yang dapat diterima di dalam kabilah bersangkutan, dalam hal ini Quraisy, sementara kabilah lain tidak mungkin melakukan hal itu karena akan menimbulkan aksi balas dendam kekabilahan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Abdul Aziz, *Chiefdom Madinah*, hlm. 214.

Menurut Ahmad Syalabi yang dikutip oleh Badri Yatim, ada lima faktor yang mendorong orang Quraisy menentang seruan Islam itu, yaitu; (1) Mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka mengira bahwa tunduk kepada seruan Nabi Muhammad berarti tunduk kepada kepemimpinan Bani Al-Muthalib, hal tersebut sangat tidak mereka inginkan; (2) Nabi Muhammad menyerukan persamaan hak antara bangsawan dan budak. Hal ini tidak disetujui oleh kelas bangsawan Quraisy; (3) Para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat; (4) Taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berakar pada bangsa Arab; (5) Pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rejeki.<sup>9</sup>

Banyak cara yang ditempuh kaum Quraisy untuk mencegah dakwah Nabi Muhammad. Pertama-tama mereka menyusun siasat bagaimana melepaskan hubungan Nabi dengan Abu Thalib karena mereka mengira bahwa kekuatan Nabi terletak pada perlindungan dan pembelaan Abu Thalib yang amat disegani saat itu, namun cara ini gagal. Kemudian kaum Quraisy mengutus Walid ibn Mughirah dengan membawa Umarah ibn Walid, seorang pemuda yang gagah dan tampan, untuk dipertukarkan dengan Nabi Muhammad. Usul ini ditolak keras oleh Abu Thalib. Selanjutnya, mereka mengutus Utbah ibn Rabah, seorang ahli retorika untuk membujuk Nabi agar bersedia menghentikan dakwahnya dengan imbalan harta, tahta dan wanita. Cara inipun menemui jalan buntu.<sup>10</sup>

Setelah cara-cara diplomatik selalu mengalami kegagalan, tindakan kekerasan mulai dilakukan oleh kaum Quraisy. Tindakan

---

<sup>9</sup> Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, hlm. 20-21.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

kekerasan ini semakin intensif dilakukan manakala mereka mengetahui orang-orang terdekat di sekitarnya mulai memeluk Islam. Para budak sudah memiliki keyakinan berbeda dengan tuannya. Penyiksaan fisik pun mereka terima. Para pemimpin Quraisy mengharuskan setiap keluarga menyiksa anggota keluarganya yang masuk Islam sampai dia murtad kembali.

Kekejaman yang dilakukan oleh penduduk Mekah terhadap komunitas muslim pada saat itu, mendorong Nabi Muhammad untuk mengungsikan sahabat-sahabatnya ke luar Mekah. Permusuhan yang kian hebat antarkabilah menyebabkan kaum muslimin meninggalkan Mekah demi menyelamatkan diri. Bagi mereka yang tidak mempunyai kabilah pelindung, seperti budak, hijrah ke tempat lain adalah jalan terbaik. Sejarah mencatat sebagian besar kaum muslimin yang hijrah pertama kali ke Habsyi (Ethiopia) terdiri dari warga Mekah kelas bawah. Tetapi, hijrah yang fenomenal ke Yatsrib sekitar tahun 622 M., bukan hanya memberikan tempat aman bagi kaum muslimin Mekah, tetapi juga menyatukan kekuatan elemen Quraisy dengan kekuatan elemen Arab terkemuka di kota itu yang selalu terlibat permusuhan yaitu al-Aus dan al-Khazraj.<sup>11</sup>

Terdapat beberapa peristiwa yang merangkai proses hijrah ini, diantaranya pemboikotan terhadap Bani Hasyim, tindakan pemboikotan itu dimulai pada tahun ketujuh kenabian dan berlangsung selama tiga tahun. Selanjutnya pada tahun kesepuluh kenabian, paman nabi, Abu Thalib yang merupakan pelindung utamanya meninggal dunia. Tiga hari setelah itu, Khadijah istri nabi meninggal dunia pula. Tahun ini merupakan tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad saw. Untuk menghibur nabi yang sedang

---

<sup>11</sup> Abdul Aziz, *Chiefdom Madinah*, hlm. 215.

ditimpa duka, Allah meng'isra dan memikrajkan beliau pada tahun kesepuluh kenabian itu. Berita Isra' Mikraj ini sempat menggemparkan penduduk Mekah. Setelah peristiwa Isra' Mikraj dakwah Islam mengalami kemajuan pesat. Dukungan datang dari sejumlah penduduk Yatsrib yang berhaji ke Mekah, yang pada akhirnya memunculkan ikrar kesetiaan yang lebih dikenal dengan perjanjian Aqabah Pertama dan Aqabah Kedua.<sup>12</sup>

Melalui perjanjian Aqabah Kedua, nabi berkenan pindah ke Yastrib. Dalam perjalanan ke Yastrib Nabi ditemani oleh Abu Bakar. Sementara itu, penduduk Yastrib menunggu-nunggu kedatangannya. Sesampainya Nabi memasuki kota Yastrib, penduduk kota mengelu-elukan kedatangan beliau dengan penuh kegembiraan. Sejak itu, sebagai penghormatan terhadap nabi, nama Kota Yastrib diubah menjadi *Madinatun Nabi* (Kota Nabi) atau sering pula disebut *Madinatul Munawwarah* (kota yang bercahaya), karena dari sanalah sinar Islam memancar ke seluruh dunia. Dalam perkembangannya hingga saat ini, kota ini cukup disebut *Madinah* saja.

## **B. Kehidupan Multikultur Masyarakat Madinah**

Selain sebagai kota suci yang ditunjuk Allah Swt., keistimewaan Madinah yang lain bukan terjadi begitu saja, akan tetapi melalui proses transformasi sosial yang tidak sederhana. Setelah mengganti nama Yastrib dengan Madinah, nabi kemudian melakukan pemetaan dan sensus penduduk. Barangkali ini merupakan sensus penduduk pertama di dunia. Dalam sensus tersebut ditemukan kenyataan bahwa Madinah adalah sebuah kota yang multikultural. Heterogenitas kultural masyarakat kota

---

12 Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, hlm. 22-24.



Madinah dapat dilihat dari hasil cacah penduduk yang dilakukan atas perintah nabi, di mana dari 10.000 jiwa penduduk Madinah kala itu kaum muslim adalah minoritas yakni 1500 orang (15%). Mayoritas adalah orang musyrik Arab 4500 orang (45%) dan orang Yahudi 4000 orang (40%).<sup>13</sup>

Tingkat heterogenitas ini lebih tinggi lagi manakala dipaparkan bahwa masing-masing kelompok muslim, musyrik Arab, dan Yahudi itu di dalamnya terdiri dari berbagai kabilah atau sub-kelompok. Kaum muslim sendiri terdiri dari dua kelompok besar Muhajirin (migran) dan Anshor (non-migran), yang masing-masing terdiri dari berbagai suku atau kabilah yang punya tradisi bermusuhan karena kuatnya akar sukuisme dalam masyarakat Arab. Meski begitu, uniknya, kehidupan di Madinah dapat berlangsung dengan damai. Tidak mengherankan jika Madinah menjadi kota yang maju pada masa itu.

Pada tahun pertama di Madinah, Nabi Muhammad membuat langkah awal mengurangi semangat *'ashabiyyah qabaliyah* melalui penetapan hubungan persudaraan (*muakhhah*) antara kaum Muhajirin yang berbasis kabilah Quraisy dan kaum Anshar yang berbasis kabilah al-Khazraj dan sebagian kabilah al-Aus. Dengan membangun *ukhuwah islamiyah* diharapkan setiap muslim merasa terikat dalam suatu persaudaraan dan kekeluargaan. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad ini berarti menciptakan suatu bentuk persaudaraan yang baru, yaitu persaudaraan berdasarkan agama, menggantikan persaudaraan berdasarkan darah.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Sami bin Abdullah al-Maghluts, *al-Athlas at-Tarikh li Sirah ar-Rasul, Atlas Perjalanan Hidup Nabi Muhamamd*, (Jakarta: Al-Mahira, 2008), hlm. 95.

<sup>14</sup> Aziz, *Chiefdom Madinah*, hlm. 215; lihat juga Yatim, *Peradaban Islam*, hlm. 26.

Multikulturalisme adalah realitas yang sudah ada dalam sejarah umat manusia. Dalam konteks sejarah masyarakat Arab pra Islam khususnya di Madinah, multikulturalisme yang dibingkai dalam keragaman sistem teologi, keragaman suku, budaya dan bahasa adalah wujud nyata dari multikulturalisme tersebut. Karena, multikulturalisme menjadi bagian dari realitas sosial masyarakat saat itu. Ini berarti, multikulturalisme merupakan bagian tak terpisahkan dari realitas sosial kehidupan manusia. Dari masa yang sangat dini, multikulturalisme telah ada dan selalu mendampingi sejarah sosial mereka. Wacana multikulturalisme inilah yang disebut sebagai nilai universal yang memungkinkan antar agama dan keyakinan untuk berbicara segala sesuatu dalam bingkai universalitas, bukan sesuatu yang partikular dan eksklusif. Wacana multikulturalisme sebenarnya tidak berpotensi menghilangkan nilai-nilai partikular dari agama karena upaya seperti itu merupakan hal yang tidak mungkin.

Nabi Muhammad saw adalah tokoh yang patut dijadikan teladan dalam hal membumikan multikulturalisme. Ketika nabi saw. hijrah ke Madinah, beliau mulai memimpin berbagai komunitas yang berbeda latar belakang agama, suku, politik yang disatukan dalam satu bingkai dimana imam sebagai payung hukum utama di atas tata sosial berdasarkan suku dan kabilah tertentu. Muhammad saw. adalah orang yang berhasil menjadi pemimpin seluruh komponen masyarakat, dan bukan hanya kaum muslim saja. Ketika di Madinah, berbagai budaya, agama dan aliran politik bisa disatukan sehingga kehidupan Madinah pada waktu itu dapat berlangsung damai. Muhammad saw. memimpin komunitas besar Yahudi yang banyak menguasai aspek Ekonomi, politik dan kultur di Madinah.

Nabi Muhammad mampu menciptakan kedamaian di kalangan masyarakat multikultural dikarenakan beliau berhasil meletakkan

dasar hubungan persahabatan yang baik dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam. Agar stabilitas masyarakat dapat diwujudkan, Nabi Muhammad mengadakan ikatan perjanjian dengan mereka. Ikatan perjanjian itu dituangkan dalam sebuah piagam yang menjamin kebebasan beragama orang-orang Yahudi sebagai suatu komunitas. Setiap golongan masyarakat memiliki hak tertentu dalam bidang politik dan keagamaan. Kemerdekaan agama dijamin, dan seluruh anggota masyarakat berkewajiban mempertahankan keamanan negeri itu dari serangan luar. Dalam perjanjian itu jelas disebutkan bahwa Nabi Muhammad menjadi kepala pemerintahan karena sejauh menyangkut peraturan dan tata tertib umum, otoritas mutlak diberikan kepada beliau. Dalam bidang sosial, beliau juga meletakkan dasar persamaan antarsesama.<sup>15</sup>

Dengan menempatkan semua manusia pada derajat yang sama, otomatis Islam hendak memberikan ruang dan kesempatan yang sama pada semua manusia. Semua manusia berhak eksis dengan keragaman budaya, adat, dan keyakinan masing-masing. Nuansa demokratis dalam berkehidupan, berbangsa, dan bernegara menjadi ajaran yang sangat inheren dengan Islam. Nabi Muhammad saw. bersama para sahabatnya telah membangun Negara Madinah yang demokratis, sebagai simbol yang harus dipahami oleh umat muslim generasi penerus. Dalam pasal-pasal Piagam Madinah, misalnya, ditemukan spirit-spirit demokrasi mengental. Perhatikan pasal 16 dan 46 berikut:

dan bahwa orang Yahudi yang mengikuti kami akan memperoleh hak perlindungan dan hak persamaan tanpa ada penganiayaan dan tidak ada orang yang membantu musuh mereka (pasal 16)

---

<sup>15</sup> Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, hlm. 26.

dan bahwa Yahudi al-Aus, sekutu mereka dan diri (jiwa) mereka memperoleh hak seperti apa yang terdapat bagi pemilik *shahifat* ini serta memperoleh perlakuan yang baik dari pemilik *shahifat* ini (pasal 46).<sup>16</sup>

Piagam Madinah menjadi simbol bagi spirit Islam yang menjunjung tinggi demokrasi, kesetaraan, anti-rasisme, keadilan antar etnis, ras, dan agama. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan demokrasi yang diperjuangkan oleh Islam mewujudkan dalam teks-teks Piagam Madinah. Oleh karenanya, simbolisme Islam dalam Piagam Madinah ini harus dipahami dan nilai-nilainya ditransformasikan terus-menerus dari generasi ke generasi melalui saluran pendidikan yang tepat, yaitu pendidikan Islam yang menjunjung prinsip dan spirit multikulturalisme.

Mengacu pada Piagam Madinah, Nabi Muhammad mulai melakukan konsolidasi ke dalam dan menghimpun kekuatan masyarakat Madinah sebagai langkah membendung tekanan dari penduduk Mekah. Semenjak kemajuan Islam berkembang pesat di Madinah, penduduk Mekah memang semakin berambisi untuk menghancurkan Nabi Muhammad dan mengganggu jalannya dakwah Islam. Selama delapan bulan di Madinah, Nabi Muhammad mempersiapkan sejumlah ekspedisi militer kecil untuk mencegah kafilah dagang Quraisy. Ekspedisi ini bertujuan mengganggu urat nadi perdagangan dan kehidupan kaum Quraisy Mekah. Ekspedisi sekaligus memberi isyarat kepada kaum Quraisy Mekah bahwa kepentingan mereka bergantung pada adanya saling pengetahuan dengan kaum muslim saudara mereka sendiri yang terpaksa

---

<sup>16</sup> Dikutip oleh J. Sayuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Alquran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 150.

pindah ke Madinah, dengan jalan menghindari bencana besar dalam wujud peperangan, menjamin kebebasan kaum Muslim menjalankan agama mereka, dan menjamin keamanan lintas utara perdagangan Quraisy.<sup>17</sup>

Setelah adanya ekspedisi kecil tersebut, Nabi Muhammad semakin sering membentuk ekspedisi-ekspedisi yang lain yang akhirnya semakin dilancarkan pada gerakan-gerakan perang. Seperti halnya, munculnya Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, Perang Mut'ah, Perang Hunain dan Taif, dan Perang Tabuk. Pertempuran paling menentukan antara lain terjadi pada Perang Uhud, Perang Khandaq, Penaklukan Mekah, hingga Perang Tabuk sebagai operasi perang terakhir yang terjadi semasa hidup Nabi Muhammad. Melalui serangkaian perang ini, hierarki masyarakat Madinah antara muslim dan non-muslim yang dalam Piagam Madinah belum begitu jelas, mulai diperteguh. Hanya kaum muslim yang boleh bergabung dalam milisi bersenjata Madinah melawan kekuatan luar yang ingin mengganggu kaum muslim dan kepemimpinan Nabi Muhammad, sementara non-muslim diharuskan membayar pajak kepala (*jizyah*) sebagai pengganti kewajiban mereka memanggul senjata.<sup>18</sup>

Refleksi multikultural yang terkandung dalam Piagam Madinah mengalami gejolak yang beragam. Kejelasan akan hak dan kewajiban muslim dan non-muslim mulai diporsikan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya dalam dakwah Islam. Pada masa peperangan, tujuan dari gerakan milisi bukan hanya memerangi kaum Quraisy Mekah yang menentang Islam, namun juga sebagai bentuk perluasan kekuasaan Islam baik secara

---

<sup>17</sup> Aziz, *Chiefdom Madinah*, hlm. 223.

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 225.

geografis maupun perluasan area dakwah. Maka dari itu, bukan hanya penduduk Mekah, namun semua kabilah Arab (non-muslim) terlibat permusuhan dengan Madinah baik langsung ataupun karena terikat dalam perjanjian.

Dari rangkaian tindakan kemiliteran dan kegiatan diplomatik dalam bimbingan Nabi Muhammad selama sekitar sepuluh tahun (622-632 M.) itu, Islam di Madinah makin menampakkan kristalisasinya sebagai sebuah keimanan dan sebuah sistem sosial-politik. Semenjak itu komunitas muslim meluas dan membentuk hegemoninya di Arabia Tengah. Setelah Mekah dapat dikuasai dan suku-suku Arab dapat disatukan kepada kesatuan politik berbentuk persemakmuran Arab dengan ideologi yang sama di bawah sebuah kekuasaan pusat yang tunduk kepada sebuah hukum. Prestasi kepemimpinan Muhammad dalam hal mempersatukan kekuasaan politik itu tetap menunjukkan loyalitasnya terhadap sistem kesukuan Arab beserta nilai-nilai budayanya yang diolah dan diberi bentuk baru dengan cara di-Islam-kan.<sup>19</sup> Semenjak itulah penyatuan suku-suku Arab berlangsung melalui sebuah negara (Madinah) yang mengubah kehidupan sosial dan politik di Timur Tengah, dan berangsur menjadi tantangan sosio-politik bagi kekuasaan besar tetangganya kala itu, yaitu imperium Persia dan imperium Romawi.

---

<sup>19</sup> Esposito, *Islam dan Politik*, hlm. 8.

# BAB III

## KOMUNITAS-MULTIKULTURAL MASA KHULAFAL-RASYIDIN

Pasca meninggalnya Nabi Muhammad, estafet kepemimpinan pada saat itu mengalami perdebatan. Hal ini dikarenakan Nabi Muhammad sama sekali tidak meninggalkan wasiat mengenai siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin politik dan pemerintahan bagi umat Islam. Persoalan yang besar ini diserahkan kepada musyawarah umat Islam. Kondisi masyarakat Madinah yang terbagi menjadi dua yaitu kaum Anshor dan Muhajirin menambah kebingungan dalam pengambilan keputusan kandidat calon khalifah yang pantas. Masa setelah Nabi Muhammad wafat dikenal dengan nama masa Khulafa al-Rasyidin.

Periode pemerintahan Khulafa al-Rasyidin merupakan masa yang sangat penting dalam sejarah Islam. Mereka mampu menyelamatkan Islam, mengkonsolidasikan dan meletakkan dasar bagi kejayaan umat Islam. Selama kurang lebih tiga puluh tahun masa kepemimpinan Khulafa al-Rasyidin, periode ini tak hanya penting namun juga istimewa karena kepemimpinan mereka mengikuti metode yang dicontohkan Nabi Muhammad sesuai dengan tuntunan Allah Swt. Jika masa Nabi Muhammad dianggap sebagai masa penyemaian nilai kebudayaan Islam ke dalam sistem budaya bangsa Arab pada masa itu, dengan meluasnya ajaran Islam yang mempunyai sistem budaya yang berbeda-beda, maka

pengembangan Islam masa Khulafa al-Rasyidin ini dilangsungkan melalui penanaman nilai dan kebudayaan Islam yang tumbuh dengan subur.

Komunitas muslim-Arab pada masa ini telah mencapai sebagian besar wilayah Timur Tengah. Di sana terbentuk sebuah peradaban baru (peradaban Islam) yang tidak hanya di wilayah perbatasan Arabia tetapi juga di wilayah-wilayah pusat perkembangan peradaban Timur Tengah. Proses pembentukan peradaban baru itu seiring dengan proses penaklukan wilayah-wilayah imperium Sasania dan wilayah bagian timur imperium Bizantium menjadi wilayah imperium Islam. Bersamaan dengan penaklukan wilayah itu pula terjadilah proses perpindahan agama mayoritas agama Yahudi, Kristen, dan Zoroastrian menjadi pemeluk Islam. Pendudukan bangsa Arab juga mendorong perubahan sosial dan budaya yang progressif antara warga Arab dan non-Arab menjadi beberapa komunitas kosmopolitan. Proses pembentukan komunitas-komunitas baru beserta corak kebudayannya dapat diperhatikan lebih seksama pada setiap kepemimpinan dari Khulafa al-Rasyidin berikut ini.

#### **A. Kepemimpinan Abu Bakar ash-Shiddiq (11-13 H/ 632-634 M)**

Terpilihnya Abu Bakar di tengah perdebatan kaum Anshor dan Muhajirin sebagai salah satu refleksi betapa kuatnya ukhuwah islamiyah yang terjaga di kalangan umat Islam Madinah. Semangat keagamaan Abu Bakar yang luar biasa menjadi alasan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dalam musyawarah. Khalifah pertama ini nama lengkapnya adalah Abdullah ibn Utsman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'ab ibn Sa'ad ibn Taim yang termasuk satu dari duabelas cabang dari suku Quraisy. Namun Bani itu bukanlah



kelompok yang besar. Di zaman pra Islam bernama Abdul Ka'bah dan kemudian diganti oleh Nabi Muhammad menjadi Abdullah. Ia termasuk salah satu sahabat yang utama, ia diberi julukan *Abu Bakar* karena ia adalah orang yang pagi-pagi betul (yang awal) memeluk Islam dan ia juga mendapat julukan *ash-Shidiq* dikarenakan ia selalu membenarkan apa yang dikatakan Nabi Muhammad saw. dalam berbagai peristiwa, terutama peristiwa Isra' Mi'raj. Dia adalah sahabat Nabi Muhammad pada masa jahiliyyah dan orang pertama kali masuk Islam dari kalangan generasi tua. Dia dianggap sebagai orang kedua dalam Islam setelah Nabi Muhammad.<sup>1</sup>

Abu Bakar memimpin pemerintahan hanya dalam waktu singkat, yakni sekitar dua tahun lebih tiga bulan. Namun, masa kepemimpinannya penuh dengan jasa-jasa penting bagi umat Islam. Selama dua tahun memegang tampuk kepemimpinan sampai wafat, Abu Bakar berhasil melaksanakan program untuk mengkondisikan stabilitas di bidang politik, ekonomi, sosial dan keagamaan, di antaranya adalah:

- a. menggerakkan aksi-aksi penumpasan gelombang Riddah.
- b. membasmi gerombolan-gerombolan penjahat di luar kota.
- c. memadamkan gerakan-gerakan yang menghasut pembangkangan terhadap kewajiban mengeluarkan zakat.
- d. penumpasan terhadap oknum-oknum yang mengaku sebagai nabi baru.
- e. operasi-operasi pemulihan keamanan dan ketertiban di daerah-daerah Oman dan Hadramaut.

---

<sup>1</sup> Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002), hlm.93, lihat juga Siti Maryam, dkk., *Sejarah Peradaban islam dari Masa Klasik hingga Modern*, (Yogyakarta:LESPI, 2009), hlm. 87.

Kondisi masyarakat pada saat itu menunjukkan bahwa agama Islam belum mendalam meresapi sanubari penduduk Jazirah Arab. Di antara mereka ada yang telah menyatakan masuk Islam, tetapi belum mempelajari agama Islam secara lebih seksama, ataupun mereka menyatakan Islam tanpa keimanan yang kuat. Hal demikian terjadi antara lain bahwa setelah Islam tersebar luas pada enam tahun setelah nabi hijrah dan pasca perjanjian al-Hudaibiyah, dan juga setelah Hawazin dan Tsaqif dapat dikalahkan, mulailah berdatangan delegasi menghadap Nabi Muhammad untuk menyatakan keislaman mereka. Akan tetapi motivasi mereka untuk menyatakan masuk Islam masih didasari oleh berbagai macam alasan duniawi. Ada yang masuk Islam guna menghindari peperangan melawan kaum muslim, tetapi ada pula di antara mereka yang masuk Islam karena ingin mendapat barang rampasan perang atau ingin mendapat nama dan kedudukan.<sup>2</sup>

Akibat dari pondasi keislaman yang tidak kuat dan bukan datang dari hati sanubari, orang-orang yang lemah imannya itu selalu saja menunjukkan ketidakpatuhan mereka kepada agama Islam. Setelah Nabi Muhammad berpulang ke rahmatullah murtadlah kebanyakan dari mereka. Peristiwa wafatnya Nabi Muhammad mereka jadikan sebagai sebuah kesempatan untuk kembali mengingkari ajaran Islam. Fenomena ini berlangsung di awal pemerintahan Abu Bakar, yang pada akhirnya memunculkan kembali perpecahan di antara umat Islam.

Perdamaian dan toleransi yang telah dibangun oleh Nabi Muhammad kini mulai rusak akibat kemurtadan yang dilakukan oleh umat Islam itu sendiri. Pada hakikatnya, Nabi Muhammad

---

<sup>2</sup> Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka Alhusna,1983), hlm. 227-228.

telah menyerukan untuk selalu membangun ukhuwah islamiyah. Ajaran Islam pada saat itu sudah mampu memberantas sukuisme. Sudah dicanangkan supaya orang hidup dalam satu keluarga besar meskipun dari latar sosial yang beragam, yaitu keluarga Islam. Tetapi sukuisme itu menjadi hal yang sangat rentan kembali ketika tidak ada upaya pengawasan dan pengendalian diri di setiap umat Islam. Sukuisme di kalangan penduduk Arab selalu saja mudah muncul. Meskipun Nabi Muhammad telah memeranginya, sehingga sukuisme itu tidak akan pernah mati bahkan akan kembali ketika adanya kesempatan yang mendukungnya.<sup>3</sup>

Peristiwa wafatnya Nabi Muhammad dianggap sebagai sebuah kesempatan bagi bangsa Arab untuk menunjukkan eksistensinya kembali. Banyak di antara mereka memandang bahwa agama Islam telah menjadikan mereka di bawah kekuasaan suku Quraisy. Apalagi mereka melihat bahwa suku Quraisy akan mempertahankan kekuasaannya dan tidak membiarkan mereka untuk lepas dari kekuasaan Islam, maka semakin kuatlah dorongan untuk melepaskan diri dari Islam. Bahkan tidak hanya sampai di situ, salah satu upaya untuk membangkitkan sukuisme tampillah di antara suku-suku bangsa Arab tersebut yang mengaku dirinya nabi, tidak lain untuk mendapat simpati dan dukungan dari anggota suku masing-masing.<sup>4</sup> Di samping itu, ketidak-patuhan terhadap agama Islam juga timbul dari orang-orang yang tidak mau lagi membayar zakat. Mereka menganggap bahwa yang berhak meminta zakat hanya Nabi Muhammad, bahkan dari golongan lain menganggap bahwa zakat itu hanya sebagai upeti demi keselamatan mereka atau pajak yang dipaksakan. Padahal, maksud dari zakat ini adalah

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 228.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 229.

sebagai penerapan prinsip kekayaan dalam distribusi kekayaan negara. Dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khalifah Abu Bakar melaksanakan kebijakan ekonomi sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Muhammad saw.

Demikianlah, timbul orang-orang murtad, orang-orang yang mengaku dirinya nabi, dan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Orang-orang tersebut muncul pada sebagian besar bangsa Arab di tengah-tengah komunitas muslim pada saat itu. Mereka yang masih tetap patuh kepada agama Islam ialah penduduk Mekah, Madinah dan Thaif. Penduduk ketiga kota ini masih memenuhi kewajibannya. Mereka tidak keberatan untuk melakukan pengorbanan bagi kembalinya kejayaan Islam, dan suku Quraisy (Muhajirin) adalah yang paling banyak berkorban untuk kepentingan ini.<sup>5</sup>

Adanya pembangkangan orang Arab tersebut, Abu Bakar dengan tegas melancarkan operasi pembersihan terhadap mereka. Mula-mula hal itu dimaksudkan sebagai tekanan untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang benar, lalu berkembang menjadi perang merebut kemenangan. Tindakan pembersihan juga dilakukan untuk menumpas nabi-nabi palsu dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Rangkaian pertempuran yang terkenal disebut dengan perang *riddah*, digerakkan Abu Bakar dengan cepat. Dengan mengandalkan Khalid bin Walid, Abu Bakar mengakhiri pemberontakan kesukuan itu, dan mengukuhkan kekuasaan Islam kembali di Semenanjung Arabia. Dengan begitu terpelihara kembali kesatuan dan solidaritas masyarakat Islam.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 230.

<sup>6</sup> Esposito, *Islam dan Politik*, , hlm. 9-10.

Setelah memulihkan keadaan atau ketertiban di dalam negeri, Abu Bakar lalu mengalihkan perhatiannya untuk memperkuat perbatasan dengan wilayah Persia dan Bizantium, yang pada akhirnya menjurus kepada peperangan terhadap dua kekaisaran itu dengan mengirimkan pasukan secara besar-besaran untuk melawan mereka. Tentara Islam pada waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk datang ke Irak dan menaklukan Hirah. Adapun yang ke Syiria, suatu negara di sebelah utara Arab yang dikuasai oleh bangsa Romawi Timur (Bizantium) diutus empat panglima, yaitu Abu Ubaidah, Yazid bin Abi Sufyan, Amr bin Ash, dan Syurahbil. Ekspedisi ke Syiria ini memang sangat besar artinya dalam konstalasi politik umat Islam karena daerah protektorat itu merupakan front terdepan wilayah kekuasaan Islam dengan Romawi timur.<sup>7</sup>

Periode kepemimpinan Abu Bakar merupakan awal dekade konsolidasi pemerintahan bangsa Arab dan meluasnya komunitas muslim yang didukung gerakan migrasi orang-orang Arab itu sendiri ke beberapa wilayah kekaisaran Romawi dan Persia. Kemudahan konsolidasi komunitas muslim pada masanya juga disebabkan keadaan kedua kekuasaan itu secara kemiliteran telah lemah. Warga Kristen di Mesir, Syiria, dan Irak telah lama menampilkan ketidakserasian hubungan dengan para penguasa Romawi dan Persia yang menguasai mereka, sehingga suku-suku Kristen-Arab wilayah perbatasan bergabung dengan pasukan Muslim dan beberapa kota penting dengan mudah ditaklukkan.<sup>8</sup> Oleh karena itu, periode Abu Bakar ini mulai mengarahkan gerakan komunitas muslim dari Arabia menuju negeri-negeri di

---

<sup>7</sup> Yatim, *Sejarah Peradaban Islam.*, hlm. 36.

<sup>8</sup> Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, I, hlm. 62.

Timur Tengah. Kebudayaan mereka juga mulai bergeser, satu demi satu penduduk lokal berasimilasi dengan massa migran (terutama warga Mekah dan Madinah) membentuk komunitas-komunitas muslim di wilayah-wilayah pinggiran.

## **B. Kepemimpinan Umar ibn Al-Khaththab (13-23H/ 634-644 M)**

Pada masa pemerintahan Abu Bakar, beliau berhasil menjadikan kondisi internal umat Islam kembali solid setelah dapat menghancurkan para pembangkang dan pemberontak. Dengan keberhasilan ini, maka pergolakan intern umat nyaris tidak muncul kembali. Hal ini memberikan kemudahan bagi khalifah selanjutnya, Umar ibn al-Kaththab, untuk berkonsentrasi dalam melanjutkan ekspedisi militer ke daerah-daerah di luar Arab.

Khalifah kedua ini bernama lengkap Umar ibn al-Khaththab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza dari Bani Adi ibn Ka'ab yang termasuk suku Quraisy. Ia masuk Islam tahun keenam setelah kenabian Muhammad. Ia hidup selama 35 tahun di masa jahiliyah dan 30 tahun dalam keadaan muslim. Pada masa jahiliyah, Umar tidak dikenal memiliki pengaruh yang besar dan masyhur. Umar dikenal sebagai sosok yang keras hati, kasar, pemberani dan sangat membenci agama Islam. Meskipun begitu, sifat Umar yang keras dan pemberani mampu digunakan dengan baik ketika melawan orang-orang kafir Quraisy. Keberaniannya terbukti ketika tidak ada seorangpun dari orang-orang kafir yang berani memenuhi tantangannya supaya menghadang perjalanannya ketika ia bermaksud berhijrah. Keberanian ini pula yang mempengaruhi gaya kepemimpinannya saat menjadi khalifah.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Maryam, dkk, *Sejarah Peradaban Islam.*, hlm. 89-90.

Kepemimpinan Umar memiliki dampak yang banyak pada proses administrasi negara dan perluasan wilayah. Di zaman Umar gelombang ekspansi perluasan wilayah pertama terjadi. Ibu kota Syria, Damaskus, jatuh pada tahun 635 M. dan setahun kemudian setelah tentara Bizantium kalah di pertempuran Yarmuk, seluruh daerah Syria jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Karena perluasan wilayah terjadi sangat cepat, Umar pada waktu itu sesegera mungkin menyusun dan mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang terutama di Persia. Administrasi pemerintahan diatur menjadi delapan wilayah provinsi. Yaitu, Mekah, Madinah, Syria, Jazirah Arab, Basrah, Kuffah, Palestina, dan Mesir.<sup>10</sup> Perluasan wilayah Islam ini mengakibatkan meluasnya kebutuhan kehidupan dalam segala bidang. Keteraturan dalam bidang pemerintahan dan segala perlengkapannya memerlukan pemikiran yang sangat serius. Untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan tenaga manusia yang memiliki ketrampilan dan keahlian yang memadai bagi kelancaran roda pemerintahan itu sendiri.

Pusat kekuasaan di Madinah mengalami perkembangan yang sangat pesat, Khalifah Umar telah berhasil membuat dasar-dasar bagi suatu pemerintahan yang handal untuk melayani tuntutan masyarakat baru yang terus berkembang. Umar mendirikan beberapa dewan, membangun *baitul mal*, mencetak uang, membentuk kesatuan tentara untuk melindungi daerah tapal batas, mengatur gaji, mengangkat para hakim, dan menyelenggarakan "hisbah". Umar juga meletakkan prinsip-prinsip demokratis dalam pemerintahan dengan membangun jaringan pemerintahan sipil yang sempurna. Khalifah Umar dikenal bukan saja pandai

---

<sup>10</sup> Yatim, *Sejarah Peradaban Islam.*, hlm. 36-37.

menciptakan peraturan-peraturan baru, ia juga memperbaiki dan mengkaji ulang terhadap kebijaksanaan yang telah ada jika itu diperlukan demi tercapainya kemaslahatan umat Islam.<sup>11</sup>

Dengan demikian, kontribusi kepemimpinan Umar yang signifikan bagi peradaban Islam adalah *perluasan wilayah dan penataan administrasi pemerintahan*. Perluasan dan penguasaan wilayah-wilayah baru yang berada di luar Semenanjung Arabia, bahkan telah memasuki sebagian wilayah Persia dan Romawi. Perluasan wilayah biasanya menjadi tolok ukur kesuksesan suatu kepemimpinan. Tidaklah mungkin suatu kepemimpinan mampu melakukan suatu perluasan wilayah jikalau faktor dalam negeri masih belum kuat.

Pada masa pemerintahan khalifah Umar, komunitas-komunitas muslim-Arab dikembangkan melalui pengaturan antara warga penakluk dan yang ditaklukan, yaitu dengan memberlakukan dua prinsip utama. *Prinsip pertama*, bahwa Umar mengembangkan penakluk Arab menjadi sebuah elite militer dengan tugas menjalankan penaklukan berikutnya, dan untuk membentengi wilayah-wilayah yang ditundukkan. Tiga perkampungan militer yang terbesar adalah didirikan di Iraq dan di Mesir. Dua perkampungan di wilayah Iraq, yaitu Basrah yang dibangun di pusat Teluk Persia, dialokasikan sebagai wilayah strategis untuk mempermudah komunikasi dengan Madinah, dan satu perkampungan lainnya adalah di Kufah yang dibangun di wilayah sungai Ephrat ke utara hingga berdekatan dengan al-Hira. Adapun perkampungan militer di Mesir dibangun di Fustat yang juga difungsikan sebagai pusat bagi ekspansi Arab ke Afrika Utara sampai Qayrawan (Tunisia). *Prinsip kedua*, bahwa Umar memerintahkan agar warga taklukan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 38.



jangan diganggu. Artinya, muslim-Arab tidak boleh memaksakan agar mereka memeluk agama Islam. Karena itu khalifah melindungi orang-orang Kristen, Yahudi dan Zoroastrian Timur Tengah hidup bersama komunitas-komunitas muslim-Arab, namun mereka diharuskan membayar upeti.<sup>12</sup>

Sekalipun demikian, secara praktis beberapa pengaturan yang dibuat menyertai perluasan wilayah dan komunitas muslim itu tidaklah bersifat permanen. Pola hubungan antara orang Arab dan kalangan elite lokal misalnya, tidak ada kesamaan antara daerah satu dengan daerah lainnya, hal ini tergantung pada situasi penaklukan bangsa Arab dan situasi sistem administratif dan sosial setempat yang ada. Demikian halnya dalam setiap propinsi, pihak Arab mengadopsi sistem perpajakan yang berlaku sebelumnya. Di Iraq mereka mengadopsi sistem Sasania dalam pengumpulan pajak tanah (*kharraj*) dan pajak jiwa (*jizyah*) sekaligus. Sementara itu, di Mesir juga terdapat pajak tanah dan pajak jiwa, tetapi pajak jiwa ditaksir berdasarkan keseluruhan warga kampung dan kemudian dibagi secara internal oleh warga setempat.<sup>13</sup>

Fenomena yang menarik akibat perluasan wilayah dan pembentukan komunitas muslim itu adalah terjadinya perubahan sosial di wilayah-wilayah taklukan. Perubahan sosial yang menonjol juga telah membawakan ekspresi kultural terutama melalui pemeluk Islam dan penerimaan bahasa Arab. Seperti terjadi di wilayah subur yang subur (Mesopotamia), pemeluk Islam yang paling awal adalah suku-suku Badui-Kristen, namun sejumlah lainnya tetap memeluk Kristen. Dalam sistem komunitas baru di wilayah-wilayah taklukan itu, elit muslim-Arab membentuk

---

<sup>12</sup> Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, I, hlm. 63-64.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 66-67.

sebuah aristokrasi, sedangkan masyarakat taklukan termasuk non muslim sebagai warga penduduk. Rezim muslim yang paling awal menunjukkan sikap toleran terhadap warga non muslim, misalnya mereka turut menertibkan gereja-gereja Kristen untuk melanjutkan peran utamanya sebagai lembaga pendidikan, kehakiman dan badan administrasi politik bagi warga penduduk yang beragama Kristen. Demikian halnya warga non-Arab tetap mempertahankan ikatan komunal dan keagamaan mereka dan terus bekerja dalam bidang-bidang pekerjaan produktif yang memungkinkan mereka menopang kalangan elite penguasa.<sup>14</sup>

### C. Kepemimpinan Utsman ibn Affan (23-35 H./ 644-656 M.)

Kekhalifahan yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Nama lengkapnya ialah Utsman ibn Affan ibn Abil Ash ibn Umayyah ibn Abd Syams dari suku Quraisy. Utsman dilahirkan pada tahun 573 M. Ia memeluk Islam karena ajakan Abu Bakar, dan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad. Utsman adalah orang yang kaya namun ia berlaku selayaknya orang yang tidak punya dan kekayaannya sebagian besar digunakan untuk kepentingan Islam. Utsman mendapat gelar *Zun Nurain* artinya yang memiliki dua cahaya, karena menikahi dua putri Nabi Muhammad secara berurutan setelah salah satu meninggal.<sup>15</sup>

Seperti halnya Umar, Utsman diangkat menjadi khalifah melalui proses pemilihan. Bedanya, Umar ditunjuk secara langsung sedangkan Utsman diangkat dengan penunjukkan tidak langsung, yaitu melewati badan syura yang dibentuk oleh Umar menjelang

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 76-79.

<sup>15</sup> Maryam, dkk, *Sejarah Peradaban Islam.*, hlm. 93.

wafatnya. Khalifah Umar membentuk sebuah komisi yang terdiri dari enam orang calon. Dengan perintah memilih salah seorang dari mereka untuk diangkat menjadi seorang khalifah. Alhasil Utsmanlah yang terpilih untuk menjadi khalifah selanjutnya untuk menggantikan Umar. Pada masa awal pemerintahannya, Utsman melanjutkan sukses para pendahulunya, terutama dalam perluasan wilayah kekuasaan Islam. Adapun tempat-tempat strategis yang sudah dikuasai seperti Mesir dan Irak terus dilindungi dan dikembangkan dengan melakukan serangkaian ekspedisi militer yang terencana secara cermat.

Karya monumental Utsman yang dipersembahkan kepada umat Islam ialah penyusunan kitab suci Alquran. Penyusun Alquran yaitu Zaid bin Tsabit, sedangkan yang mengumpulkan tulisan-tulisan Alquran antara lain adalah Hafsa, salah seorang isteri Nabi Muhammad. Kemudian dewan itu membuat beberapa salinan naskah Alquran untuk dikirimkan ke berbagai wilayah provinsi sebagai pedoman yang benar untuk masa selanjutnya. Bentuk manajemen yang ditetapkan dalam pemerintahan Utsman tercermin dalam pengumpulan mushaf Alquran menjadi satu yang dikenal dengan *Mushaf Utsmani*.

Jasa besar Utsman bagi kelangsungan keagamaan tersebut, semasa kekhalifahannya nyaris hilang dengan kebijakannya yang cenderung mengutamakan intern klan Umayyah dan klan Mekah lainnya, sementara itu para sahabat Nabi dan kelompok Madinah diabaikan. Pembagian pendapatan negara yang pada masa Umar diprioritaskan untuk kepentingan kalangan migran, masa Utsman ditekankan pada sistem kekuasaan pusat yang menguasai seluruh pendapatan propinsi dan menetapkan juru hitung *sawafi* (lahan pertanian yang ditinggalkan oleh penguasa Sasania) dari kalangan

kerabatnya sendiri,<sup>16</sup> bahkan jabatan-jabatan kunci beserta peningkatan kekayaan anggota keluarganya itu terus dilakukan. Dalam banyak hal, Utsman seakan menegakkan kembali sebuah sistem koalisi aristokrat Mekah dan kesukuan Arabia pra-Islam dan meninggalkan elemen-elemen baru dalam sistem komunitas yang diperkenalkan Islam. Beberapa kebijakan demikian secara tidak langsung telah memancing timbulnya perlawanan dan persekongkolan yang sangat sengit, terutama di antara lapisan elite di Madinah baik dari kalangan Muhajirin maupun dari kalangan Anshar. Berbagai tuduhan bahwa Utsman bersikap lemah dan mempraktekan *nefotism* menyebabkan intrik-intrik politik makin membara. Sejak itu komunitas muslim mulai dilanda serangkaian pemberontakan internal dan kemelut-kemelut keagamaan hingga saling membunuh sesama muslim yang membahayakan keutuhan sosial-politik Islam.

#### **D. Kepemimpinan Ali ibn Abi Thalib (35-40H/656-661M)**

Tidak lama setelah kematian Utsman, yang terbunuh pada tahun 656 M. oleh gerombolan sekitar 500 orang Arab dari Fusthat yang memberikan perlawanan atas kebijakannya, maka Ali ibn Abi Thalib dilantik sebagai khalifah baru pengganti Utsman. Kebijakan politik yang pertamakali diterapkan Ali adalah mengubah sistem sentralisasi kekuasaan khalifah atas seluruh pendapatan propinsi dan menggantikannya dengan sistem penyaluran pajak dan harta rampasan secara seimbang di antara orang-orang Arab. Untuk memperkokoh kedudukannya sebagai khalifah, Ali mengklaim dirinya atas kesalehan pribadi dan kedekatannya dengan Nabi Muhammad dan Islam, yakni

---

<sup>16</sup> Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, I, hlm. 83.

ia sebagai kemenakan sekaligus menantu nabi dan termasuk golongan awal masuk Islam.

Meski Ali memperoleh dukungan keluarga nabi (*ahl al-bait*), masyarakat Anshar Madinah, masyarakat Kufah, dan masyarakat Mesir terutama kelompok pembunuh Utsman, namun peperangan sipil dan konflik interes terus berlangsung sepanjang masa pemerintahannya. Kalangan elite Mekah yang dipimpin Thalhah, Zubeir, dan Aisyah tampil sebagai pihak oposisi yang menentang Ali, hingga Ali dapat menumpas mereka dalam pertempuran yang dikenal dengan *Harb al-Jamal* (Perang Unta) pada 656 M., disebabkan Aisyah dalam pertempuran itu mengendarai unta. Perlawanan lebih keras lagi datang dari Muawiyah, sebagai gubernur Syiria dan kemenakan Utsman, yang menuntut balas atas kematian pamannya itu. Mereka berkumpul di medan perang Shiffin, sebuah tempat pada perbatasan Irak Utara dan Suriah Utara, pada tahun 657 M. Beberapa bulan terus terjadi konfrontasi dan berakhir dengan proses negosiasi yang dipelopori kelompok moderat yang sepakat untuk merundingkan permasalahan “adakah pembunuhan Utsman dapat dibenarkan”. Namun para pendukung Ali sendiri tidak utuh lagi, kalangan Khariijyah atau lebih dikenal dengan sebutan *Khawarij* (kelompok yang memisahkan diri) memandang perkenan Ali menerima usul perundingan sebagai pelanggaran terhadap prinsip agama. Pada Januari 659 M., juru runding bertemu di Adhruh dengan menghasilkan dua kesepakatan: 1) bahwasanya pembunuh Utsman tidak dapat dibenarkan, dan 2) sebuah lembaga *syura* dibentuk untuk memilih seorang khalifah baru. Atas hasil perundingan ini Ali menolak kesepakatan tersebut, tetapi tidak berpengaruh lagi karena koalisi Ali terpecah dan pimpinan suku-suku Kufah melepaskan dukungan terhadapnya. Setelah

terbunuhnya Ali oleh kelompok Khawarij, opini bangsa Arab pun memihak kepada suksesi Muawiyah. Mereka memandang bahwa Muawiyah mampu menjalankan pemerintahan bersama dengan kalangan elite muslim dan kekuasaan bangsa Arab.<sup>17</sup>

Tragedi sipil pada penghujung kepemimpinan Ali berdampak perpecahan permanen dalam komunitas muslim-Arab. Perpecahan komunitas muslim bermula dari masalah khilafah, terutama tanggapan mereka atas suksesi Muawiyah. Bagi mereka yang menerima kepemimpinan Muawiyah dan serangkaian khalifah sesudahnya disebut *Sunni*, sedangkan mereka yang bersikeras mempertahankan Ali sebagai satu-satunya khalifah yang berhak dan hanya keturunannya yang berhak meneruskan dan menggantikannya disebut *Syi'ah*. Adapun kalangan *Khawarij* berprinsip bahwasanya seorang khalifah tidak harus keturunan dari sebuah keluarga melainkan harus dipilih mayoritas komunitas muslim dan tetap bertahan dalam jabatannya sepanjang ia menjalankan kekuasaannya secara benar dan tidak melanggar. Semenjak itu pula perselisihan umat Islam mulai berkembang menjadi beberapa sekte yang meluas sampai beberapa kepentingan keagamaan, sehingga *Sunni*, *Syi'ah*, *Khawarij* mengembangkan versi-versi Islam yang berbeda satu sama lainnya.<sup>18</sup>

\*\*\*

Berdasarkan studi terhadap perkembangan komunitas muslim pada periode Khulafa al-Rasyidin itu, maka fenomena multikulturalisme lebih kentara dari kehidupan sosial di wilayah-

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 84-85.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

wilayah yang dikuasai Islam. Perkembangan budaya yang beragam dimaksud tercermin dari pengumpulan sosial yang secara stratifikatif terbagi menjadi tiga lapisan terbesar. John L. Esposito membaginya menjadi empat lapisan, dengan menyebutkan lapisan terakhir sebagai hamba-sahaya,<sup>19</sup> tetapi bukan saja Alquran (4:40 dan 16:73) tidak mentolelir lagi perbudakan, ternyata juga Esposito sendiri tidak menjelaskannya secara faktual. Ketiga lapisan yang dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Golongan elite muslim, yang pada masanya adalah kalangan *al-Shahabi* (para sahabat nabi). Atas kedudukannya ini mereka berperan sebagai penakluk, pemimpin, dan pengembang pembinaan dan pembangunan komunitas (*ummah*).
2. Warga muslim pada umumnya, baik mereka berasal dari keturunan Arab maupun bukan Arab (*Mawalli*). Mereka berkedudukan sama di hadapan Allah dan mengakui ajaran Nabi Muhammad, tetapi praktek keagamaan dan perilaku sosial mereka bervariasi sesuai lingkungan kebudayaan komunitas.
3. Golongan *Zhimmi*, yaitu warga non muslim yang mengakui kekuasaan Islam, khususnya kalangan Yahudi, Nasrani, dan Zorowastrian. Mereka memperoleh kebebasan dalam melaksanakan praktek keagamaan masing-masing, dilindungi dari agresi pihak luar oleh pasukan Islam, dan berkewajiban membayar *jizyah* (pajak diri). Karena itu mereka juga berperan menopang kehidupan pluralitas agama dan budaya komunitas muslim.

Kelangsungan multikultural yang ditopang struktur sosial

---

<sup>19</sup> Esposito, *Islam dan Politik*, hlm. 13.

yang beragam itu telah mendorong perubahan sosial di wilayah-wilayah penyebaran Islam. Dimulai dengan pendirian kota-kota baru telah mengakibatkan peralihan kesempatan ekonomi dan kekuasaan kepada warga baru, dengan kecenderungannya antara lain bahwa warga non-Arab memasuki lapisan militer muslim-Arab, sedangkan kalangan Arab sendiri menjadi tuan-tuan tanah, saudagar, dan pemukim tetap. Perubahan sosial juga terjadi dalam pembentukan komunitas campuran antara Arab dan non-Arab, bahkan memungkinkan pembentukan perkumpulan keagamaan seperti muballig kharismatik, ahli baca Alquran, ulama, sufi, dan sebagainya yang memungkinkan terbentuknya pola organisasi sosial yang baru.



# BAB IV

## KOMUNITAS-MULTIKULTURAL PADA MASA DAULAH UMAYYAH

### A. Kebijakan Arabisasi dan Kecenderungan Multikultural

Sebagai dinasti pertama dalam Islam, Daulah Umayyah memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan fondasi-fondasi kekuasaan Islam, termasuk juga dalam konteks pembangunan kebudayaannya. Namun mengkaji lebih lanjut terhadap kebudayaannya itu dari perspektif multikulturalisme pada masa kekuasaan Daulah ini seakan bersebrangan dengan pengetahuan sejarah Islam selama ini. Sebab, telah umum diketahui bahwa Daulah Umayyah, khususnya yang berpusat di Damaskus terkenal dengan kebijakan Arabisasi. Yakni kebijakan Arabisasi—yang menekankan mono-kulturalisme—justru merupakan anti-tesa atas multikulturalisme. Akan tetapi, sebagaimana pembahasan dalam bab ini, kebijakan politik-administratif tersebut tidak semata meniadakan co-eksistensi dan signifikansi peran komunitas-komunitas non-Arab dalam konteks pembangunan kebudayaan dan peradaban Islam pada masa kekuasaan Daulah Umayyah di Timur maupun di Barat.

Seperti dijelaskan Gerald Hawting dalam bukunya *The First Dynasty of Islam: The Umayyad Caliphate AD 661-750*, bahwa arus “Arabisasi” tidak lebih dari sekedar konstruksi dan ekspansi kebudayaan yang ditandai dengan penggunaan bahasa Arab

di seluruh wilayah kekuasaan Islam (Daulah Umayyah) saat itu. Meskipun Arabisasi seringkali diasosiasikan dengan arus *Islamisasi*, tetapi dalam banyak hal antara keduanya berbeda. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa beberapa komunitas, seperti golongan Yahudi dan Kristen tetap menjadi bagian penting dari kota Damaskus sejak dikuasai Daulah Umayyah. Baik golongan Yahudi maupun Kristen tetap mempertahankan tradisi keagamaan mereka meskipun mereka telah meninggalkan bahasa sehari-hari yang mereka gunakan sebelum kedatangan Islam, dan menggantinya dengan bahasa Arab.<sup>1</sup>

Kecenderungan masyarakat non Muslim terhadap gelombang Arabisasi itu ternyata berbeda dengan sikap akomodatif golongan Yahudi dan Kristen di wilayah Persia. Di sana mereka justru menampilkan sebuah wajah kultural yang berbeda, hal mana hampir seluruh wilayah Persia menerima Islam sebagai agama baru, mereka tetap mempertahankan penggunaan bahasa pra-Islam, baik dalam komunikasi sehari-hari maupun dalam dunia literatur. Akan tetapi, penggunaan bahasa di wilayah Persia mengalami berbagai perubahan signifikan pada awal periode Islam.<sup>2</sup>

Sejarah juga mencatat bahwa kebudayaan Arab sendiri mengalami berbagai perubahan, adaptasi, dan akomodasi terhadap budaya lain ketika Islam semakin tersebar di wilayah-wilayah kebudayaan non-Arab. Oleh karena itu, masyarakat non-Arab yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa sehari-harinya juga ikut mempengaruhi dialek dan pengucapan

---

<sup>1</sup> Gerald R. Hawting, *The first Dynasty of Islam: The Umayyad Caliphate AD 661-750*. (Southern Illinois: Southern Illinois University Press, 1987), p. 8.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 9

bahasa Arab itu sendiri secara signifikan. Bahasa Arab yang telah dipengaruhi oleh dialek masyarakat non-Arab ini dikenal sebagai *Middle Arabic*, untuk membedakannya dengan *Classical Arabic*, yaitu bahasa Arab yang berasal dari bahasa Alquran dan bahasa yang digunakan dalam penulisan syair Arab pra-Islam. Kemunculan dan karakter *Classical Arabic* sendiri merupakan topik yang masih dalam perdebatan para sejarawan. Faktor-faktor yang mendorong penerimaan (*adoption*) dan penolakan (*rejection*) terhadap bahasa Arab oleh para penduduk non-Arab merupakan hal yang kompleks. Sebab melibatkan faktor-faktor sosio-politis; tidak sekedar persoalan kebahasaan semata.

Di samping hal yang telah dijelaskan di atas, para sejarawan juga mengakui bahwa kajian tentang Arabisasi memiliki banyak kendala, khususnya ditinjau dari sisi sumber sejarah. Misalnya tentang komunitas Yahudi, bahwa diketahui secara umum komunitas Yahudi telah berkomunikasi dengan bahasa Arab pada awal abad ke-7 M. Namun diduga bahwa proses penggunaan bahasa Arab oleh komunitas tersebut berlangsung secara gradual, tidak terjadi dalam waktu sekejap. Hal ini terindikasi dari penemuan naskah paling tua dengan bahasa *Judaeo-Arabic*, yang berasal dari abad ke-9 M., dua abad setelah komunitas Yahudi mulai mengadopsi bahasa Arab sebagai *lingua franca* mereka. Varian bahasa *Judaeo-Arabic* merupakan bagian dari *Middle Arabic* yang digunakan oleh komunitas Yahudi. *Judaeo-Arabic* justru masih menggunakan huruf Ibrani (*Hebrew*) daripada Arab (*Arabic*). Sementara itu, naskah Kristen-Arab tertua—dengan huruf Yunani, bukan Arab—berasal dari abad ke-8 M. Hal yang secara signifikan ditunjukkan oleh penduduk non-Arab di Persia. Mayoritas penduduk Iran tetap menggunakan bahasa Persia pada masa kekuasaan Daulah Umayyah. Meskipun demikian, hampir

seluruh sumber sejarah tentang Persia pada masa kekuasaan Daulah Umayyah ditulis dalam bahasa Arab.

Bukti yang lebih konkret diperoleh dengan ditemukannya sebuah dokumen administratif berbahan papirus dari Mesir. Meskipun dokumen administratif tersebut terbatas pada beberapa persoalan saja. Namun dari dokumen tersebut dapat diperoleh fakta tentang proses yang terjadi secara gradual dari penggunaan bahasa Yunani menjadi bahasa Arab sebagai bahasa administratif. Sejak abad ketujuh hingga beberapa abad selanjutnya, administrasi pemerintahan telah menggunakan bahasa Arab daripada bahasa-bahasa yang digunakan sebelum proses penaklukan oleh umat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa ada suatu saat ketika komunitas non-Arab memiliki peran signifikan di tengah dominasi bangsa Arab, setidaknya dalam konteks aktifitas-aktifitas administratif. Peran demikian didorong oleh ketergantungan yang relatif tinggi terhadap komunitas non-Arab, khususnya dalam dunia birokrasi pemeritahan Daulah Umayyah. Pergantian penggunaan bahasa dalam birokrasi pemerintahan Daulah Umayyah tentu saja tidak berlangsung dalam waktu singkat. Sumber-sumber sejarah yang ditemukan bahkan berbeda pendapat tentang proses awal pergantian tersebut. Akan tetapi dapat ditarik kesimpulan bahwa proses Arabisasi tetap berlangsung pada masa Daulah Umayyah.

Adopsi budaya Arab dilakukan secara optimal oleh bangsa Syiria, Irak, dan Mesir. Sementara itu, meskipun bangsa Berber dan Persia sama-sama memeluk Islam dan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa sakral agama mereka, kedua bangsa tersebut tetap mempertahankan bahasa asli mereka dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah kelangkaan dan ketidakjelasan sumber sejarah tentang proses Arabisasi ini, tetap dapat diambil asumsi historis bahwa gelombang Arabisasi bersama-sama dengan proses

Islamisasi merupakan proses budaya *mainstream* sepanjang kekuasaan Daulah Umayyah.<sup>3</sup>

Dengan demikian, meskipun Daulah Umayyah terkenal dengan kebijakan politik Arabisasi, heterogenitas sosial dan kultural telah terwujud di bawah kekuasaan Daulah ini. Bangsa Muslim-Arab mulai melakukan kontak budaya dengan berbagai peradaban dunia yang lebih tua, misalnya Persia, Mesir, bahkan Eropa di semenanjung Iberia. Kondisi ini mendorong adanya saling-pinjam dan saling pengaruh-mempengaruhi antar entitas budaya tersebut. Akulturasi tersebut tentu tidak terlepas dari peran para khalifah Daulah Umayyah yang juga mendorong terjadinya proses akulturasi budaya tersebut. Aspek-aspek budaya yang paling menonjol dalam merepresentasikan bentuk-bentuk kreatif sebagai hasil dari silang-budaya tersebut di antaranya dalam aspek ilmu pengetahuan dan seni bangunan-arsitektural.

## **B. Struktur Masyarakat Multikultural Daulah Umayyah Timur**

Struktur masyarakat di Damaskus terdiri dari empat komponen utama, yaitu bangsa Muslim-Arab, bangsa-bangsa Muslim non-Arab, bangsa-bangsa non-Arab, dan budak. *Bangsa Muslim-Arab* menempati kelas tertinggi dalam stratifikasi sosial di Damaskus. Mereka adalah para elit penguasa Daulah Umayyah, baik dari keluarga kerajaan maupun kelompok aristokrat Arab. Pengeluaran negara untuk membiayai golongan teratas ini cukup tinggi. Ketika Khalifah al-Walid I berkuasa, anggaran pemerintah untuk subsidi atas golongan ini yang berada di Damaskus mencapai 45.000.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

Berbeda halnya ketika Marwan I menjadi khalifah, kota Hims beserta distriknya menganggarkan dana sebesar 20.000 untuk biaya pensiun pada pejabat kekhalifahan. Meskipun menempati strata tertinggi dalam pelapisan sosial di kota Damaskus, bukan berarti golongan Muslim-Arab ini adalah golongan mayoritas.<sup>4</sup> Damaskus sebagai ibu kota kekhalifahan Daulah Umayyah Timur, telah bertransformasi menjadi sebuah kota dengan ciri khas Islam, padahal sebelumnya penduduk Damaskus, bahkan hingga ke kota-kota kecil, pedesaan, dan daerah pegunungan, secara umum adalah penganut agama Kristen.

Penduduk yang masih menganut agama Kristen tetap mempertahankan identitas kultural dan agama mereka di tengah kekuasaan Daulah Umayyah. Di wilayah selatan Damaskus, khususnya wilayah Libanon, para penduduknya tetap memeluk agama Kristen dan menggunakan bahasa Suriah sebagai bahasa sehari-hari mereka, beberapa abad setelah Daulah Umayyah berkuasa. Hal ini mengindikasikan bahwa proyek Arabisasi yang dilakukan Daulah Umayyah tampak tidak menyentuh akar-rumput (*grass-roots*) penduduk Damaskus dan sekitarnya, sehingga tingkat keragaman kultural tetap memiliki eksistensi pada masa Daulah Umayyah di Timur. Dalam catatan Philip K. Hitti, selama kekuasaan Daulah Umayyah, konflik fisik di Damaskus tidak pernah terjadi, tetapi persaingan antar agama, ras, sosial, dan terutama bahasa mewarnai dinamika sosial di Damaskus.<sup>5</sup>

*Kelas sosial kedua* dalam stratifikasi masyarakat di kota Damaskus adalah golongan *muallaf*, orang yang baru memeluk

---

<sup>4</sup> Philip K. Hitti, *The History of The Arabs*, terj., (Bandung: Serambi, 2008), hlm. 74.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 75.

agama Islam. Dengan demikian, mereka diakui secara penuh sebagai warga negara Muslim. Mengenai kelas sosial ini, banyak diduga bahwa fanatisme kesukuan bangsa Arab seringkali merintang proses perwujudan kesetaraan setiap warga negara. Meskipun demikian, dalam hal pemilikan tanah, baik warga Muslim maupun non-Muslim memiliki kewajiban yang sama untuk membayar pajak. Kelas sosial ini dinamai *mawali* sehingga menempati strata sosial terendah di internal komunitas umat Islam. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong afiliasi mereka pada beberapa kelompok pemberontak kekhalifahan, khususnya pemberontak Syiah di Irak atau kelompok Khawarij di Persia. Kedua kelompok tersebut sejak awal telah menjadi pihak oposisi terhadap Daulah Umayyah.<sup>6</sup>

Keterlibatan mereka dalam kelompok-kelompok oposisi tersebut merupakan bentuk ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan Daulah Umayyah. Akan tetapi, dari sisi ketaatan keagamaan, golongan *mawali* memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan kalangan Muslim-Arab, khususnya para elit politik Daulah Umayyah. Ketaatan keagamaan (baca: militansi) para *mawali* ini mendorong mereka untuk berada di garda terdepan dalam memerangi golongan non-Muslim. Oleh karena itu dicatat bahwa kelompok Muslim paling tidak toleran pada masa kekuasaan Daulah Umayyah adalah para *muallaf* yang sebelumnya beragama Yahudi dan Kristen.

Dalam konteks pengembangan kebudayaan dan seni, para *mawali* ini juga menjadi salah satu aktor penting. Hal ini didorong oleh kesadaran historis mereka sebagai pewaris kebudayaan yang lebih tua dari kebudayaan Islam-Arab itu sendiri. Di sisi

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

lain, hal ini juga sebagai simbol kompensasi atas posisi kurang menguntungkan yang mereka peroleh dalam struktur sosial di Damaskus. Tidak menjadi elit dalam bidang politik, maka mereka berusaha melakukan mobilisasi vertikal untuk menjadi elit di bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan seni.

Para *mawali* mulai bersaing dalam dunia politik dengan golongan muslim-Arab setelah mereka mampu mengungguli golongan muslim-Arab tersebut di bidang-bidang non-politik, seperti, seni dan ilmu pengetahuan.<sup>7</sup> Keterlibatan mereka dalam dunia politik yang telah lama didominasi oleh golongan muslim-Arab itu ditunjang oleh perkawinan mereka dengan perempuan-perempuan yang berasal dari golongan muslim-Arab sendiri. Tingkat perkawinan campur antara golongan Arab dengan golongan non-Arab ini cukup tinggi sehingga berdampak pada berkurangnya keaslian darah suku Arab itu sendiri.

*Kelas ketiga* dalam stratifikasi sosial di Damaskus adalah kelompok non muslim, baik yang beragama Yahudi, Kristen, Saba`, maupun sekte-sekte kepercayaan lainnya. Mereka telah mengikat perjanjian damai dengan Daulah Umayyah sehingga dinamai *Ahlu Dzimmah*. Atas perjanjian tersebut, mereka berkewajiban membayar pajak kepada pemerintah Daulah Umayyah. Pihak pemerintah Daulah Umayyah, atas pajak yang mereka bayar, berkewajiban memberikan perlindungan kepada mereka sebagai warga negaranya. Pembayaran pajak ini berkaitan dengan pajak tanah dan pajak perorangan. Dalam konteks proses hukum, baik komunitas Yahudi, Kristen, maupun Saba` tetap berada di bawah yurisdiksi pemimpin agama mereka masing-masing secara otonom. Akan tetapi jika persoalan hukum tersebut melibatkan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 76.



warga muslim, maka hukum Islam tetap dijalankan terhadap warga muslim tersebut.

Awalnya, golongan *Ahlu Dzimmah* itu terbatas hanya mencakup golongan Yahudi dan Kristen (Nasrani), tetapi pada proses selanjutnya, cakupan *Ahlu Dzimmah* ini diperluas hingga mencakup golongan penyembah api (Majusi atau Zoroaster), penyembah berhala di wilayah Harran, dan suku Berber yang juga penyembah berhala. Kelompok-kelompok ini memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menjalankan keyakinan dan kepercayaan agama mereka masing-masing sebagai sesama warga negara dalam kekuasaan Daulah Umayyah. Baik terhadap para penganut kepercayaan Zoroaster di Persia maupun Berber di Afrika, pihak Daulah Umayyah memberikan tiga opsi, yaitu (1) masuk Islam, (2) diperangi, (3) atau membayar pajak dan tetap memeluk agama mereka. Khusus di daerah Libanon, suatu wilayah yang pada masa Daulah Umayyah tidak dapat ditaklukan, golongan Kristen justru berada dalam kelas paling tinggi. Mereka bahkan mampu memberikan perlawanan terhadap Daulah Umayyah, khususnya pada masa Khalifah Abdul Malik berkuasa.<sup>8</sup>

Meskipun berada dalam kelas cukup rendah dalam stratifikasi sosial Daulah Umayyah Timur, komunitas Kristen memiliki posisi dan fungsi yang cukup penting dalam struktur sosial Daulah Umayyah. Beberapa anggota komunitas Kristen ada yang menjadi penyair, dokter, sekretaris keuangan Muawiyah bin Abi Sufyan, bahkan istri Muawiyah pun ada yang beragama Kristen. Namun saat Khalifah Al Walid I berkuasa, ia sempat menghukum mati seorang kepala suku Arab-Kristen dari Bani Taghlib karena menolak masuk Islam.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

Kelas terendah adalah para budak yang hidup dalam lingkungan pusat kekuasaan Daulah Umayyah di Damaskus. Tradisi perbudakan telah berlangsung sangat lama, jauh sebelum Islam lahir, sebagai salah satu tradisi rumpun bangsa Semit kuno. Akan tetapi, meskipun Islam tidak melestarikannya, kondisi perbudakan pada masa Daulah Umayyah jauh lebih baik daripada periode sebelum Islam datang. Budak-budak ini berasal dari wilayah Afrika Timur dan Afrika bagian Tengah yang berkulit hitam, Fargana atau Turkistan Cina yang berkulit kuning, Eropa bagian timur dan selatan yang berkulit putih.

Perdagangan budak menjadi bisnis yang berkembang pesat pada masa Daulah Umayyah. Para budak ini biasanya bekerja di sektor-sektor pekerjaan kasar, seperti pembantu rumah tangga dan pekerjaan lainnya. Mereka tetap memiliki peluang untuk melakukan mobilisasi sosial. Misalnya ketika majikannya memerdekakan dirinya, maka ia akan menjadi rekan kerja majikannya. Bahkan jika majikannya meninggal dan tidak memiliki ahli waris, maka harta kekayaan majikannya akan menjadi hak budak tersebut.

### **C. Struktur Masyarakat Multikultural Daulah Umayyah Barat**

Komposisi penduduk Andalusia saat Daulah Umayyah berkuasa sangat beragam. Kelompok penduduk utama yang berdiam diri di Andalusia adalah komunitas Muslim-Arab dan suku Berber. Keduanya merupakan aktor penting dalam proses pembebasan Andalusia untuk menjadi pusat kekuasaan Daulah Umayyah di Barat. Kelompok penduduk lainnya adalah komunitas Kristen sebagai penduduk asli Andalusia. Sebagian anggota komunitas ini ada yang kemudian memeluk Islam

setelah pembebasan Andalusia dari penindasan bangsa Gothia Barat. Komunitas Muslim-Arab yang menetap di Andalusia pasca pembebasan berasal dari wilayah selatan Arab (Suku Yamani) dan wilayah utara Arab (Suku Mudhari). Mayoritas Suku Mudhari mendiami kota Toledo, Saragosa, Sevilla, Valencia, dan lain-lain. Sementara itu, Suku Yamani kebanyakan menetap di Granada, Cordoba, Sevilla, Murcia, dan Badajoz.<sup>9</sup>

Adapun bangsa Berber memperoleh daerah pemukiman di wilayah perbukitan yang kering tandus di bagian utara Andalusia. Bangsa Arab tetap tidak memberikan tempat tinggal yang layak bagi mereka meskipun bangsa Berber ini memiliki peran yang cukup penting dalam proses pembebasan Andalusia. Kondisi tempat tinggal di perbukitan sangat tidak menguntungkan bagi bangsa Berber. Sebab daerah itu berbatasan langsung dengan komunitas Kristen yang masih melakukan perlawanan terhadap Daulah Umayyah II. Meskipun golongan Kristen mampu dikalahkan, tetapi sisa-sisa komunitas Kristen ini tetap bergerilya untuk melakukan perlawanan.

Sementara bangsa Berber harus hidup dalam ancaman serangan musuh di perbukitan, komunitas bangsa Arab justru mendapatkan wilayah-wilayah lembah yang terlindung dari ancaman serangan musuh. Merasa didiskriminasi dengan kondisinya yang tidak menguntungkan, bangsa Berber di Andalusia lalu memusuhi bangsa Arab-Muslim yang dianggap telah mengkhianati jasa mereka. Mereka memusuhi bangsa Arab di Andalusia sebagaimana mereka memusuhi bangsa Arab dan Romawi di Afrika Utara, khususnya daerah Maroko. Kondisi ini mengakibatkan perpecahan internal di dalam tubuh umat Islam.

---

<sup>9</sup> Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 581.

Pada proses perjalanan sejarah Daulah Umayyah di Andalusia, bangsa Berber ini tidak lebih dari sekedar alat dari berbagai kepentingan politik untuk suksesi kekuasaan mereka.

Kelompok penduduk lainnya di Andalusia pada masa kekuasaan Daulah Umayyah adalah komunitas Kristen dan Yahudi. Komunitas Kristen di Andalusia ini dapat diidentifikasi ke dalam dua kelompok besar, berdasarkan karakteristik kebudayaannya, yaitu (1) komunitas Kristen yang tetap menjalankan kepercayaan dan tradisi lama mereka, dan (2) komunitas Kristen yang meskipun tetap berkeyakinan Kristiani, tetapi menampakkan imitasi kebudayaan terhadap tradisi Arab, khususnya bahasa Arab, misalnya dalam berbicara sehari-hari, menulis, dan adat istiadat Arab lainnya. Kelompok ini dikenal dengan sebutan *Musta'ribah*.

Menurut Robert Hillerbrand, baik komunitas Muslim-Arab, Kristen, maupun Yahudi memerankan peranan penting dalam perkembangan kebudayaan di kota Cordoba. Kolaborasi budaya antara Islam, Kristen, dan Yahudi merupakan salah satu identitas kebudayaan di Andalusia, khususnya kota Cordoba pada masa Daulah Umayyah. Khalifah Abdurrahman I bahkan menggunakan sebagian gereja Santo Vinsensius sebagai tempat ibadah umat Islam sedangkan bagian gereja lainnya dipergunakan oleh komunitas Kristen. Hal tersebut merupakan simbol kerukunan antar umat beragama di Andalusia. Komunitas Kristen tetap diperbolehkan menggunakan gereja-gereja mereka dan para pemuka agama Kristen tetap diizinkan untuk menggunakan pakaian keagamaan mereka.<sup>10</sup>

Menurut Kees De Jong, kebudayaan Yahudi juga berkembang pesat di kota Cordoba. Salah satu tokoh Yahudi yang memiliki peran penting dalam pemerintahan Daulah Umayyah adalah Hasday bin

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 584.

Shaprut. Ia adalah dokter istana ketika Abdurrahman III dan al-Hakam II berkuasa, karena keahliannya menyembuhkan berbagai penyakit. Selain sebagai dokter, Hasday bin Shaprut juga seorang cendekiawan. Ia pernah memimpin penerjemahan ke dalam bahasa Arab sebuah manuskrip berbahasa Yunani. Ia bahkan yang memulai pencairan manuskrip itu hingga ke kerajaan Bizantium. Setelah diterjemahkan, isi manuskrip itu sangat bermanfaat bagi penduduk Cordoba.<sup>11</sup> Para penyair, ahli filsafat, dan cendekiawan berdatangan ke kota Cordoba dan ikut memperkaya peradaban di Cordoba.

Ada satu konsep terkenal terkait dengan kehidupan yang beragam di Andalusia. Konsep tersebut adalah “Convivencia”, Ihsan Ali-Fauzi mengistilahkannya dengan “co-eksistensi”<sup>12</sup>, yaitu kondisi sosial yang terdiri dari berbagai kelompok komunitas yang disatukan dalam satu kesatuan politik, dalam konteks ini Daulah Umayyah. Konsep atau istilah tersebut dipopulerkan oleh seorang filolog sekaligus sejarawan keturunan Spanyol, Americo Castro. Istilah “Convivencia” digunakan untuk mendeskripsikan situasi sosio-kultural di Andalusia sejak abad kedelapan hingga kelimabelas Masehi, yaitu ketika Daulah Umayyah berkuasa. Dalam rentang waktu berabad-abad tersebut, berbagai unsur budaya dan agama yang berbeda, khususnya Islam, Kristen, dan Yahudi hidup bersama dan berinteraksi satu sama lain, melakukan interpenetrasi satu sama lain, sekaligus saling pengaruh-mempengaruhi secara kreatif terhadap kebudayaan masing-masing.

---

<sup>11</sup> Kees De Jong, “Al Andalus di Bawah Kekuasaan Daulah Umayyah di Cordoba (756-1031): Suatu Masyarakat Pluralistik yang Beradab”. *Gema Teologia* (Jurnal Fakultas Theologia Universitas Kristen Duta Wacana). Vol. 34 No. 1 April 2010, hlm. 19

<sup>12</sup> Ihsan Ali-Fauzi, “Convivencia” di Andalusia. *Democracy Project*, (Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, Edisi 039 Desember 2011), hlm. 12.

Bagi Castro, sebagaimana dijelaskan Ihsan Ali-Fauzi, pergumulan kebudayaan antara Islam, Kristen, dan Yahudi berlangsung dengan kesadaran-diri pada masing-masing komunitas tersebut. “Convivencia” merupakan bentuk kehidupan bersama dalam kesejajaran, kolektifitas, dan kesadaran diri atas identitas kultural mereka masing-masing. Dalam co-eksistensi tersebut, setiap komunitas saling meminjam unsur-unsur budaya secara kreatif tanpa kehilangan identitas kulturalnya sendiri. Meskipun interpretasi historis yang dinilai terlalu idealistik tersebut banyak dikritik karena mengesampingkan dinamika sosial bahkan konflik yang seringkali mewarnai dinamika hubungan antar ketiga komunitas utama di Andalusia tersebut, tetapi usahanya untuk menjadikan Andalusia sebagai *banchmarking* sebuah kehidupan sosial yang pluralistik, kosmopolit, dan egaliter tetap merupakan langkah yang berharga.<sup>13</sup>

#### **D. Pola Kebijakan Politik Multikultural**

Dalam catatan sejarah, konflik antar agama dalam kehidupan sosial di Damaskus relatif tidak ditemukan. Konflik sosial yang ada hanya terjadi di antara beberapa suku. Dua suku yang seringkali terlibat dalam konflik adalah suku Himyariyah dan Mudariyah. Kerukunan antar umat beragama ini didorong oleh kebijakan pemerintah Daulah Umayyah yang memiliki perhatian berimbang dan adil terhadap penganut agama lainnya. Para khalifah Daulah Umayyah memberilakan perlindungan secara proporsional terhadap tempat-tempat suci agama-agama di Damaskus, seperti gereja, katedral, sinagoge, dan tempat suci lainnya. Pihak penguasa Daulah Umayyah bahkan pernah mengambil kebijakan perbaikan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

bangunan gereja Kristen di wilayah Edessa yang rusak karena bencana gempa bumi. Biaya rehabilitasi bangunan itu diambil dari dana yang dihimpun dari umat Islam.<sup>14</sup>

Terkait dengan eksistensi perempuan pada masa Daulah Umayyah di Damaskus, maka hal tersebut memiliki relevansi tersendiri dengan nilai-nilai *kesejajaran* dalam konsep multikulturalisme. Secara umum, perempuan di Damaskus memang ditempatkan secara terpisah dengan laki-laki di ruang publik. Namun hal tersebut tidak berarti mendorong terjadinya diskriminasi dan penindasan. Bahkan perempuan-perempuan di Damaskus memiliki kesempatan dan akses yang sama dengan laki-laki, khususnya dalam pengembangan keilmuan dan pendidikan. Pihak Daulah Umayyah memberikan kebebasan kepada perempuan untuk mengembangkan minat dan hasrat mereka yang tinggi terhadap aktifitas di bidang pendidikan. Sejarah mencatat bahwa ada beberapa ilmuwan populer dari kalangan perempuan di Damaskus pada masa Daulah Umayyah, seperti Putri Husain dan Sakhina.<sup>15</sup> Hal ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah Daulah Umayyah yang cenderung egaliter dan tidak diskriminatif, khususnya terkait dengan keberadaan dan peran perempuan di sektor publik.

Umar bin Abdul Aziz tidak hanya terkenal dengan ketaatan agamanya. Tetapi juga kebijakan-kebijakannya terhadap kelompok minoritas yang lebih toleran dan egaliter. Kondisi lebih baik para non-Muslim ini dialami ketika Umar bin Abdul Aziz berkuasa. Ia mengambil kebijakan untuk mengurangi beban pajak terhadap golongan *Ahlu Dzimmah* ini. Umar bin Abdul Aziz (Umar II) adalah

---

<sup>14</sup> De Jong, "Al Andalus", hlm. 21

<sup>15</sup> *Ibid.*

satu-satunya khalifah Daulah Umayyah yang memberikan berbagai pembebasan atas diskriminasi terhadap golongan Kristen. Beberapa dokumen tentang kebijakan Umar II ini mengindikasikan adanya hubungan yang lebih intim antara umat Islam dengan komunitas Kristen pada masanya dibandingkan masa-masa sebelumnya.<sup>16</sup>

Beberapa kebijakan khalifah sebelum Umar II yang memberatkan golongan *Ahlu Dzimmah* di antaranya golongan Kristen dilarang untuk menduduki berbagai jabatan publik, mengenakan surban, menggunakan pelana kuda kecuali pelana berkantong, mendirikan tempat ibadah, dan mengeraskan suara ketika umat Islam salat. Golongan Kristen juga diharuskan memotong rambut dengan model rambut poni. Di samping itu, sebelum Umar II berkuasa, seorang muslim yang membunuh orang Kristen hanya dijatuhi hukuman denda. Kesaksian seorang Kristen yang memberatkan orang Islam tidak akan diterima dalam sidang peradilan. Aturan-aturan diskriminatif ini juga berlaku terhadap komunitas Yahudi. Kedua kelompok ini tidak diperbolehkan untuk menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan.

Akan tetapi pada perkembangan selanjutnya kondisi-kondisi tersebut berubah seiring pergantian khalifah Daulah Umayyah. Misalnya ketika Hisyam berkuasa, gubernur Irak, Khalid bin Abdullah membangun sebuah gereja di Kufah. Selain itu, ia juga memberikan kebebasan baik kepada komunitas Yahudi maupun Kristen untuk mendirikan tempat ibadah mereka masing-masing. Hisyam bahkan pernah menganggotakan seorang penganut kepercayaan Zoroaster sebagai pejabat pemerintahan.

Pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia juga mengeluarkan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 48.



kebijakan yang mendorong terjadinya proses imitasi dan akulturasi budaya antara entitas sosial yang ada di Andalusia. Daulah Umayyah di Andalusia terkenal dengan kebijakan-kebijakannya yang sangat menghormati pemeluk agama non-Islam, khususnya Kristen dan Yahudi. Baik komunitas Kristen, Yahudi, maupun Muslim-Arab dapat berinteraksi secara bebas dan setara dalam aturan sosial yang berlaku. Khusus terhadap komunitas Kristen dan Yahudi, pemerintah Daulah Umayyah bahkan menempatkan keduanya ke dalam jabatan pejabat sipil maupun militer.

Terhadap komunitas Kristen, pemerintah Daulah Umayyah memilihkan seorang pemimpin komunitas (*Count*) yang berasal dari anggota komunitas mereka sendiri. Komunitas Kristen juga memiliki perwakilan untuk menyampaikan aspirasi mereka di istana kekhalifahan Daulah Umayyah. Pihak Daulah Umayyah juga menunjuk orang tertentu sebagai pemungut pajak terhadap komunitas Kristen ini.<sup>17</sup>

Sama halnya dengan komunitas Kristen, komunitas Yahudi juga memiliki otonomi administrasi tersendiri. Komunitas Yahudi bahkan memiliki sebuah wilayah otonom sendiri, berjarak sekitar 40 mil dari kota Cordoba. Wilayah tersebut memiliki hak istimewa untuk tidak dimasuki oleh warga muslim Andalusia. Hal ini mengindikasikan bahwa di bawah kekuasaan Islam, warga Yahudi tetap memiliki *bargaining position* tersendiri. Hal lain yang perlu dicatat adalah sosok Ibnu Syibruth yang berasal dari komunitas Yahudi dan memperoleh jabatan untuk menyambut para duta dari berbagai negara yang datang ke Cordoba. Ibnu Syibruth tercatat menjadi penyambut duta dari Kaisar Konstantine II dari Bizantium dan utusan Raja Otto dari Kekaisaran Jerman. Ibnu

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

Syibruth juga pernah ditugaskan pemerintah Dualah Umayyah untuk melaksanakan tugas diplomasi dengan Raja Navarre.

Komunitas lainnya yang menempati wilayah Andalusia pada masa kekuasaan Daulah Umayyah adalah bangsa Slavia. Eksistensi bangsa Slavia di Andalusia tidak lepas dari peran Abdurrahman An Nashir yang mendatangkan mereka untuk mengimbangi kecenderungan Arabisme di Andalusia. Bagi An-Nashir, jika dibiarkan saja, kecenderungan Arabisme ini justru akan menimbulkan perpecahan dan pergolakan sosial-politik di Andalusia. Sebab keistimewaan-keistimewaan yang didapatkan oleh komunitas Arab tentu akan menimbulkan kecemburuan sosial dari komunitas lainnya. Hal ini terbukti dari kasus bangsa Berber. Oleh karena itu, An-Nashir merekrut bangsa Slavia untuk dididik menjadi anggota militer dan menjadi pengawal dirinya.

## **E. Dinamika Kebudayaan Komunitas Muslim**

Kekhalifahan Daulah Umayyah di Andalusia memiliki perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan hidup penduduk Andalusia, tanpa terkecuali. Mereka berkomitmen tinggi untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban di Andalusia, baik yang bersifat fisik-material maupun mental-spiritual. Untuk itu, Daulah Umayyah II membuka pintu seluas-luasnya kepada setiap komunitas di Andalusia, baik Muslim-Arab, Kristen, maupun Yahudi, untuk berpartisipasi secara aktif dalam konstruksi kebudayaan dan peradaban di Andalusia.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> James C. Conroy. "Do the Andalusian Caliphates offer a good model for Intercultural Citizenship?". (Makalah pada *Inaugural Conference of the Jubilee Centre for Character and Values* di Universitas Birmingham 2012), hlm. 6.

Dengan demikian, Daulah Umayyah mampu membawa kota Cordoba menjadi salah satu pusat kebudayaan dunia saat itu, di samping kota Baghdad dan Konstantinopel.<sup>19</sup> Hal ini didorong oleh prinsip kebijakan politik pemerintah Daulah Umayyah terkait dengan pola pengembangan kebudayaan yang mengedepankan egalitarianisme dan multikulturalisme antar berbagai komunitas warga di Andalusia. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Umayyah II telah mengimplementasikan kebijakan politik berbasis multikulturalisme. Artinya, setiap komunitas dalam struktur masyarakat di bawah kekuasaan Umayyah II diberikan kesempatan yang sama untuk mengaktualisasikan potensi-potensi mereka sehingga mampu memproduksi simbol-simbol kebudayaan dan peradaban Islam, dan pada gilirannya telah memperkokoh bangunan sosial sehingga berdampak positif pada kemajuan negara, khususnya dalam bidang kebudayaan dan peradaban di Andalusia.

Benjamin Gampel, seorang sejarawan berkebangsaan Yahudi, menyebutkan terdapat sisi menarik terkait kehidupan multikulturalis di Andalusia pada masa kekuasaan Daulah Umayyah II, khususnya dilihat dari sudut kepentingan komunitas Yahudi Sephardik. Meskipun dalam konteks pergumulan berbagai komunitas di Andalusia umat Yahudi merupakan komunitas yang paling lemah. Baik sejarawan Bernard Lewis maupun sejarawan lainnya, menyatakan bahwa sejarah semenanjung Iberia di bawah kekuasaan Daulah Umayyah II merupakan masa keemasan (*the golden age*) bagi umat Yahudi.<sup>20</sup>

Kondisi kehidupan sosial-budaya yang multikulturalis itu justru berawal dari ekspedisi militer, saat pasukan Islam yang dipimpin

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Ali-Fauzi, "Convivencia"....., hlm. 7-8.

Thariq Bin Ziyad berhasil membebaskan warga semenanjung Iberia dari penindasan Raja Gotia. Penguasa Muslim di semenanjung Iberia tersebut kemudian mengkategorikan umat Kristen dan Yahudi sebagai *Ahl Dzimmah*, warga negara yang dilindungi. Meskipun demikian, komunitas Yahudi dan Kristen yang seakan dikelasduakan dalam stratifikasi sosial di Andalusia tersebut mereka tetap mendapatkan proteksi dari pihak pemerintah Daulah Umayyah II, khususnya dalam bidang keamanan dan pemenuhan kebutuhan hidup. Kebijakan ini mengindikasikan adanya pertimbangan-pertimbangan yang memperhatikan keragaman dan kesejajaran sosial dalam pengambilan kebijakan politik Daulah Umayyah II di Andalusia.

Pola kebijakan politik yang lebih inklusif dan multikulturalis terjadi ketika Abdurahman III menjadi khalifah, pada abad ke-10 M. Dia juga menjadi khalifah yang pertama kali menyatakan otonomi pemerintahan Islam di Andalusia, dengan ibu kota pemerintahan berada di kota Cordoba, dari pemerintahan Daulah Abbasiyyah di Baghdad. Secara eksternal, kebijakan yang mengedepankan inkulisivisme dan multikulturalisme ini diambil sebagai langkah mengatasi konflik-konflik sosial yang terjadi pada masa khalifah-khalifah sebelum Abdurrahman III. Dia dikenal sebagai khalifah yang memiliki perhatian besar terhadap pengembangan seni dan ilmu pengetahuan. Ia bahkan mendorong komunitas-komunitas minoritas, khususnya Yahudi dan Kristen, agar bersama-sama dengan komunitas Muslim membangun peradaban Islam di Andalusia dengan mengembangkan berbagai potensi intelektual dan kultural mereka, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan seni.<sup>21</sup>

Umat Kristen sendiri awalnya cenderung merespon secara

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

negatif kebijakan pengkelasduaan dalam kategori *Ahl Dzimmah* tersebut di atas. Hal ini bisa dipahami karena sebelumnya, umat Kristen justru menjadi komunitas kelas teratas dan mendominasi, bahkan menindas khususnya terhadap umat Yahudi. Akan tetapi sejak khalifah Umayyah II menerapkan kebijakan yang mengedepankan inklusivisme dan multikulturalisme, umat Kristen akhirnya menerima posisi sosial mereka yang baru. Kebijakan-kebijakan yang mengedepankan inklusivisme dan multikulturalisme ini juga mampu meredam berbagai gejolak pemberontakan dari umat Kristen. Berbeda dengan sikap awal umat Kristen, umat Yahudi justru sejak awal menyikapi secara positif kedatangan umat Islam di semenanjung Iberia tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa sejak abad ke-6 M., umat Yahudi di Andalusia mendapatkan perlakuan diskriminatif dan kebijakan yang menindas dari Raja Gotia Barat yang beragama Kristen. Dengan demikian, kedatangan umat Islam dianggap umat Yahudi sebagai babak baru untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.<sup>22</sup>

Kebijakan lain yang cukup beralasan mendasari perhatian besar Daulah Umayyah di Andalusia, khususnya masa khalifah Abdurrahman III, terhadap inklusivisme, multikulturalisme, dan situasi *co-eksistensi* adalah inisiatifnya untuk merekrut pejabat pemerintah dari setiap anggota komunitas yang ada di Andalusia. Anggota komunitas yang terpilih menjadi pejabat tinggi di pemerintahan Daulah Umayyah II dijadikan sebagai wakil dari komunitas mereka sendiri. Kebijakan ini tampak telah mengesampingkan faktor-faktor teologis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Para pejabat pemerintahan tersebut dipilih atas dasar kontribusi mereka terhadap negara, bukan posisi

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

mereka di komunitas mereka masing-masing atau penguasaan mereka terhadap kitab suci., misalnya, sebagai alasan teologis-keagamaan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> De Jong, "Al Andalus.....", hlm. 66-67.

# BAB V

## KEHIDUPAN MULTIKULTURAL PADA MASA ABBASIYAH

### A. Multikulturalisme dalam Sistem Kekhalifahan

Kemunculan Daulah Abbasiyah terjadi melalui revolusi sosial yang dipelopori para keturunan Abbas dan didukung oleh beragam golongan yang berposisi terhadap Daulah Umayyah seperti kaum Syi'ah, Khawarij, Qadariyah, Mawali (non Arab) dan suku Arab bagian selatan.<sup>1</sup> Abbas sendiri adalah salah seorang paman Nabi Muhammad. Adapun khalifah pertama dinasti Abbasiyah bernama Abu al-Abbas (750-754) atau nama lengkapnya Abu al-Abbas ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn Al-Abbas ibn Abdul Muthalib ibn Hasyim. Cukup jelas bahwa ia memiliki pertalian kekerabatan yang dekat dengan Nabi Muhammad, hal mana Nabi Muhammad sendiri adalah anak dari Abdullah, cucu dari Abdul Muthalib, dan cicit dari Hasyim. Khalifah pertama Bani Abbasiyah tersebut bergelar *al-Shaffah* (Sang Penumpah Darah), yang disebutkannya sendiri sewaktu khutbah penobatannya sebagai khalifah. Konon julukan ini dipahami sebagai pertanda buruk bahwa dinasti Abbasiyah lebih mengutamakan kekuatan dalam menjalankan kebijakannya.<sup>2</sup> Seperti dituliskan dalam catatan Hitti, bahwa untuk pertama kalinya di sisi

---

<sup>1</sup> Lathiful Khuluq, "Perkembangan Peradaban Islam Masa Daulah Abbasiyah," dalam Siti Maryam, dkk., *Sejarah Peradaban Islam*, hlm. 97.

<sup>2</sup> Hitti, *History of the Arab*, hlm. 358.

singgasana raja terdapat sebuah karpet yang digunakan untuk mengeksekusi.<sup>3</sup>

Keberhasilan Bani Abbasiyah melakukan perlawanan revolusi terhadap Bani Umayyah dilanjutkan dengan memindahkan ibukota pemerintah dari Damaskus ke Baghdad. Selama berkuasa orang-orang Abbasiyah menyatakan diri mereka sebagai pengusung konsep sejati kekhalifahan, yaitu gagasan teokrasi, yang menggantikan pemerintahan sekuler (*mulk*) dinasti Umayyah.<sup>4</sup> Hal ini seiring propaganda yang dilakukan demi memuluskan revolusi mereka, yaitu menyatakan diri sebagai pengganti pewaris Nabi Muhammad yang paling berhak bila dibandingkan dengan Bani Umayyah. Alasan sederhana yang mereka kemukakan bahwa Bani Abbas dan Nabi Muhammad berasal dari satu keluarga, yaitu Bani Hasyim atau Bani Abdul Muthalib.<sup>5</sup> Selain itu Bani Abbasiyah juga menyodorkan alasan bahwa para penguasa Bani Umayyah telah menyimpang dari ajaran Islam.

Selanjutnya, selama berkuasa gelar-gelar kekhalifahan mereka seakan menegaskan bahwa mereka ini ditakdirkan menjadi "utusan" Tuhan untuk mengatur dunia ini. Di antara gelar yang mereka gunakan adalah *Ana Khalifatullah fi Ardhihi*, *Ana Sultanullah*

---

<sup>3</sup> *Ibid.* Sejumlah dokumen menyebutkan bahwa untuk menghabisi lawan-lawan politik atau orang-orang yang dicurigai berbahaya bagi keamanan kerajaan, mereka ini akan diundang dalam jamuan makan dan pesta. Saat mereka senang dalam pesta itulah secara sistematis, tamu-tamu "undangan" itu lalu dibunuh. Dan karpet tersebut akan digulung begitu saja, kemudian dikuburkan bersama jasad lawan politik yang sudah tewas terbungkus karpet.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 358.

<sup>5</sup> Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam 3*, hlm. 49-50.



*fi Ardhihi, Ana Zhillullahi fi Ardhihi*.<sup>6</sup> Ini menggambarkan bahwa kekuasaan mereka dalam bidang politik maupun keagamaan mutlak di tangan khalifah. Gelar seperti itu, selain mempunyai sejumlah pembenaran di dalam ajaran Islam, juga dipengaruhi oleh konsep kekuasaan dalam kebudayaan Bizantium dan Persia. Gelar tersebut mengesankan adanya implikasi bahwa seorang khalifah mempunyai kekuatan ilahiah untuk mengatur segala sesuatu pada tempatnya.<sup>7</sup> Bahkan sejak zaman khalifah al-Mansur para khalifah Abbasiyah tidak membutuhkan pengakuan rakyat, dengan kata lain rakyat yang butuh khalifah.<sup>8</sup> Selain itu pola-pola pengelolaan persoalan sosial, kebijakan politik, ekonomi, dan militer (keamanan) pada masa Bani Abbasiyah awal cenderung melanjutkan pola-pola yang pernah dilakukan oleh penguasa sebelumnya, Bani Umayyah.

Dengan demikian, Daulah Abbasiyah memungut dan memperhalus praktek Umayyah dengan meminjam tradisi Persia dalam mengembangkan sistem pemerintahan yang berdasarkan kekuasaan atas anugerah Ilahi. Klaim para khalifah Abbasiyah bahwa mereka berkuasa atas mandat Tuhan dilambangkan oleh perubahan gelaran “Pengganti Rasul Allah” menjadi “Wakil Allah”. Gelaran ini diilhami tradisi Persia, yakni “Bayangan Tuhan di Bumi” (*Dhillu Allah fi al-Ardhi*). Penguatan atas status penguasa yang agung itu didukung oleh istana yang megah dan indah, barisan

---

<sup>6</sup> M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam* (Yogyakarta: Bagaskara, 2012), hlm. 146.

<sup>7</sup> Azyumardi Azra, “Peradaban Islam,” dalam Taufik Abdullah, dkk. (ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam 1: Akar dan Awal* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2002), hlm. 329.

<sup>8</sup> Karim, *Sejarah Pemikiran*, hlm. 147. Lihat juga Ignaz Goldziher, *Pengantar Teologi dan Hukum Islam*, trj. (Jakarta: INIS, 1991), hlm. 42-43

pelayan istana yang besar, dan etika kehidupan istana yang serupa dengan kerajaan atau kekaisaran. Karena itu suasana kehidupan istana di Bagdad sudah jauh berbeda dengan “tata hidup Madinah yang ideal”.<sup>9</sup>

Situasi Irak pada umumnya dan Baghdad pada khususnya telah memiliki tradisi yang realtif mapan. Sedikitnya dua tradisi besar sebelum Islam yaitu tradisi Romawi Timur (Bezantium) dan tradisi Persia telah tumbuh dan berakar kuat dalam kehidupan masyarakat Iraq. Budaya pra-Islam di wilayah yang dikuasai dalam berbagai bidang seperti struktur keluarga dan ideologi patriakhi, tatanan masyarakat pertanian, masyarakat pedagang, ekonomi pasar, dan beberapa ajaran monoteisme,<sup>10</sup> masih menunjukkan keberlanjutan dan keberlangsungannya dalam sistem kebudayaan mereka. Selain pengembangan politik dan ekonomi, wilayah bekas Emperium Romawi Timur tersebut juga berkembang tradisi Kristen Ortodoks. Daerah lain seperti Abesinia dan Gassania beraliran Kristen Monofit, sedangkan wilayah di bekas kerajaan Persia, seperti Syiria dan Irak, berkembang aliran Kristen Nestorian. Kenyataan ini menggambarkan bahwa Islam masa Dinasti Abbasiyah berhadapan dengan situasi keragaman baik secara keagamaan, ideologi, kebudayaan, maupun tradisi hirarkhis sosial di tengah masyarakatnya. Realitas sosial seperti ini tentu saja tidaklah mudah untuk mengelolanya. Oleh karenanya, sebagaimana ucapan Abu al-Abbas saat memberikan khutbah pertama ketika ia dilantik sebagai khalifah tersebut di atas, maka dipandang suatu pendekatan efektif yang digunakan untuk mengelola masyarakatnya adalah dengan teokratik-absolut.

---

<sup>9</sup> Esposito, *Islam dan Politik*, hlm. 24.

<sup>10</sup> Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, I, hlm. 4.

Dibandingkan dengan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah jauh lebih harmonis di dalam membangun hubungan dengan masyarakat non Arab (*mawali*). Seperti telah dibahas terdahulu, Bani Umayyah cenderung bersikap sektarian dalam banyak aspek terkait dengan sikap politik dan kebijakannya pada orang-orang non Arab. Pada masa Bani Umayyah, orang non Arab selain tidak diberi kesempatan dalam kursi pemerintahan mereka juga dikenai membayar pajak dengan jumlah yang lebih tinggi daripada orang Arab. Kenyataan ini berbanding terbalik dengan kebijakan Bani Abbasiyah. Bahkan dari 39 khalifah Bani Abbasiyah yang berkuasa hanya tiga di antaranya yang merupakan keturunan asli Arab, yaitu Abu al-Abbas, al-Mahdi, dan al-Amin. Selebihnya mereka adalah keturunan dari kalangan budak atau dari kalangan *mawali*. Beberapa khalifah seperti: ibu al-Mansur adalah seorang budak Berber; ibu al-Ma'mun adalah seorang budak Persia; ibu al-Watsiq dan al-Muhtadi berasal dari Yunani; sedangkan al-Mutawakkil, al-Muntasir, al-Musta'in, al-Muktafi dan al-Muqtadir, ibu-ibu mereka adalah budak-budak berkebangsaan Romawi dan Turki. Demikian pula ibu Harun al-Rasyid adalah juga budak dari negeri lain, yang dikenal sebagai al-Khayzuran, perempuan pertama yang memiliki pengaruh penting dalam urusan kenegaraan Daulah Abbasiyah.<sup>11</sup>

Proses hubungan pernikahan yang lintas etnis itu memberi gambaran bahwa kekerabatan Abbasiyah berlangsung melalui keragaman budaya yang disatukan dalam payung kekhilafahan Bani Abbasiyah. Dalam hal ini proses pembauran antara orang Arab dan rakyat taklukan diperlancar dengan lembaga poligami,

---

<sup>11</sup> Hitti, *History of the Arab*, hlm. 414, sebagaimana juga dikutip oleh Umar dari Ibn Hazm dalam *Risalah fi Ummahat al-Khulafah*. Baca, Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Jender: Perspektif Alquran* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 117.

selir dan perdagangan budak. Akibatnya ketika unsur Arab murni surut, maka orang non-Arab, orang peranakan, dan anak-anak dari perempuan yang dimerdekakan juga mulai menggantikan posisi mereka. Dampak politisnya bahwa aristokrasi Arab mulai digantikan oleh para pejabat yang berasal dari berbagai bangsa, khususnya yang lebih dominan adalah Persia dan Turki.

Dalam sistem pemerintahan Abbasiyah terdapat pergeseran dari pihak Arab kepada pihak Muslim yang bukan Arab. Khususnya pihak Persia pada periode awal daulah ini menguasai administrasi dan militer, bahkan mereka memainkan peranan terbesar bagi sistem pemerintahan yang lebih luas berdasarkan persamaan. Daulah Abbasiyah menjalankan sistem pemerintahannya bertumpu pada kekuatan militer dengan birokrasi yang bertingkat. Administrasi pusat di Bagdad merupakan struktur tertinggi yang disusun dengan sistem kementerian: perbendaharaan, ketentaraan, intelejen, dan sebagainya, masing-masing dipimpin oleh Wazir yang berfungsi sebagai kabinet Khalifah dan mengawasi para pegawai dan pejabat istana, serta mengawasi setiap provinsi dalam kedaulahan itu.<sup>12</sup> Pada masa ini daulah dibagi kepada sejumlah provinsi, yang masing-masing dipimpin oleh Gubernur (*al-Wali*) merangkap pejabat urusan penerimaan negara (pajak-pajak) beserta tugas-tugas administratif lainnya.

Keterbukaan Abbasiyah dalam hal pemerintahan sangat nyata dalam penempatan personalia di jajaran birokrasi. Banyak juru tulis yang tersebar dalam birokrasi Abbasiyah adalah orang-orang yang berasal dari Khurasan, yaitu mereka yang pada masa Umayyah telah berperan dalam pemerintahan pusat. Kelompok Kristen Nestorian berperan secara kuat, karena mereka merupakan

---

<sup>12</sup> Esposito, *Islam dan Politik*, hlm. 25.

bagian penduduk besar dari penduduk Iraq; sedangkan kelompok minoritas Yahudi berperan dalam kegiatan perpajakan dan perbankan. Demikian pula keluarga-keluarga Syi'ah sangat berpengaruh. Adapun kelompok Arab sendiri banyak mengambil bagian dalam kedudukannya di bidang militer, peradilan dan kehidupan hukum Bagdad dan kota-kota besar lainnya, meskipun semua itu lebih tergantung kepada loyalitas mereka kepada khalifah.<sup>13</sup>

Di dalam melangsungkan administrasi dan organisasi pemerintahan, Abbasiyah sesungguhnya mewarisi berbagai tradisi, praktik, keahlian, dan bahkan personil administrasi Umayyah. Bahkan pengembangan birokrasi daulah ini apabila dirujuk kepada tradisi terdahulunya adalah preseden birokrasi Romawi dan Sasania. Pada mulanya khalifah merupakan kiblat mendapatkan petunjuk dalam segala urusan, namun lambat laun peran keluarga khalifah itu digantikan oleh bentuk pemerintahan yang rasional, yaitu dikembangkan dalam tiga tipe kedinasan atau biro (*diwan*). *Pertama*, dinas kearsipan atau *diwan al-rasail* yang berperan dengan kerja kearsipan dan surat menyurat. *Kedua*, dinas pengumpulan pajak, seperti *diwan al-kharraj*. *Ketiga*, sejumlah kedinasan yang menangani pengeluaran militer khalifah, keperluan istana dan tahanan, dinas kemiliteran atau *diwan al-jaysh*. Masing-masing fungsi *diwan* tersebut terbagi menjadi kantor-kantor cabang, dan masing-masing kantor terbagi menjadi sub-sub cabang yang lebih kecil.<sup>14</sup> Selain staf birokrasi tersebut, khalifah juga mengangkat beberapa *qadi* atau hakim. Mereka biasanya dipilih di antara para fuqaha yang berpengaruh,

---

<sup>13</sup> Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, I, hlm. 108-109.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 109.

dan mereka bertugas menerapkan hukum Islam mengenai permasalahan sipil warga Muslim. Sementara itu, jabatan yang dikembangkan untuk mengontrol dan mengkoordinir kerja birokrasi, pada masanya dibentuk *wazir* (menteri), yang bertugas langsung sebagai asisten pribadi khalifah, dan jabatan ini tidak mesti dipegang oleh keluarga khalifah, sebagaimana terjadi pada masa khalifah al-Mahdi (775-785) dan Harun al-Rasyid (786-809) keluarga Barmakiyah<sup>15</sup> memiliki pengaruh yang luar biasa, mereka menjadi jenderal dan gubernur, dan petugas tutor atau pelatih bagi raja-raja muda.

Adapun struktur pemerintahan wilayah ditetapkan ke dalam beberapa propinsi seperti Iraq, Mesopotamia, Mesir, Syiria, Iran Barat, Khuzistan, dan Khurasan. Propinsi-propinsi ini diorganisir untuk menumbuhkan kepatuhan kalangan pejabat terhadap pemerintahan pusat dan untuk menjamin penyetoran pajak wilayah propinsi kepada pemerintah pusat. Setiap pemerintahan lokal itu berkembang dalam beragam coraknya, seperti halnya Iraq dibagi menjadi sebuah struktur yang terdiri dari beberapa distrik, yang dinamakan *kura*, *tassuj*, dan *rustaq*. Begitu halnya di wilayah lain berlaku struktur pemerintahan yang sejenis. Dengan demikian organisasi daulah Abbasiyah merupakan sebuah birokrasi yang mengalami elaborasi pesat di tingkat pusat dan dalam pola hubungan antara kekuatan lokal dan propinsial seluruh wilayah daulah ini. Pada beberapa wilayah itu kegiatan pemerintahan dijalankan oleh tokoh-tokoh independen, para sultan atau gubernur yang menguasai wilayah mereka secara penuh, tetapi pada beberapa wilayah lainnya adalah para tokoh kampung setempat. Karena itu ikatan pemerintahan pada masa Abbasiyah tidaklah

---

<sup>15</sup> Mereka berasal dari keluarga pendeta Budha. *Ibid.*, hlm. 110.

sebagai hirarki yang ketat, melainkan sebuah kompleksitas dari sebuah sistem antara sempit dan terbuka, antara kewajiban dan kesetiaan, antara ikatan pusat, propinsi, dan bangsawan setempat (lokal) terhadap kepentingan penguasa Abbasiyah.

Demikian dapat dipahami lebih lanjut, bahwa kekuasaan Abbasiyah merupakan sebuah rezim yang memerintah sebuah teritori yang sangat luas yang terdiri dari sejumlah komunitas kecil. Setiap komunitas dipimpin oleh kalangan bangsawan masing-masing seperti kepala kelompok, tuan tanah, dan tokoh-tokoh berpengaruh lainnya setelah mereka bersekutu dengan ahli-ahli yang berpengaruh dalam pemerintahan pusat dan lokal. Organisasi pemerintahan dan bentuk-bentuk birokrasi dalam sistem kerja daulah Abbasiyah, yang menyatukan kalangan elite pusat dan lokal itu, telah memperkokoh sebuah rezim yang koheren. Sistem persekutuan itu tampaknya merupakan sebuah produk kekuasaan yang didasarkan pada konsep *khalifatullah*, yakni kedudukan para khalifah sebagai Wakil Tuhan mengejawantah dalam kekuasaan mereka yang menghendaki ketaatan warganya secara penuh. Implementasinya dalam politik Abbasiyah dijalankan melalui koalisi kalangan elite yang didasarkan pada tradisi yang memadukan antara term Islam dan term Timur Tengah pra Islam.

## **B. Keragaman Sosial-keagamaan**

Kelahiran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw di tanah Arab tidaklah lahir di ruang yang kosong, sebuah ruang yang isolatif yang tidak berhubungan dengan ruang sejarah yang lain. Dengan bahasa lain, Islam – baik sebagai ideologi maupun gerakan sosial–lahir sebagai perespon, pelanjut, penegas, dan pelestari tradisi yang pernah dan sedang berkembang di luar masyarakat Arab. Setidaknya berdasarkan pada percikan yang terpancar dari

Alquran—sebagai sumber ajaran Islam—ditemukan ajaran serta nilai-nilai luhur yang berkembang di luar Arab. Secara eksplisit Q.S. al-Baqarah (2):4 menyebutkan bahwa untuk membangun keimanan seseorang, persyaratan yang harus dipenuhinya adalah selain percaya pada Kitab (Alquran) juga kepada Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Nabi Muhammad.<sup>16</sup> Sementara itu sejarah mencatat bahwa dua puluh nabi yang diperkenalkan Islam maupun para nabi yang tidak disebutkan dalam Alquran mereka tinggal tersebar di wilayah luar Ara, dan di antara para rasul tersebut tidak saling berbeda satu sama lain.<sup>17</sup> Dengan kata lain pola kebudayaan yang berkembang di antara para Utusan Allah adalah melanjutkan tradisi baik dengan melakukan reformasi ataupun modifikasi terhadap peradaban yang sedang berlangsung. Pola keberagamaan model para utusan Tuhan tersebut juga terjadi semasa dinasti Abbasiyah di Baghdad.

Jauh sebelum kehadiran Islam, di Irak telah berkembang agama-agama lokal maupun agama lain yang datang dari luar Irak. Di antara

---

<sup>16</sup> Q.S. al-Baqarah (2):4, “Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Alquran) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat. Terjemahan Alquran yang diterbitkan oleh Departemen Agama, menjelaskan bahwa yang dimaksud *Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Muhammad s.a.w.* ialah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Alquran seperti: Taurat, Zabur, Injil dan Shuhuf-Shuhuf yang tersebut dalam Alquran yang diturunkan kepada para Rasul. Allah menurunkan Kitab kepada Rasul ialah dengan memberikan wahyu kepada Jibril a.s., lalu Jibril menyampaikannya kepada Rasul.

<sup>17</sup> Q.S. al-Baqarah (2) : 285, “Rasul telah beriman kepada Alquran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan): “Kami tidak membedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya”, dan mereka mengatakan: “Kami dengar dan kami taat.” (Mereka berdoa): “Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali.”



agama-agama yang sudah berkembang itu adalah agama-agama Mesopotamia (kepercayaan dan praktek keagamaan orang Sumer dan orang Akkad)<sup>18</sup> seperti agama Sumeria dan agama Babilonia. Agama-agama tersebut terus menjelma dalam bentuknya yang baru, dengan unsur-unsur kebaruannya antara lain adalah adanya kepercayaan eskatologis, angeologi (ilmu kemalaikatan), dan mesianisme dari Zoroastrianisme.<sup>19</sup> Selain agama-agama di atas di bagian barat daya Mesopotamia berkembang pula tradisi Yudaisme (keyahudian).<sup>20</sup> Tradisi ini konon merujuk pada tradisi Nabi Ibrahim yang berkembang di wilayah tersebut, tetapi esensi pengalaman keagamaannya hampir sama dengan esensi pengalaman keagamaan suku Amori Mesopotamia. Orang Amori Mesopotamia sendiri diduga telah mengembangkan suatu konsep monoteistik sebagai dasar bagi tuntutan mereka terhadap suatu pemerintahan tunggal dan kewarganegaraan yang sama bagi semua umat manusia di bawah hukum Ilahi yang diumumkan secara resmi oleh raja negaradunia, Hammurabi.<sup>21</sup> Dalam perkembangannya orang-orang Yahudi mengalami eksodus hingga merata di hampir seluruh dunia. Ibrahim yang diperkirakan lahir pada abad ke-19 SM itu terlahir di tengah masyarakat yang sudah memiliki peradaban yang tinggi.

Selain agama Yahudi, di Mesopotamia juga berkembang agama Kristen. Namun agama Kristen di daerah tersebut lebih

---

<sup>18</sup> Kautsar Azhari Noer, "Tradisi Monoteistik," dalam Taufik Abdullah, dkk. (ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam 1: Akar dan Awal* (Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 2002), hlm. 40. Mesopotamia dalam hal ini adalah Mesopotamia kuno yang kini wilayahnya meliputi Iraq Modern dan Syuriah bagian timur antar Sungai Tigris dan Efrat.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 44-45.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

banyak dianut oleh kaum pendatang. Kaum Kristen yang datang ke Persia karena mereka menghindari penyiksaan yang dilakukan oleh penguasa Bizantium. Pada saat yang bersamaan orang-orang Persia menyambut kehadiran orang Kristen karena para rahib-rahibnya ini berpengetahuan dan berpengalaman tentang warisan pengetahuan kuno.<sup>22</sup> Kerajaan Ghassan dan kerajaan Hirah adalah dua kerajaan Kristen yang terletak di daerah perbatasan utara Arab dengan Syuriah dan Irak, yaitu daerah-daerah antara jazirah Arab dan Bizantium, atau antara Arab dan Persia.<sup>23</sup>

Kehidupan keagamaan di wilayah Dinasti Abbasiyah didukung oleh berbagai kelompok keagamaan lokal maupun pendatang. Agama lain yang dianggap sebagai pendatang yang masuk ke wilayah Persia adalah agama Buddha. Dalam perkembangannya keluarga Bani Abbasiyah membangun jalinan yang sangat intensif dengan salah keluarga Buddha, yaitu Barmaki.<sup>24</sup> Keluarga Buddha yang pada akhirnya memeluk agama Islam ini mendapat kepercayaan penting dalam pemerintahan Bani Abbasiyah, yaitu sebagai gubernur dan menteri keuangan. Bahkan khalifah Harun al-Rasyid mempercayakan proses pendidikan kepada mantan keluarga Bikhu Buddha. Meskipun pada akhirnya karena pertimbangan politik, keluarga Bikhu ini dimusnahkan oleh salah seorang khalifah dari Bani Abbasiyah.<sup>25</sup>

Terhadap realitas masyarakat yang heterogen tersebut, Ignasz Goldziher menggambarkan adanya dua faktor yang menjadikan tradisi Arab dan tradisi di luar Arab saling melengkapi satu

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

<sup>24</sup> Hitti, *History of the Arab*, hlm. 365-368.

<sup>25</sup> Karim, *Sejarah Pemikiran*, hlm. 150.

sama lain sehingga menjadi sebuah formula baru. Kedua faktor dimaksud, menurutnya adalah pertama bersifat internal atau yang berasal dari institusi serta tradisi pada komunitas muslim sendiri, sedangkan yang lainnya ialah pengaruh-pengaruh intelektual dari luar tradisi Islam, yang memperkaya dan mempersubur inti ide yang asli. Dengan demikian telah melahirkan perkembangan historisnya yang ditandai oleh asimilasi Islam atas pengaruh asing. Maka dalam perkembangannya terjadi kecenderungan dogmatik Islam yang berlangsung menurut jejak alam pikiran Yunani; di dalam sistem hukum Islam berkembang pengaruh hukum Romawi; organisasi kenegaraan seperti yang terbentuk semasa khaklifahan Abbasiyah menunjukkan adaptasi ide-ide politik Persia; dan ilmu tasawuf Islam menggunakan cara-cara berpikir Neoplatonisme dan Hindu.<sup>26</sup>

Perkembangan agama dan keagamaan Islam sendiri pada periode Abbasiyah ini merupakan penjelasan tambahan terhadap ajaran-ajaran Islam yang berakar kepada Nabi Muhammad, wahyu Alquran, dan komunitas muslim pertama di Madinah dan Mekah. Agama Islam pada masanya merupakan sebuah studi keagamaan yang sangat luas cakupan dan praktiknya, yaitu secara garis besar termasuk hukum, teologi, dan sufisme, yang dikembangkan di berbagai lembaga pengajaran dan sub-komunitas. Pengertian Islam karena itu banyak merujuk kepada komunitas dan konsep-konsep keagamaan yang dapat dipahami sebagai ekspresi atas ajaran wahyu. Lebih dari itu ide-ide Islam menyerap sebuah kebudayaan dalam segala aspeknya seperti syair dan sastra, seni dan sains yang menampilkan kekhasan kultural dari masyarakat Abbasiyah, sehingga corak keagamaan dalam penampilannya

---

<sup>26</sup> Goldziher, *Pengantar Teologi*, hlm. 2.

yang lebih luas merupakan percampuran antara literatur, seni dan sains, bahkan pengaruh agama dan non-agama.

Perkembangan Islam pada periode Abbasiyah, dilihat dari kehidupan keagamaan dan dalam konteks multikulturalnya terbagi sedikitnya kepada dua bentuk perkembangan. *Pertama*, adalah keagamaan di kalangan istana khalifah dan elite politik, dalam hal ini Islam mengekspresikan identitas politik khilafah dan elite politik; sedangkan yang lainnya adalah keagamaan dalam komunitas perkotaan yang heterogen, hal mana Islam berkembang sebagai ekspresi keagamaan, moral, dan nilai-nilai sosial masyarakat Muslim perkotaan.<sup>27</sup> Kedua lingkungan tersebut sama-sama berperan dalam pengembangan keagamaan dalam bidang syair, teologi dan sejarah, tetapi khususnya lingkungan perkotaan berperan dalam berbagai kepastakaan yang berkaitan dengan penafsiran Alquran, hukum, mistisisme, dan teologi. Di dalam heterogenitas masyarakat Abbasiyah yang kompleks itu, visi keagamaan berkembang dengan term-term keislaman dan seiring dengan tumbuhnya lembaga-lembaga “sektarian” di dalam umat Islam. Maka pada gilirannya tumbuh pula para ahli Islam yang mandiri dan para pengikut mereka menghadirkan sejumlah pandangan keislaman yang beragam. Sebagian memusatkan perhatian pada penulisan, studi dan penghafalan Alquran, pada pengumpulan hadits nabi dan pengembangan hukum; sedangkan sebagian lainnya memusatkan perhatian pada teologi dan sufisme. Kultur keagamaan masyarakat Islam pada akhirnya merupakan produk kombinasi dari berbagai orientasi, bahkan sebagai hasil dari pergulatan antar mereka dan juga antar versi mereka.

Komunitas keagamaan yang paling berpengaruh pada masa

---

<sup>27</sup> Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, I, hlm. 124.

Abbasiyah dengan beragam kecenderungan alirannya, dapat dijelaskan secara singkat dalam pembahasan di bawah ini.

### 1. *Komunitas Sunni*

Penyebutan *Sunni* pada mulanya dialamatkan kepada kelompok atau golongan umat Islam yang secara tegas menyatakan dirinya mengikuti, meneladani dan berpedoman kepada sunnah nabi, yakni dinamakan juga sebagai *ahl al-sunnah*, di dalam memahami dan mengamalkan Islam. Sunnah nabi sendiri mencakup keseluruhan perilaku nabi berupa ucapan, perbuatan dan ketetapan nabi; baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Rasul Allah; berupa sifat ruhaniah maupun sifat lahiriah, sifat pembawaan maupun yang bersifat bentukan.<sup>28</sup> Kemunculan kelompok ini sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya aliran-aliran dalam Islam seperti Syi'ah, Khawarij, Murjiah, dan Mu'tazilah. Konsep *ahl al-sunnah* diakui oleh para khalifah Umayyah, dan pada masa Umar ibn Abdul Aziz ditambahkan dengan konsep *jamaah* menjadi *ahl Sunnah wa al-jamaah* untuk memulihkan kembali kesatuan dan persatuan umat Islam yang retak akibat perang saudara pada zaman Ali bin Abi Thalib.<sup>29</sup> Selanjutnya penyebutan kelompok tersebut menjadi populer pada masa Abbasiyah dengan istilah *Sunni*, yakni sebagai komunitas keagamaan yang sangat mempertimbangkan persatuan universal umat Islam.

Komunitas Sunni dalam pengertiannya yang lebih luas bukanlah suatu aliran atau madzhab, melainkan suatu cara berpikir atau cara pandang beragama yang bersifat lentur, fleksibel, dan moderat, baik menyangkut bidang politik maupun keagamaan.

---

<sup>28</sup> Sukama Karya, dkk., *Ensiklopedi Mini Sejarah & Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 7.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

Dalam bidang politik dan hukum, kalangan Sunni berpendirian bahwa Khalifah adalah pengganti nabi yang pemilihannya melalui penyaringan. Dia menggantikan pimpinan politik dan militer dalam masyarakat dengan status keagamaan yang terbatas.<sup>30</sup> Sementara dalam bidang keagamaan di kalangan Sunni terdapat nuansa pemikiran yang sangat beragam mengenai aspek *fiqih*, *akidah*, dan *tasawuf*. Perkembangan ketiga aspek ajaran Islam ini pada masanya tumbuh subur seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang dipelopori pada Khalifah Abbasiyah priode awal.

Perkembangan bidang fiqih diarahkan untuk membentuk sebuah pentunjuk ketuhanan mengenai jalan hidup (*way of life*) kepada pengembangan sistem hukum (undang-undang) Muslim. Syariat dikembangkan secara lebih luas pada masanya kepada sebuah pengembangan inspirasi ketuhanan terhadap ajaran-ajaran Alquran dan Hadits. Sistem hukum Muslim berkembang atas upaya-upaya kalangan hakim (*qadi*) dan ulama di pusat pemerintahan Bagdad, tetapi juga berlangsung menyebar ke Basrah, Kufah, Syria, Madinah, dan Mekah oleh tokoh-tokoh di tempatnya masing-masing dengan mendirikan "madzhab hukum".<sup>31</sup> Secara substansial hukum Islam yang menjadi pembahasan pada setiap madzhabnya dapat dibedakan menjadi tiga kategori: *ibadah*, yaitu aturan-aturan mengenai ritual; *muamalah* atau aturan-

---

<sup>30</sup> Esposito, *Islam dan Politik*, hlm. 17.

<sup>31</sup> Ada empat madzhab yang bertahan, yaitu Hanafi, yang didirikan oleh Abu Hanifah (w.757) dengan wilayah pengaruhnya di Iraq; Maliki, yang didirikan oleh Malik ibn Anas (w. 795) dengan basis pengaruhnya di wilayah Madinah; Syafi'i, didirikan oleh al-Syafi'i (w. 820), terutama berpengaruh di wilayah Mesir; dan Hambali, yang didirikan oleh Ibn Hambal (w. 855), dengan pengaruhnya yang luas di Iraq. Baca, Lapidus, *Sejarah Sosial*, I, hlm. 155.

aturan mengenai hubungan sosial, dan *imamah* (teori mengenai organisasi kolektif). Di dalam penjabaran serta pemikiran atas ketiga kategori hukum tersebut terdapat nuansa bahwa hukum atau adat non-Islam mengenai sebagian besar urusan muamalah khususnya berdamai kepada prinsip-prinsip keagamaan Islam, sehingga bentuk akhir syari'ah mencerminkan suatu transformasi adat dan tradisi melalui penguatan etika Islam. Nuansa demikian telah memicu dua perbedaan pendekatan, antara kelompok *fiqh-minded* dan kelompok *hadits minded*, mengenai isu-isu spesifik dan mengenai sumber yang layak mengenai keputusan-keputusan hukum. Namun sekitar pertengahan abad kesembilan, antara kedua pendekatan tersebut nyaris terpadu dan dapat menekan konflik antara mereka untuk mengelaborasi dan mensistematisasi hukum sebagai sebuah kitab hukum berdasarkan pada Alquran, Hadits, konsensus (*ijma'*) kelompok terdidik, dan penalaran analogi (*qiyas*) untuk menilai hadits dengan beberapa bentuk kritisisme eksternal.

Sementara itu perkembangan tradisi Sunni dalam bidang akidah pada masa ini, terlihat dari pengerahan perhatian para ulama pada dimensi-dimensi Islam mengenai teologi. Perhatian Sunni terhadap bidang ini sebenarnya merupakan kelanjutan atas permasalahan teologis yang telah muncul pada masa-masa sebelum Abbasiyah, kecuali pada masa ini pengaruh filosof Yunani dan teologi Kristen telah mendorong pemikir-pemikir Muslim untuk mengadopsi perisitilahan Hellenistik dan bentuk-bentuk argumentasi rasional umat Kristen Yunani. Di antara teolog Muslim yang paling agresif dalam interest terhadap dialektika Yunani itu adalah Mu'tazilah. Di tengah perdebatan tentang konsep-konsep antropomrpi yang tersebar di kalangan muslim, sebetulnya Mu'tazilah berpendirian teguh terhadap keesaan dan

transendensi Tuhan. Mereka menegaskan bahwasanya hanya terdapat satu Tuhan, sebagai zat yang Maha Suci, Tuhan tidaklah menyerupai segala bentuk ciptaan-Nya, sehingga yang diadopsi oleh Mu'tazilah dari Aristotelian, bahwa esensi Tuhan adalah eksistensi-Nya.<sup>32</sup> Suatu topik utama dalam teologi Muslim dan menjadi isu terpenting dalam keagamaan khilafah Abbasiyah, justru doktrin-doktrin Mu'tazilah yang lainnya sebagai akibat logis dari konsep mereka mengenai transendensi dan keesaan Tuhan. Di antara konsep mereka yang ditolak oleh kelompok Muslim lainnya adalah pendapat mereka bahwasanya Alquran merupakan sesuatu yang diciptakan (makhluq) dan bukan bagian dari esensi Tuhan. Kelompok Mu'tazilah menolak pandangan Kristen ortodoks tentang Logos (firman Tuhan) telah mendahului Tuhan sebagai bagian dari esensi-Nya sehingga semua itu sama kekalnya dengan Tuhan. Bagi Mu'tazilah, bahwa Alquran atau logos Muslim itu bukan merupakan bagian dari Tuhan; melainkan mereka menegaskan bahwa Alquran adalah makhluk yang berupa pesan-pesan yang diwahyukan oleh Tuhan ke dalam diri Muhammad.

Doktrin-doktrin Mu'tazilah yang lainnya, secara epistemologis memperlihatkan cukup jelas akan pengaruh pemikiran Yunani, meskipun sangat jelas pula bahwa prinsip Mu'tazilah selalu menjalkan inspirasi ajaran Islam. Penekanan mereka terhadap keesaan Tuhan dan pertanggungjawaban manusia tampak sebagai esensi dari ajaran Islam sendiri. Karena itu Mu'tazilah selalu berusaha mengembangkan isu-isu Islam, yang dibangun di atas dasar ajaran-ajaran Aristoteles, Democritus, Empedocles, dan pemikiran filosof-filosof Yunani lainnya. Berdasarkan pemikiran Yunani itulah, Mu'tazilah mengembangkan isu-isu Islam dalam

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 161.



sebuah metafisika wujud, sebuah teori asal-usul alam, sebuah bentuk fisik dari sesuatu ciptaan (*makhluk*), dan sebuah psikologi manusia; semuanya dikembangkan secara lebih spesifik atas ajaran-ajaran akal (*reason*), sedangkan wahyu dijadikan sebagai penegas atau pengukuhan terhadap kebenaran yang diketahui dengan petunjuk akal.<sup>33</sup>

Sebagai konsekuensi yang wajar dari posisi Mu'tazilah itu, ialah penentangan atas konsep-konsep mereka yang datang dari kalangan Muslim lainnya terutama ulama-ulama hadits. Mereka menekankan kemutlakan kekuasaan dan kemisterian wujud Tuhan, yang tidak dapat diketahui kecuali sepanjang diwahyukan di dalam Alquran. Pandangan mereka juga menyangkal kemampuan akal dalam urusan agama atau terhadap pilihan-pilihan moral. Bagi mereka, perbuatan manusia pada hakikatnya merupakan ekspresi kekuasaan Sang Pencipta daripada sebuah pengalaman dari kehendak dan keputusan yang bebas. Pertentangan antara dua kubu—Mu'tazilah (*rationalist-oriented*) dan ahli hadits (*literalist-oriented*)—itu dalam teologi Islam, mendorong para ahli teologi muslim abad kesembilan dan abad kesepuluh untuk menemukan jalan tengah dengan berusaha memberikan penekanan terhadap hadits sekaligus mempertahankan peran pemikiran (akal) dalam pembahasan isu-isu teologis. Tokoh terpenting dalam usaha mediasi ini adalah al-Asy'ari (w. 935), secara garis besar ia mempertahankan sebuah sudut pandang teologis yang menekankan kehebatan pentingnya wahyu Tuhan dan lemahnya kehendak manusia dan potensi pemikiran mereka. Ia menggunakan konsep-konsep Yunani untuk mempertahankan posisinya, tetapi ia menolak metafisika rasional sebagai kunci menuju karakter Tuhan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 162-163.

dan alam, dan menegakkan keunggulan wahyu, sementara akal yang diperankannya mampu mengemukakan makna-makna yang terkandung di dalam Alquran dan al-Hadis.<sup>34</sup>

Adapun perkembangan keagamaan dalam bidang sufisme di kalangan Sunni pada masa Abbasiyah, ditunjukkan dalam keagamaan kalangan Sufi serta komunitasnya yang berusaha mencapai kedekatan dan pengalaman individual atas realitas Tuhan. Sufisme dipahami sebagai sub-sistem ajaran Islam yang merujuk kepada hasil pemikiran para Sufi. Sufisme secara umum seiring dengan intisari Islam tentang ajaran berserah diri atau taat sepenuhnya kepada kehendak Allah demi tercapainya kepribadian yang bersih. Bahkan penyerahan diri kepada kehendak Tuhan merupakan pengertian asasi kata *Islam*, karena di dalam agama ini kekuatan gaib (*supranatural*) dipandang sebagai suatu Zat yang berkuasa secara mutlak.<sup>35</sup> Pola keagamaan yang dikembangkan para Sufi dengan *tasawuf* itu merupakan model keagamaan yang tumbuh dalam penghayatan Islam. Para Sufi seringkali menekankan kesederhanaan hidup dengan menjauhkan diri dari kemewahan hidup materi; mereka selalu berusaha mendekati Tuhan, sehingga mereka merasakan cinta Tuhan dan melihat Tuhan dengan mata hatinya.<sup>36</sup> Konsep hubungan manusia dan Tuhan dalam perspektif kaum Sufi, digambarkan sebagai hubungan yang menunjukkan dekatnya Tuhan kepada manusia, bahkan manusia merasa bersatu dengan Tuhan.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 165.

<sup>35</sup> Tim Penulis IAIN Jakarta, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1992), hlm. 445.

<sup>36</sup> Harun Nasution, *Filsafat dan Mistisisme* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 58.

<sup>37</sup> *Ibid.*

Perkembangan sufisme pada masa Abbasiyah menampilkan beberapa variasi dalam perilaku keagamaan umat Islam. Sebagian mereka memilih sebuah perilaku kesalehan yang mementingkan penghafalan Alquran, mencurahkan diri terhadap hadits-hadits nabi dan hukum, dan pemenuhan ajaran hadits tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sebagian yang lainnya memilih asketisme yang lebih ekstrim, yaitu mereka menegaskan kebencian terhadap dunia, dan mementingkan ketekunan beragama dengan perilakunya antara lain: mereka bertahan dalam kemiskinan dan pengasingan diri, senantiasa berhati-hati untuk tidak melakukan dosa, dan cemas akan pengadilan akhirat serta senantiasa mengharapkan surga yang dijanjikan kepada mukmin sejati. Namun bagi sebagian penganut ajaran Sufi lainnya menampilkan cara-cara penyucian yang mengisyaratkan sebuah asketisme yang lebih moderat, yakni mereka selalu berusaha mengendalikan dorongan (nafsu) duniawi tanpa harus memberikan penolakan sepenuhnya yang bersifat fisik. Kelompok sufisme moderat ini bersikap bijak dalam rangka mengikuti ajaran-ajaran Alquran, menghindari dosa, dan bersikap perendahan diri terhadap Tuhan dengan sikap-sikap yang terangkum dalam istilah *zuhud* (penghindaran diri).<sup>38</sup>

Perkembangan sufisme semenjak abad kesembilan melahirkan sejumlah tokoh dalam gerakan sufi. Di antara mereka yang sangat populer dengan ajarannya yang khas, misalnya Rabi'ah Adawiyah (w. 801) mengembangkan ajaran cinta (*mahabbah*) yang mengandung makna kerrindan kepada Tuhan dengan kepatuhan, kepasrahan, dan pemusnahan diri seseorang untuk pencapaian kedekatan kepada Tuhan; Abu Yazid al-Bistami (w.873) yang melambangkan pencarian kebahagiaan bersama

---

<sup>38</sup> Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, I, hlm. 167.

dengan Tuhan yang sangat memabukkan, dan seseorang berusaha melenyapkan diri dan menyatu dengan Nama-nama dan Sifat-sifat Tuhan; sebagaimana al-Hallaj (w. 923), seorang sufi yang tampak telah kehilangan kesadaran dirinya dan menyatu dengan Tuhan, antara lain wujud penyatuannya terungkap dalam perkataannya "*Ana al-Haqq* (Saya adalah Kebenaran); Al-Haris al-Muhasibi (781-857) dengan ajaran-ajarannya yang memadukan pencarian kesempurnaan moral dengan patuh menjalankan hukum Islam dan klarifikasi teologis terhadap prinsip-prinsip keyakinan; dan Al-Junaid (w. 911) melanjutkan upaya-upaya untuk mengintegrasikan sufisme dengan aspek-aspek keagamaan lainnya.<sup>39</sup> Para Sufi seperti tersebut ini tampak berselisih mengenai tahapan dan metode menuju Tuhan, tetapi secara kolektif mereka telah mengartikulasikan sebuah teori perkembangan spritual yang dipadukan dengan inspirasi Qurani dan paduan antara peristilahan dengan pengalaman kehidupan generasi Sufi. Bahkan seiring dengan penterjemahan literatur Syiria dan Yunani ke dalam bahasa Arab, perkembangan sufisme itu banyak dipengaruhi dengan mistisisme intelektual yang berasal dari pemikiran Plotinus (w. 270) yang menyediakan sebuah konsep teosofis mengenai jalan mistik.<sup>40</sup> Oleh karena itu, semenjak awal abad kesepuluh sufisme telah berkembang dari sebuah pencarian yang mengisolasi individu kaum asketik menjadi sebuah gerakan keagamaan yang memadukan *zuhud* dengan perkembangan spiritual yang mengarah kepada kesatuan Tuhan, hingga pada gilirannya sufisme tersebar di dalam konsep metafisik dan filosofis

---

<sup>39</sup> Penjelasan lebih luas dan mendalam tentang para tokoh Sufi dan ajaran-ajaran mereka dapat dibaca misalnya dalam Fazlur Rahman, *Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), hlm. 183-197.

<sup>40</sup> Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, I, hlm. 175.

tentang keberadaan Tuhan, dan sebuah doktrin pemujaan serta sifat kemukjizatan seorang wali.

## 2. *Komunitas Syi'ah*

Pertumbuhannya semacam rival terhadap komunitas Sunni, komunitas Syi'ah mengembangkan konsep Islam Syi'ah. Bagi komunitas ini, isu terpenting bukanlah hukum atau mistisisme melainkan loyalitas terhadap khalifah Ali dan penegasan bahwasanya hak khalifah hanya dapat berlangsung di tengah keluarga Ali. Mereka berkali-kali berusaha merebut khilafah, dan melakukan gerakan politik dalam bentuk perlawanan kepada daulah Abbasiyah. Namun kekalahan mereka dalam perebutan kekuasaan politik mengalihkan perhatian sejumlah tokoh Syi'ah dari aktivitas politik kepada aktivitas keagamaan. Pokok-pokok ajaran Syi'ah adalah sejumlah hadits mengenai imam, dan khususnya sejumlah hadits yang disandarkan kepada Ali dan sejumlah riwayat yang terkandung di dalam *Nahj al-Balaghah*. Ajaran Syi'ah sangat dekat dengan ajaran aliran simpatisan politik seperti teologi Mu'tazilah dan juga terlibat dalam perdebatan mengenai kebebasan berkehendak (*free will*) dan sifat-sifat Tuhan. Adapun pandangannya dalam bidang politik maupun hukum, ialah doktrin Syi'ah tentang *imamat*. bahwa pimpinan itu berada di tangan al-Imam dari turunan langsung dari Muhammad dan Ali bin Abi Thalib. Ali merupakan al-Imam yang pertama, dan Al-Imam adalah pimpinan keagamaan dan politik, yakni pimpinan politik dalam masyarakat sekaligus sebagai penafsir terhadap hukum Islam.<sup>41</sup> Pada abad kesembilan, konsep-konsep Syi'ah tentang imam itu berkembang hingga mencakup gagasan bahwasanya seorang imam bersifat *maksum*, sifat bebas dari kesalahan dan

---

<sup>41</sup> Esposito, *Islam dan Politik*, hlm. 17-18.

pembimbing yang sempurna bagi keagamaan.

Komunitas Syi'ah pada masa Abbasiyah terbagi menjadi dua kelompok pengikut putra Ja'far Al-Shadiq (w. 765), yaitu kelompok pengikut Abdullah bin Ja'far dan kelompok pengikut Isma'il bin Ja'far. Kelompok Abdullah dan beberapa imam yang menggantikannya berhasil mencapai posisi penting di Bagdad. Syi'ah sangat berperan dalam perdagangan dan penulisan. Namun semenjak kematian imam kesebelas pada tahun 874, yang tidak memiliki keturunan anak, suksesi keimaman menjadi berakhir, dan kepemimpinan komunitas Syi'ah dijalankan oleh Banu Nawbaht, sebuah keluarga Syi'ah di Bagdad.<sup>42</sup> Sementara itu, kelompok pengikut Isma'il bin Ja'far atau lebih dikenal dengan sebutan Syi'ah Isma'iliyah hanya menetapkan Islamil sebagai imam yang sah dan tidak mengakui Abdullah sebagai imam. Mereka menegaskan doktrin bebas dosa dan ketidaksalahan imam. Menurut doktrin Isma'iliyah, bahwa Alquran menyampaikan dua kebenaran, yaitu kebenaran *zahir* atau kebenaran eksternal, literal mengenai pesan-pesan Tuhan, dan kebenaran *bathin* atau kebenaran esoteris hakikat Alquran yang hanya mungkin diketahui oleh penafsir teks Alquran yang cakap melalui pemahaman *zahir* sebagai simbol dari prinsip spiritual batiniah. Bagi kalangan Isma'iliyah doktrin ini mengisyaratkan sebuah konsep mengenai imam sebagai guru dan pembimbing menuju makna batiniah wahyu Alquran.<sup>43</sup>

Terutama kalangan Isma'iliyah selain berusaha mempertahankan posisi mereka di tengah pemerintahan dan masyarakat Abbasiyah di Bagdad, mereka juga berjuang untuk memasukkan unsur kesukuan dan masyarakat petani di Arabia,

---

<sup>42</sup> Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, I, hlm. 181.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 182.

Syria, Iraq, Afrika Utara, dan kota-kota besar Iran. Mereka mendakwahkan ajaran persamaan dan keadilan, keperluan akan upaya pembaruan dan datangnya al-Mahdi, sehingga misi Isma'iliyah mampu memikat sejumlah warga baru kepada versi Islam Syi'ah, bahkan mereka melancarkan pemberontakan di berbagai tempat melawan Khilafah Abbasiyah. Beberapa dinasti Isma'iliyah pun didirikan di Afrika Utara, wilayah Caspia, Bahrain, Multan, dan di beberapa tempat lainnya, sembari mereka mengerahkan panji-panji revolusi Islam.

### **C. Dinamika Sosial-ekonomi**

Pada masa Abbasiyah kehidupan sosial-ekonomi berbasis multikultural dapat dilihat dari sumber pemasukan negara, perkembangan perdagangan dan industri, dan perkembangan ekonomi pertanian. Setiap gejala historis tersebut dapat dikatakan berbasis multikultural, karena masing-masing terjadi akibat proses interaksi antara masyarakat dalam latarbelakang budaya yang berbeda khususnya antara muslim dan non-muslim atau antara masyarakat Arab dan non-Arab. Potret lalu lintas perdagangan masa Abbasiyah menjadi bukti bahwa kekhalifahan di Baghdad membangun relasi dengan berbagai kelompok masyarakat dari berbagai latar kalangan ideologi dan kebudayaan untuk satu tujuan kesuksesan dalam perdagangan. Kenyataan ini memungkinkan diterapkannya etika multikultural yang bisa disepakati oleh semua kalangan. Nilai Islam barangkali bukanlah satu-satunya nilai yang menjadi pertimbangan dalam membangun etika multikultural di kalangan masyarakat pedagang. Namun dengan berpijak pada latar belakang keagamaan yang berkembang di Persia sejak kuna sampai dengan kehadiran Islam, maka etika yang mereka majukan dibangun di atas nilai-nilai keagamaan yang berkembang di Persia,

seperti dari Yahudi, Kristen, Buddha, agama Persia Kuno, dan nilai etika agama Islam sendiri.

Kecenderungan tersebut dapat ditelaah dari gambaran historis berikut ini:

### **1. Sumber Pemasukan Negara**

Pemasukan negara secara umum adalah bersumberkan pada pajak. Bagi masyarakat muslim, zakat merupakan satu-satunya pajak yang diwajibkan kepada setiap orang, yang dibebankan atas tanah produktif, hewan ternak, emas dan perak, barang dagangan, dan harta milik lainnya yang mampu berkembang, baik secara alami maupun setelah diusahakan. Umat Islam pada masa ini, sebagaimana juga berlaku untuk mereka pada masa-masa sebelumnya tidak dibebani pajak kepala. Di samping itu, pajak yang diurus para pemungut pajak resmi adalah pajak tanah, hewan ternak dan yang sejenisnya. Adapun pungutan pajak atas barang-barang pribadi, termasuk emas dan perak, diserahkan kepada kesadaran masing-masing individu. Semua uang yang terkumpul dari orang Islam akan disalurkan oleh kantor perbendaharaan negara untuk kepentingan orang Islam itu sendiri seperti orang miskin, anak yatim, musafir, sukarelawan dalam perang suci, dan para budak serta tawanan yang harus ditebus.<sup>44</sup> Sementara itu sumber pendapatan utama yang lainnya adalah pajak dari bangsa lain, uang tebusan, pajak perlindungan dari rakyat non-muslim (*jizyah*), pajak tanah (*kharraj*), dan pajak yang diambil dari barang dagangan non muslim yang masuk ke wilayah Islam. Dari semua barang wajib pajak ini, pajak tanah selalu merupakan yang terbesar, dan menjadi sumber utama pendapatan negara dari non

---

<sup>44</sup> Sebagaimana ditetapkan dalam Alquran tentang delapan asnaf penerima zakat. Baca Alquran Surat al-Baqarah (2): 177.



muslim.<sup>45</sup>

## 2. *Perdagangan dan Industri*

Perekonomian masa Bani Abbasiyah yang paling menonjol adalah perdagangan dan industri. Pada mulanya laju perdagangan di masa ini dikendalikan oleh orang-orang Kristen, Yahudi, dan pengikut Zoroaster. Namun pada akhirnya laju perdagangan itu digantikan oleh orang Arab Islam, menjadikan pelabuhan-pelabuhan seperti Baghdad, Bashrah, Siraf, Kairo, dan Iskandariyah sebagai pusat perdagangan.<sup>46</sup> Wilayah perdagangan yang dijelajahi para pedagang Muslim pada saat itu meliputi Cina, Maroko, dan Spanyol. Di antara barang dagangan yang mereka bawa adalah kurma, gula, kapas, kain wol, serta peralatan dari baja dan gelas. Dari wilayah Asia mereka mengambil gading, kayu eboni dan dari Afrika mereka mengambil budak kulit hitam.<sup>47</sup>

Kemajuan perdagangan Abbasiyah didukung oleh pengembangan industri rumah tangga. Industri kerajinan tangan menjamur di berbagai pelosok kerajaan. Daerah Asia Barat menjadi pusat industri karpet, sutera, kapas, dan kain wol, satin dan brokat (*dibaj*), sofa, dan kain pembungkus bantal, juga perlengkapan dapur dan rumah tangga lainnya. Sebuah pusat industri tenun di Bagdad yang dikenal dengan *'attabi*, banyak ditiru oleh perajin Arab di Spanyol dan terkenal di Perancis, Itali dan negara Eropa lainnya dengan nama *tabi*. Kufah terkenal memproduksi kain sutera atau separuh sutera untuk penutup kepala yang masih terkenal hingga sekarang dengan nama *kufiyah*, demikian kota-kota lainnya

---

<sup>45</sup> Hitti, *History of the Arab*, hlm. 399.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 428.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 430.

yang memiliki sejumlah pabrik kelas satu yang membuat karpet, sulaman, brokat, dan gaun panjang untuk kalangan atas atau dikenal sebagai *thiraz* (dari bahasa Persia) yang memuat nama atau kode sultan atau khalifah yang dibordir di atasnya. Barang-barang lain seperti tempat lilin, pot bunga, dan perabotan dapur banyak dibuat di Suriah dan Mesir, bahkan kain dari Mesir dikenal di seluruh dunia dan ditiru oleh perajin Persia.<sup>48</sup>

Jenis industri yang lainnya adalah pembuatan kertas tulis di Samarkand, yang diperkenalkan dari Cina pada pertengahan abad kedelapan. Selanjutnya pada akhir abad tersebut Bagdad memiliki pabrik kertas, dan sejak abad kesepuluh dan seterusnya kota-kota lain seperti Mesir, Maroko, dan Spanyol juga memiliki pabrik kertas yang menghasilkan berbagai jenis kertas putih maupun berwarna.<sup>49</sup> Industri penting lainnya yang juga mengalami masa kejayaannya adalah “seni mengolah perhiasan”. Mutiara, sapir, rubi emerald. dan permata sangat disukai para bangsawan, sedangkan zamrud yang berwarna biru kehijauan, batu carnelius yang kemerahan dan onyx (semacam batu akik) yang berwarna putih, coklat, atau hitam disukai oleh kalangan bawah. Adapun tambang utama yang memungkinkan tumbuhnya industri perhiasan adalah emas dan perak yang diambil dari Khurasan, yang juga menghasilkan marmer dan air raksa; rubi, lapis lazuli, dan azuri dari Transoxiana; tembaga dan perak dari Karman; mutiara dari Bahrain; dan hasil tambang lainnya dari daerah-daerah kekuasaan Abbasiyah.<sup>50</sup>

### **3. Perkembangan Pertanian**

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 431-432.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 433.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 434-436.

Kemajuan bidang pertanian cukup pesat semenjak awal pemerintahan Abbasiyah, karena ibu kota pemerintahannya sendiri berada di daerah sangat subur, yaitu di tepian sungai yang biasa dikenal dengan nama Sawad. Pemerintah Abbasiyah juga menyadari bahwa pertanian merupakan sumber utama pemasukan negara. Karena itu lahan-lahan pertanian yang terlantar dan desa-desa yang hancur di berbagai wilayah kerajaan diperbaiki dan dibangun kembali secara bertahap. Daerah rendah di lembah Tigris-Efrat, yang merupakan daerah terkaya setelah Mesir, mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, dengan membuka kembali saluran irigasi yang lama dari sungai Efrat, dan membuat irigasi baru, sehingga membentuk sebuah “jaringan yang sempurna”. Demikian pula penggalian kanal-kanal besar di beberapa daerah yang tersambung ke sungai Tigris maupun Efrat telah meningkatkan sarana irigasi di wilayah Irak dan sekitarnya. Tanaman asli Irak khususnya, terdiri atas gandum, padi, kurma, wijen, kapas dan rami, sedangkan di daerah yang sangat subur, Sawad, menumbuhkan berbagai jenis buah dan sayuran seperti kacang, jeruk, terung, tebu, dan beragam bunga juga tumbuh subur. Selain buah dan sayuran, bunga dibudidayakan dalam skala besar diperjualbelikan untuk pembuatan parfum, sari mawar, air bunga lilin, jeruk, violet dan yang sejenisnya, yang pabriknya menjamur di Damaskus, Syiraz, Jur, dan kota-kota lainnya. Penjualan air bunga mawar dari Jur hingga ke Cina di sebelah timur dan ke Maroko di sebelah barat.<sup>51</sup>

Komunitas petani merupakan mayoritas penduduk di daulah Abbasiyah, mereka terdiri atas penduduk asli setempat yang disebut kelompok *dzimmi*. Mereka adalah pemeluk agama

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 436-440.

Yahudi, Kristen, Zoroaster, dan Sabiin. Mereka berpegang teguh pada budaya dan memelihara bahasa asli mereka, misalnya bahasa dan budaya Aram di Suriah dan Irak, budaya dan bahasa Iran di Persia, dan bahasa serta budaya Koptik di Mesir. Meskipun mereka dikelompokkan sebagai *dzimmi*, tetapi mereka semua ditempatkan pada posisi yang sama untuk saling menghormati kebebasan beragama. Kebanyakan dari mereka yang masuk Islam kemudian pindah ke kota, dan kehidupan ekonominya juga berubah mengikuti kebiasaan orang Arab-Muslim yang lebih banyak berdagang.<sup>52</sup>

#### **D. Kemajemukan Ilmu Pengetahuan**

Kehadiran Bani Abbasiyah di bumi Persia bisa dikatakan sebagai pengisi dan pelanjut sejarah dari sekian rentang waktu yang menandai peradaban Persia. Bani Abbasiyah selama berkuasa tidak semuanya menghasilkan peradaban yang benar-benar baru mulai dari ilmu pengetahuan, pembangunan etika, model pemerintahan, maupun seni dan sastra. Realitas kemajemukan dalam berbagai aspek kebudayaan pada masa Daulah Abbasiyah itu dilukiskan oleh para sejarawan sebagai masyarakat yang berbaju Arab dengan pengaruh Persia yang paling banyak menghiasinya.<sup>53</sup> Kecenderungan demikian karena memang masyarakat Arab yang rata-rata pedagang dan terkenal sebagai masyarakat yang hidupnya nomaden atau sebagai masyarakat yang hidupnya tidak menetap, maka kecil kemungkinan untuk membangun suatu peradaban yang baku, apalagi dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Oleh karena itu, sejak Bani Abbasiyah berkuasa di Persia

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 441.

<sup>53</sup> Karim, *Sejarah Pemikiran*, hlm. 150.

sumbangannya yang pertamakali dilakukan adalah mendorong bangsa Arab untuk mampu menjadi penyokong berkembangnya ilmu pengetahuan. Di antara upaya mereka yang paling gigih dilakukan adalah menggiatkan transmisi pengetahuan dari bangsa-bangsa lain. Diawali dengan menterjemahkan manuskrip-manuskrip berbahasa Sansakerta, Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab.<sup>54</sup> Langkah penerjemahan ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan muslim, tetapi juga banyak dilakukan oleh kalangan Nasrani dari Syiria dan Majusi dari Persia.

Pada masa al-Mansur, khalifah ini memerintahkan kepada para mu'allaf Persia, seperti Nawbath, Ibrahim al-Fazari, dan Ali ibn Isa untuk menterjemahkan karya-karya berbahasa Persia. Karya keilmuan yang diterjemahkan adalah bidang astrologi (ilmu perbintangan), bidang ketatanegaraan, politik dan etika, dan karya filsafat. Penerjemahan langsung dari bahasa Yunani dipimpin oleh seorang Kristen Syiria, Hunain bin Ishak yang didukung oleh Thabit ibn Qurra (penyembah bintang), Qusta ibn Luqa (Kristen), Hubays (kemenakan Hunain), dan Abu Bisht Matta ibn Yunus. Di antara karya para filosof yang diterjemahkan adalah *Logika* karya Aristoteles, *Almagest* karya Ptolemy, *Arithmetic* karya Nicomachus, dan Geometri karya Euclid.<sup>55</sup> Tendorong usaha penterjemahan itu pada masanya juga telah lahir ahli dari kalangan Muslim sendiri dalam bidang ilmu pengetahuan, seperti Muhammad, Ahmad dan Hasan, ketiganya bersaudara dan ahli matematika, al-Asma (740-820 M.) yang mengarang buku tentang pengetahuan alam; Jabir dalam bidang kimia, al-Biruni dalam bidang astronomi, geografi, sejarah dan matematika; dan Ibn Haitham dalam bidang optika

---

<sup>54</sup> Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam 3*, hlm. 169.

<sup>55</sup> Khuluq, "Perkembangan Peradaban Islam", hlm. 104.

dan lain-lain.<sup>56</sup>

Dukungan para Khalifah Abbasiyah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan itu adalah didirikannya *Baitul Hikmah*. Lembaga ini merupakan kelanjutan dari lembaga pada zaman *Jundishapur Academy* yang pada mulanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan karya sastra berupa puisi dan cerita-cerita untuk raja, dan lembaga itu pada masa Bani Abbasiyah pernah mengalami pergantian nama hingga dua kali. Pergantian pertama pada masa Harun al-Rasyid dinamakan *Khizanah al-Hikmah*, dan pergantian selanjutnya pada masa al-Ma'mun dengan nama *Bait al-Hikmah*, yang pada masanya *Bait al-Hikmah* tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan tetapi juga sebagai pusat kegiatan studi serta riset astronomi dan matematika.<sup>57</sup>

Sedikitnya terdapat empat kategori keilmuan besar yang berkembang pada masa Abbasiyah, yaitu sastra dan sejarah; ilmu-ilmu agama; ilmu kedokteran; dan matematika dan astronomi.<sup>58</sup> *Pertama*, perkembangan sastra dan sejarah. Pada masa Dinasti Abbasiyah ini para ahli sastra dan ahli sejarah diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menuliskannya. Karya sastra sebagiannya mengandung uraian tentang sanjungan terhadap para khalifah dan bangsawan, sedangkan karya sejarah menjelaskan tentang peperangan dan kemenangan-kemenangan mereka dalam peperangan. Begitu pentingnya karya sejarah di masa itu, hampir setiap khalifah dan bahkan pembesar suku terkemuka mempunyai seorang ahli sejarah (*mu'arrikh*) yang mencatat dan menyusun sejarah mereka masing-masing. Di antara

---

<sup>56</sup> Nasution, *Falsafah dan Mistisisme*, hlm. 12-13.

<sup>57</sup> Khuluq, "Perkembangan Peradaban Islam", hlm. 104.

<sup>58</sup> Fadhil Lubis, "Dinasti Abbasiyah", hlm. 103-107.

penulis sejarah yang termasyhur pada masa itu adalah al-Baladuri (w.892), al-Tabari (w.923), al-Mas'udi (w.928), dan Abu Raihan al-Biruni (w.1048). Penulis yang terakhir ini bukan saja terkenal sebagai penulis sejarah khalifah, namun terkenal pula sebagai penulis sejarah manusia secara menyeluruh.<sup>59</sup> Tulisan-tulisan al-Biruni baik yang berhubungan dengan persoalan keislaman maupun umum senantiasa merujuk karya Ilmu Pengetahuan Yanani, Persia, dan India.<sup>60</sup>

*Kedua*, ilmu-ilmu agama. Kemajuannya pada masa Abbasiyah dapat dilacak dari perkembangan ilmu-ilmu ini terutama dalam bidang ilmu kalam (teologi) dan fiqh (hukum). Kalangan khalifah saling memberi dukungan terhadap aliran teologi yang berkembang pada masa itu. Tercatat dalam sejarah bahwa Khalifah al-Ma'mun, menerapkan teologi Mu'tazilah sebagai ideologi penguasa. Isu krusial yang melekat pada era itu adalah tentang kemakhlukan Alquran. Meskipun dalam perkembangannya menimbulkan pro kontra di kalangan para ulama. Bahkan munculnya sejumlah karya yang ditulis oleh mazhab tertentu berupaya mengajukan argumentasi untuk mempertahankan dan memperkuat pendapatnya sekaligus menyerang pendapat yang lain.<sup>61</sup> Peninggalan konflik teologi Islam masih terus menjadi bagian dari disiplin keilmuan dan materi kajian di kalangan para sarjana muslim maupun islamolog, minimal teologi yang terkenal di antaranya Mu'tazilah, Sunni, dan Syiah, hingga masa-masa selanjutnya.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

<sup>60</sup> Seyyed Hossein Nasr, *The Islamic Intellectual Tradition Persia* (t.k.: Curzon Press, 1996), hlm. 93.

<sup>61</sup> Fadhil Lubis, "Dinasti Abbasiyah", hlm. 105.

Sementara itu gambaran sikap al-Ma'mun atas diterapkannya teologi Mu'tazilah dalam pemerintahannya, sebagaimana dituliskan Syalabi bahwa "Khalifah al-Ma'mun telah campur tangan secara keras dan menggunakan kekuasaannya untuk memaksa rakyat berpegang kepada pendapat Alquran itu makhluk. Banyak para penulis telah mengecamnya karena mengamalkan sikap memberantas kebebasan, menggunakan mata pedang untuk memperkuat pihaknya dan menindas para alim ulama yang menentang prinsipnya itu".<sup>62</sup>

Selain ilmu kalam berkembang pula paham keagamaan yang lain, yang satu sama lain saling mempengaruhi. Seperti tokoh sufi dan filosof al-Ghazali (w.1111), Muhammad Abdul Karim Syahrastani (w. 1153), dan Farhruddin ar-Razi (w.1210). Pada perkembangan aspek dan ilmu hukum (*fiqh*) hingga melahirkan pengelompokan mazhab seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali. Keempat mazhab tersebut hingga kini masih bisa dijumpai di kalangan masyarakat muslim dengan keunikan dan ciri khas yang mendasarkan pada metode pengambilan kesimpulan hukum (*istinbath hukum*) serta penggunaan sumber hukum yang mereka jadikan sebagai landasan pembentukan hukum.

*Ketiga*, ilmu kedokteran. Adapun terkait dengan perkembangan ilmu kedokteran, Dinasti Abbasiyah melakukan revitalisasi tradisi kedokteran kuno yang pernah jaya pada zaman Bizantium di Antiokia dan Harran di Suriah serta Iskandariyah di Mesir. Salah satu wilayah yang terdapat sekolah kedokteran adalah di Jundishapur, warisan masa keemasan Sasania.<sup>63</sup> Begitu pentingnya kehadiran kedokteran di masa itu, sampai-sampai

---

<sup>62</sup> Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam 3*, hlm. 122.

<sup>63</sup> Fadhil Lubis, "Dinasti Abbasiyah," hlm. 106.



setiap bangsawan bisa mempunyai dokter atau ahli kesehatan pribadi atau keluarga. Disebutkan bahwa bukan saja khalifah dan keluarganya yang memiliki dokter pribadi, tetapi masing-masing keluarga bangsawan juga mempunyainya. Bahkan secara umum keluarga-keluarga muslim yang terpandang dan kaya mempercayakan kesehatan mereka kepada dokter-dokter non-muslim. Akan tetapi pada masa berikutnya dokter-dokter muslim menjadi lebih dominan.<sup>64</sup>

Di antara ahli kedokteran yang berjasa pada masa itu adalah Muhammad bin Zakariya al-Razi (Rhazes). Diceritakan bahwa al-Razi datang ke Baghdad pada masa khalifah Muktafi, dan ia dipercaya untuk memimpin sebuah rumah sakit. Al-Razi dikenal sebagai dokter yang murah hati, sayang kepada para pasiennya, dermawan kepada orang miskin, tidak memungut bayaran, dan selalu memberi pengobatan secara berkala kepada mereka.<sup>65</sup> Selain al-Razi, terdapat dokter lain yang terkenal pada masa itu yaitu Ali Abbas (w. 944). Ali Abbas menulis sebuah ensiklopedi kedokteran, *Kitab al-Maliki*. Konon buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan judul *Liber Regius* dan terjemahan dalam bahasa Inggris dengan judul *the Whole Medical Art*. Buku ini menjadi rujukan medis hingga menjelang era modern.<sup>66</sup>

*Keempat*, matematika dan astronomi. Kedua ilmu ini merupakan ilmu alat yang menjadi kebutuhan dasar bagi umat Islam. Bahkan ilmu ini menjadi penting terkait dengan penentuan

---

<sup>64</sup> *Ibid.*.

<sup>65</sup> MM. Syarif, *Para Filosof Muslim*. (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 32.

<sup>66</sup> Fadhil Lubis, "Dinasti Abbasiyah," hlm. 106. Disebutkan bahwa ketenaran buku ini hanya bisa dikalahkan oleh karya Ibn Sina (w. 1073) yang berjudul *al-Qanun fi al-Thib*.

awal bulan, terutama awal bulan Ramadhan, penentuan waktu salat, serta penentuan arah kiblat. Ilmu ini sangat berguna terutama dari kalangan muslim yang tinggal di wilayah di luar dan jauh dari tanah Arab atau sekurang-kurangnya kalangan masyarakat muslim yang tidak setiap saat melihat matahari sebagai patokan untuk menentukan waktu salat.

Terhadap ilmu matematika dan astronomi, para Khalifah Abbasiyah memberi perhatian yang besar. Ilmu ini termasuk baru dalam dunia muslim, karena pada masa itu kalangan ilmuwan muslim tidak menemukannya melainkan melanjutkan tradisi keilmuan dimaksud dan mengembangkannya. Karya ilmuwan pra Islam yang dikembangkan oleh kalangan muslim adalah Claudius Ptolomaeus (ahli astronomi sekitar 100-178) karya yang berjudul *Megale Syntaxis* yang diterjemahkan oleh al-Hajaj bin Yusuf pada masa Khalifah al-Ma'mun.<sup>67</sup> Kajian tentang matematika dan astronomi ini juga diperkaya dengan warisan ilmu dari India. Tokoh yang berperan dalam melakukan transmisi keilmuan ini dari India adalah Muhammad bin Ibrahim al-Fazari (penerjemah pada masa khalifah al-Ma'mun) yang menerjemahkan buku astronomi India yang berjudul *Zij as-Sindhind* (Tabel Astronomi).<sup>68</sup> Ringkasan dari karya tersebut lalu disusun oleh al-Khawarizm dan diserahkan kepada Khalifah al-Mansur.

Selain ilmu-ilmu di atas, lahir secara mengesankan para filosof dan sufi pada masa itu. Karya-karya mereka bukan saja telah menjadi kajian ilmuwan pada masa dekat setelah mereka, namun juga menjadi rujukan filosof dunia baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim. Nama-nama di antara mereka selain dikenal

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 106.

<sup>68</sup> *Ibid.*

dalam istilah Arab juga dikenal dengan bahasa Latin atau Barat. Penggunaan nama mereka ini sekaligus menunjukkan bahwa salah satu peran besar dinasti Abbasiyah adalah menjadi pendukung transmisi utama berkembangnya sains, filsafat dan teknologi dari era Romawi dan Yunani, hingga mengantarkan kejayaan modern Barat dan masyarakat Modern pada umumnya.<sup>69</sup>

## E. Pertumbuhan Kebudayaan Lokal

Meskipun Bani Abbasiyah memerintah dengan menyandarkan pada nilai-nilai Islam, namun mereka mempersilahkan masyarakat di daerah-daerah kekuasaan Abbasiyah untuk masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal mereka. Pendukung dan pelaku budaya lokal itu pada masanya adalah warga masyarakat yang disebut dengan *dzimmi*. Hitti menuliskan bahwa orang *dzimmi* berpegang teguh pada budaya dan memelihara bahasa asli mereka baik di kota-kota maupun di pedesaan, misalnya : budaya dan bahasa Aram serta Syuriah di Syuriah dan Irak, budaya dan bahasa Iran di Persia, dan bahasa serta budaya Koptik di Mesir.<sup>70</sup>

Sementara itu potret bertahannya budaya lokal lain terlihat pada penggunaan bahasa di kalangan masyarakat. Penggunaan bahasa Arab di kalangan masyarakat baru berjalan secara massif dan merata pada akhir pemerintahan Abbasiyah. Meskipun bahasa Arab pada masa itu dijadikan sebagai bahasa pengetahuan dan bahasa masyarakat, namun ia tidak bisa pernah

---

<sup>69</sup> Hubungan transmisi pengetahuan Yunani, Romawi, dan Persia Kuno menuju Dunia Barat Modern bisa dilihat dalam Nasr, *the Islamic Intellectual Tradition Persia*. Buku ini seakan menjadi jembatan penghubung sejarah sains Islam sejak masa Yunani dan Romawi, dunia Barat Modern hingga masuk dunia Muslim di seluruh dunia.

<sup>70</sup> Hitti, *History of the Arab*, hlm. 441. Lihat juga Nasr, *the Islamic Intellectual*, hlm. 93-95.

berhasil menggantikan bahasa Persia yang telah menjadi bahasa percakapan yang sudah mapan. Fenomena ini juga terjadi di kalangan Kristen Lebanon, bahwa bahasa Syuriah asli menolak kuat pengaruh bahasa Arab.<sup>71</sup> Fakta ini menunjukkan bahwa pengaruh budaya Arab—terutama dalam bahasa Arab—tidak sepenuhnya mampu mempengaruhi budaya lokal, dan budaya lokal bisa tumbuh secara leluasa.

Selain bahasa Arab tidak mampu menggantikan bahasa lokal, pada saat yang bersamaan dinasti Abbasiyah mengadopsi konsepsi, tradisi, dan kultur politik Persia. Azra menggambarkan bahwa pemikiran, sistem politik, dan etiket istana dinasti-dinasti Muslim sejak masa Abbasiyah dan masa selanjutnya menjadi sangat kepersia-persiaan.<sup>72</sup> Potret ini menegaskan bahwa nilai-nilai Islam yang universal tetap mampu berdialog bahkan berkolaborasi dengan budaya setempat. Pada sisi lain Goldziher menuliskan bahwa adopsi budaya setempat, seperti halnya dari kerajaan Sasania menjadi bagian yang menyatu dalam kehidupan dinasti Abbasiyah. Mereka makin menjadi-jadi terhadap kemegahan dan kebesaran raja-raja Sasania, sebagaimana juga pemerintahan Persia, yang menyatukan antara agama dan negara, merupakan rencana Abbasiyah yang jelas.<sup>73</sup>

Peradaban Islam pada masa ini pada kenyataannya mencerminkan ekspresi tokoh-tokoh elite politik dan keagamaan yang timbul bersama dengan penaklukan bangsa Arab. Namun keluarga, kampung, ketetanggaaan, kesukuan, dan bentuk-bentuk organisasi komunitas kecil lainnya tidak terpengaruh oleh sejumlah penaklukan bangsa Arab dan imperium Muslim. Peradaban Islam justru berkembang dalam proses asimilasi unsur-unsur krusial

---

<sup>71</sup> Hitti, *History of the Arab*, hlm. 452.

<sup>72</sup> Azra, "Peradaban Islam", hlm. 328.

<sup>73</sup> Goldziher, *Pengantar Teologi*, hlm. 44.

dari warisan zaman kuna dan kebudayaan lokal yang tengah hidup pada masanya. Pembentukan komunitas Muslim ditandai dengan penerapan institusi imperial Sasania dan Bizantium termasuk konsep seorang penguasa dana tanggungjawabnya terhadap agama oleh para khalifah Arab-Muslim. Demikian pula orang-orang yang baru memeluk Islam membawa pola pengajaran, kultur, dan identitas politik mereka yang lama ke dalam sistem sosial-budaya dan keagamaan Islam.

Berdasarkan tinjauan kesejarahan seperti di atas, dapatlah dikatakan bahwa Islam muncul sebagai wujud baru dari pewarisan peradaban kuna dan penghidupan kebudayaan lokal. Dalam hal ini Islamisasi tidak memperkenalkan model-model baru dari produksi ekonomi, atau bentuk-bentuk kekeluargaan, kesukuan, dan imperium yang baru; melainkan Islam cenderung memasukkan bentuk-bentuk institusional masa lampau dan lokal itu dengan menggunakan peristilahan, konsep, pilihan nilai, definisi personal, sosial, dan identitas politik yang baru, dalam term kultural Muslim. Proses asimilasi berlangsung dengan cara sedemikian rupa sehingga sifat keislamannya tidak diragukan, bahkan proses pembentukan peradaban Islam itu bukanlah sebuah asimilasi yang pasif melainkan merupakan pergumulan aktif antar para pendukung yang berbeda-beda. Di kalangan istana, tokoh-tokoh kepustakaan berbahasa Arab, Persia, dan Hellenistik aktif bersaing untuk membentuk identitas khilafah. Para pendukung bahasa Arab dan Persia bersaing hingga bahasa Arab berhasil menjadi bahasa utama bagi imperium, dan kepustakaan Persia dan Hellenistik terserap ke dalam bentuk-bentuk kesastraan bahasa Arab.<sup>74</sup>

Pertumbuhan beragam budaya dalam komunitas masyarakat

---

<sup>74</sup> Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, I, hlm. 186.

memang tidak bisa disangkal melahirkan sejumlah orientasi yang saling bertentangan. Sejumlah perbedaan itu juga menimbulkan sejumlah konflik dalam segala level kehidupan masyarakat. Pertumbuhan kebudayaan lokal yang mencerminkan orientasi saling bertentangan tersebut antara lain berjalan sejajar dengan perkembangan fragmentasi politik dalam wilayah kekuasaan Islam. Kesatuan politik daulah Abbasiyah sesudah tahun 950 mulai menurun akibat pemerintahan sentral yang mengawasi imperium yang sangat luas membentang dari Atlantik hingga Asia Tengah itu dihadapkan dengan sekian banyak kelompok yang saling bersaing. Berbagai perbedaan paham keagamaan, kedaerahan, dan aspirasi-aspirasi politik lokal yang saling bersaing menyebabkan timbul rangkaian pemberontakan dan gerakan-gerakan memisahkan diri. Di Maroko dan Tunisia pihak penguasa setempat merupakan penguasa penuh dalam wilayahnya dengan membangun dinasti-dinasti setempat; Mesir menampilkan kebangkitan Daulah Fatimiyah yang menganut paham Syi'ah; begitu pula di Iran, Syuriah, dan Irak, pihak gubernur-gubernur menekankan kebebasannya segaai kepala negara yang semi otonom; bahkan keluarga Buwaihi yang tadinya berkuasa di berbagai wilayah barat Iran sebagai perpanjangan tangan kekuasaan Abbasiyah kemudian merebut kekuasaan Bagdad dan menetapkan dirinya sebagai *Amirul Umara*; langkah serupa juga dilakukan oleh keluarga Saljuk (Turki).<sup>75</sup>

Menguatnya pertumbuhan kebudayaan lokal adalah seiring dengan bertumbuhnya otonomi di propinsi-propinsi selama abad kemunduran Abbasiyah. Uraian secara garis besarnya dapat disajikan melalui pembahasan di sini, mulai dari propinsi-propinsi

---

<sup>75</sup> Esposito, *Islam dan Politik*, hlm. 32-33.

Timur sampai Afrika Utara dan Spanyol. Beberapa sub-komunitas Muslim dengan latar kebudayaan lokalnya di wilayah Timur dapat disebutkan misalnya: Bani Tahiriyah yang menguasai wilayah Khurasan dengan Nishapur sebagai ibu kotanya; Bani Saffariyah sejak 885 menggantikan Tahiriyyah dengan wilayah kekuasaannya meliputi Persia timur dan Afghanistan barat-daya, mereka mempertahankan diri hingga abad ke-15; Bani Sammaniyah yang berkuasa sejak 875 dapat menguasai seluruh Transoxiana, mereka meneguhkan statusnya menjadi penguasa lokal dengan ibukotanya di Bukhara, yang juga menjadi pusat penting bagi pengajaran Islam dalam bahasa Arab maupun bahasa Persia.<sup>76</sup> Selain dinasti-dinasti tersebut, terdapat beberapa keluarga yang berhasil memerintah suatu daerah otonom, antara lain Bani Ziyariyah yang selanjutnya diteruskan oleh Bani Buwaihiyah, mereka menguasai sebagian besar Persia Utara. Semua penguasa lokal tersebut menganggap diri mereka sebagai bangsa Persia atau keturunan dinasti Sasania, sehingga dalam konteks peradaban mereka berusaha menghidupkan identitas budaya lokal Persia dalam perkembangan kebudayaan Islam.

Sementara itu di Suriah dan Irak Utara tumbuh kebudayaan lokal yang dipelopori oleh Bani Hamdaniyah. Mereka adalah satu keluarga Arab dari kabilah Taghlib yang pengaruhnya menanjak melalui kemahiran mereka sebagai komandan militer. Mereka meneguhkan kekuasaannya terutama semenjak Abul Hayya, salah seorang putera Hamdan ditunjuk sebagai gubernur Mosul pada tahun 905. Corak kebudayaan lokal yang dikembangkannya adalah asimilasi kebudayaan Arab dengan kebudayaan Romawi

---

<sup>76</sup> W. Montgomery Watt, *Kejayaan Islam: Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis*, terj. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), hlm. 168-169.

yang banyak ditunjukkan dalam kemajuan seni sastra. Dalam keagamaan mereka, sebagaimana didukung para Pangeran Hamdani, dianggap bersimpati kepada paham Syi'ah.<sup>77</sup>

Lain halnya dengan pertumbuhan kebudayaan lokal di Afrika Utara dan Spanyol, bahwa sejak tahun 850 sejumlah dinasti kecil yang semula berkuasa atas nama dinasti Abbasiyah memberikan kontribusinya bagi perkembangan budaya Arab-Islam yang seiring dengan situasi kebudayaan lokal. Dapat disebutkan misalnya Bani Aghlabi yang menguasai Ifriqiyah (Tunisia) dan sebagian pulau Sisilia; Bani Rustamiyah di Aljazair barat dan Idrisiyah di Maroko. Semua dinasti ini bercorak keagamaan Sunni. Namun sejak tahun 909 seiring meluasnya gerakan Fathimiyah di Afrika Utara, maka hampir semua dinasti lokal itu berideologi Syi'ah Ismailiyah, kecuali Rustamiyah yang bertahan dengan corak Khawarij.<sup>78</sup> Sementara Spanyol yang berada di bawah cabang bani Umayyah yang masih berhasil mempertahankan diri, sebagaimana telah dibahas dalam bab terdahulu, menampilkan kebudayaan Islam dalam pergumulan antar kebudayaan Timur Tengah dengan kebudayaan lokal masyarakat Spanyol (Barat).

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 169.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 171.



## BAB VI

# PENUTUP

Dengan berakhirnya pembahasan buku ini, beberapa kesimpulan tentang komunitas-multikultural dalam sejarah Islam dapat dikemukakan di sini. *Pertama*, Islam sebagai agama wahyu telah menjadi sistem kepercayaan, norma dan perilaku masyarakat pemeluknya yang berkembang melalui sistem komunitas yang beragam. Komunitas muslim yang mula-mula berlatar budaya Arab, karena Nabi Muhammad saw sendiri sebagai penyampai utama risalah Islam itu adalah orang Arab, maka bahasa dan nilai-nilai keagamaan Islam yang disampaikannya sangat lekat dengan dasar-dasar kebudayaan bangsa Arab. Padahal bangsa Arab sendiri sudah semenjak lama sebelum datangnya Islam telah memiliki kepercayaan dan kebudayaan yang relatif mapan, sehingga agama yang dibawa Nabi Muhammad saw. ini tumbuh dalam komunitas di tengah keanekaragaman kultur. Karena itu komunitas muslim pada masanya sebagaimana terjadi di Madinah adalah komunitas yang tumbuh dari keragaman latar budaya Arab, dan Islam berperan sebagai perekat antar kultur bangsa Arab yang berbeda-beda itu.

*Kedua*, bentuk komunitas muslim mulai mengalami perubahan semenjak kepemimpinan Islam di tangan Khulafa al-Rasyidin. Kepemimpinan mereka menentukan variasi sistem komunitas itu, apalagi masing-masing khalifah periode ini menampilkan kebijakan untuk memperluas wilayah penyebaran Islam, sehingga

komunitas Muslim-Arab itu sendiri mulai berhubungan dengan sistem kebudayaan di luar bangsa Arab. Namun demikian para khalifah juga telah berhasil mengembangkan fundasi kebudayaan Islam yang dirintis oleh nabi saw., yaitu dengan upaya-upaya mereka mengkontekstualisasikan Islam terhadap situasi masyarakat muslim yang tengah mengalami pergeseran identitas menuju kehidupannya yang lebih majemuk. Akibat dari kemajemukan budaya itu memang, kekuatan komunitas muslim-Arab juga mulai dibayang-bayangi oleh konflik kepentingan dan aliran-aliran keagamaan.

*Ketiga*, komunitas Arab muslim menunjukkan polanya yang akomodatif dengan sistem peradaban besar di Timur Tengah. Ini khususnya terlihat dari sistem peradaban yang dibangun oleh Daulah Umayyah di Damaskus maupun di Spanyol, yang kala itu peradaban Islam berkembang atas pengaruh peradaban Romawi dan bangsa Barat. Sekalipun Umayyah sendiri menerapkan sistem peradaban yang berbasis pada kebudayaan Arab melalui kebijakan *arabisme*, namun perkembangan kebudayaan Arab justru dapat diperluas tanpa menghindari pengaruh-pengaruh luar. Pada masa ini komunitas muslim-Arab yang diperkaya budaya luar Arab itu telah menunjukkan dinamika tersendiri, sehingga beberapa segi peradaban Islam yang dikembangkan oleh dominasi orang Arab dapat berkembang di berbagai wilayah penyebaran komunitas Islam.

*Keempat*, komunitas Arab muslim bangkit memajukan peradabannya atas sumbangsih dan peran masyarakat berkebangsaan Persia dan lainnya. Ini terjadi pada masa daulah Abbasiyah. Kemajuan peradaban Islam akibat peran-peran konstruktif yang diberikan oleh bangsa-bangsa non Arab terlihat di dalam sistem kekhilafahan, kemajuan bidang ilmu pengetahuan,

dinamika sosial-ekonomi, bahkan keanekaragaman bidang sosial-keagamaan. Pada masanya persentuhan kebudayaan antara Arab dengan Persia, Yunani, dan India telah mempertegas komunitas muslim dalam realitas multikultural. Keadaan ini diperkuat dengan tumbuhnya otonomi wilayah kekuasaan sekaligus dengan pengembangan identitas kebudayaan lokal, terutama pada periode akhir kekuasaan Abbasiyah. Kecenderungan multikultural bukan hanya terjadi pada aspek-aspek duniawi, melainkan sangat mempengaruhi keanekaragaman paham, aliran, dan golongan keagamaan di kalangan umat Islam sendiri. Demikian pula ditinjau dari sosial-politik, bahwa komunitas muslim waktu itu mampu melindungi dan mengakomodasi masyarakat minoritas non muslim yang hidup dalam dominasi mayoritas masyarakat muslim. Terlepas dari kejadian-kejadian konflik pada masa-masa tertentu sebagai dampak dari kehidupan multikultural itu, ternyata umat Islam berhasil menampilkan kemajuan peradabannya atas dukungan dari berbagai potensi kebudayaan yang dirakit dengan kebijakan-kebijakan kepemimpinan Islam.

# DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, dkk. (ed.). *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam I: Akhir dan Awal*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2002.
- Abdullah, M. Amin., dkk. *Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multi Kultural*. Yogyakarta; IAIN Sunan kalijaga-Kurnia Kalam Semesta, 2002.
- Abdurahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak, 2011.
- al-Maghluts, Sami bin Abdullah. *al-Athlas at-Tarikh li Sirah ar-Rasul, Atlas Perjalanan Hidup Nabi Muhamamd*. Jakarta: Al-Mahira, 2008.
- Amin, Samsul Munir. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002.
- Aziz, Abdul. *Chiefdom Madinah Salah Paham Negara Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabeta, 2011.
- Burke, Peter. *Sejarah dan Teori Sosial*, terj. Mestika Zed & Zulfami. Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Coope, Jessica A. "Religious and Cultural Conversion to Islam in Ninth-Century Umayyad Cordoba". *Journal of World History*, Vol. 4 No. 1 1993 University of Hawai Press.
- De Jong, Kees. "Al Andalus di Bawah Kekuasaan Daulah Umayyah di Cordoba (756-1031): Suatu Masyarakat Pluralistik yang Beradab". *Gema Teologia* (Jurnal Fakultas Theologia Universitas Kristen Duta Wacana). Vol. 34 No. 1 April 2010.
- Esposito, John L. *Islam dan Politik*, terj. HM. Joesoef Sou'yb. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Fauzi, Ihsan Ali. "Convivencia" di Andalusia. *Democracy Project*, Edisi 039 Desember 2011. Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi.

- Fyzee, A.A.A. *Kebudayaan Islam (Asal-usul dan Perkembangannya*, Terj. Syamsuddin Abdullah. Yogyakarta: Bagus Arafah, 1982.
- Goldziher, Ignas. *Pengantar Teologi dan Hukum Islam*, terj. Heri Setiawan. Jakarta: INIS, 1991.
- Hassan, Hassan Ibrahim. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, terj. Djahdan Humam. Yogyakarta: Kota Kembang, 1989.
- Hawting, G. R.. *The First Dynasty of Islam: The Umayyad Caliphate AD 661-750*. Suthern Illinois: Southern Illinois University Press, 1987.
- Hitti, Philip K. *History of the Arabs, from the Earliest Time to the Present*. London: MacMillan, 1973.
- Hitti, Philip K. *The History of The Arabs*. Terj. R. Cecep Lukman Hakim dan Dedi Slamet Riyadi. Bandung: Serambi, 2008.
- Iqbal, Muhammad. *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. Lahore: SH. Muhammad Ashraf, 1971.
- Issawi, Charles. *Filsafat Islam tentang Sejarah*, terj. A. Mukti Ali. Jakarta: Tintamas, 1976.
- James C. Conroy. "Do the Andalusian Caliphates offer a good model for intercultural citizenship?". Makalah pada *Inaugural Conference of the Jubilee Centre for Character and Values* di Universitas Birmingham, 2012.
- Karim, M. Abdul. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: bagaskara, 2012.
- Karya, Sukama, dkk. *Ensiklopedi Mini Sejarah dan kebudayaan Islam*. Jakarta: Logas, 1996.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pemikiran dan Perkembangan Hiostoriografi Indonesia Suatu Alternatif*. Jakarta: PT. Gramedia, 1982.
- \_\_\_\_\_. *Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987.
- \_\_\_\_\_. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia, 1992.

- Kuntowijoyo. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan, 1997.
- \_\_\_\_\_. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Lapidus, Ira M.. *Sejarah Sosial Umat Islam, 2 jilid*, terj. Ghufron A. Mas'udi. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Mahfud, Choirul. *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Maria Rosa Menocal. "Culture in the Time of Tolerance: Al-Andalus as a Model for Our time". *Occasional Papers*, Paper 1. [http://digitalcommons.law.yale.edu/ylsop\\_papers/1](http://digitalcommons.law.yale.edu/ylsop_papers/1)
- Maryam, Siti, dkk. *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik hingga Modern*. Yogyakarta: LESPI, 2009.
- Nasr, Seyyed Hossein. *The Islamic Intellectual Tradition Persia*. t.k: Curzon Press, 1996.
- Nasution, Harun. *Filsafat dan Mistisisme*. Jakarta: Bulan bintang, 1978.
- Pulungan, J. Sayuthi. *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Alquran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Rahman, Fazlur. *Islam*. Terj. Ahsin Mohammad. Bandung: penerbit Pustaka, 1984.
- Sardar, Ziauddin. *Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim*, terj. Rahmani Astuti. Bandung: Mizan, 1986.
- Shibel, Fuad Muhammad. *Kebudayaan Islam menurut Tinjauan Toynbee*, terj. Bustani A. Gani dan Chatibul Umam. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Shihab, Alwi. *Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan, 1999.
- Syalabi, Ahmad. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 3 jilid. terj. Muchtar Yahya. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1983.
- Syarif, M.M. *Para Filosof Muslim*. Bandung, Mizan.
- Umar, Nazaruddin. *Argumentasi Kesetaraan Gender: Perspektif Alquran*. Jakarta: Paramadina, 2001.

- Von Grunebaum, Gustave E. *Modern: The Search for Cultural Identity*. New York: Ancore, 1964.
- Wahid, Abdurahman, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*. Depok: Desantara, 2001.
- Watt, W. Montgomery, *Kejayaan Islam: Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis*, terj. Hartono Hadikusumo. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.
- Yatim, Badri, *Sejarah peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.